



**RENCANA KERJA
DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN
KOPERASI DAN USAHA MIKRO
KABUPATEN SANGGAU
TAHUN 2027**



**PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU
TAHUN 2026**



KATA PENGANTAR



KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa karena atas rahmat dan karunia-Nya, Rencana Kerja Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sanggau tahun 2027 ini dapat disusun dan diselesaikan.

Penyusunan Rencana Kerja ini didasarkan pada Rencana Strategis Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sanggau tahun 2025 – 2029 serta RPJMD Kabupaten Sanggau Tahun 2025 - 2029 dan dimaksudkan sebagai panduan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Sekretariat Dinas serta Bidang-bidang pada Tahun Anggaran 2027

Rencana Kerja ini menggambarkan rencana dan target yang akan dicapai oleh Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sanggau pada tahun 2027 disertai dengan rencana pagu anggaran yang tersedia untuk masing-masing kegiatan, strategi dan kebijakan yang akan dilaksanakan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Dan karena adanya keterbatasan sumber daya keuangan sehingga tidak semua program dan kegiatan yang telah tertuang dalam Rencana Strategis dapat diakomodir dan diimplementasikan di setiap tahun anggaran termasuk untuk di tahun 2027 sehingga dalam Rancangan Akhir Rencana Kerja ini ditetapkan program dan kegiatan yang paling prioritas dan menyentuh langsung pada kepentingan publik.

Kami menyadari bahwa Penyusunan Rencana Kerja ini masih terdapat kekurangan oleh karena itu masukan dan saran dari berbagai pihak untuk penyempurnaannya sangat diperlukan.

Sanggau, 1 September 2026



Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan,
Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sanggau

Shopiar Juliansyah, S.E., MM
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP 197207301997031002



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Dasar Hukum	2
1.3 Maksud dan Tujuan	3
1.4 Sistematika Penulisan	3
BAB II	5
HASIL EVALUASI RENCANA KERJA TAHUN LALU	5
2.1 Evaluasi Capaian Kinerja Bidang Urusan	5
2.2 Evaluasi Capaian SPM	58
2.3 Rumusan Permasalahan dan Isu Strategis Tahun 2027	58
2.4 Telaah Pokok-pokok Pikiran DPR	87
2.5 Inovasi bidang urusan dalam upaya memberikan pelayanan kepada masyarakat	91
BAB III	117
TUJUAN DAN SASARAN	117
3.1 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sanggau	117
3.2 Arah Kebijakan	141
BAB IV	147
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN	147
BAB V	191
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	191
BAB VI	194
PENUTUP	194



DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO, KABUPATEN SANGGAU.....	11
Tabel 2. 2 STRUKTUR ORGANISASI UPT METROLOGI LEGAL DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO KABUPATEN SANGGAU.....	12
Tabel 2. 3 DATA PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOPERASI DAN USAHA MIKRO, KABUPATEN SANGGAU TAHUN 2025	13
Tabel 2. 4 ANGGARAN DAN REALISASI DAN ANGGARAN, DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO KABUPATEN SANGGAU.....	15
Tabel 2. 5 KONDISI BEBERAPA SARANA ATAU INVENTARIS PENUNJANG KERJA PADA DINAS PERINDAGKOP DAN USAHA MIKRO KAB. SANGGAU TAHUN 2025	16
Tabel 2. 6 ASET YANG DIMILIKI DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO KABUPATEN SANGGAU TAHUN 2025	18
Tabel 2. 7 REKAPITULASI PERKEMBANGAN INDUSTRI KECIL FORMAL KABUPATEN SANGGAU.....	20
Tabel 2. 8 REKAPITULASI PERKEMBANGAN INDUSTRI KECIL NON FORMAL KABUPATEN SANGGAU.....	21
Tabel 2. 9 REKAPITULASI PERKEMBANGAN INDUSTRI MENENGAH KABUPATEN SANGGAU.....	22
Tabel 2. 10 DATA PELAKU USAHA SEKTOR PERDAGANGAN KABUPATEN SANGGAU TAHUN 2025.....	24
Tabel 2. 11 DATA SARANA PERDAGANGAN MENURUT JENISNYA KABUPATEN SANGGAU TAHUN 2025	24
Tabel 2. 12 DATA POTENSI EKSPOR KABUPATEN SANGGAU TAHUN 2025	25
Tabel 2. 13 DATA ALAT UKUR TAKAR TIMBANG DAN PERLENGKAPANNYA (UTTP) KABUPATEN SANGGAU TAHUN 2025	27
Tabel 2. 14 DATA SEBARAN KOPERASI BERDASARKAN KECAMATAN TAHUN 2025.....	28



Tabel 2. 15 KOPERASI MENURUT JENIS KOPERASI KABUPATEN SANGGAU TAHUN 2025.....	29
Tabel 2. 16 DATA KOPERASI KABUPATEN SANGGAU TAHUN 2025	30
Tabel 2. 17 REKAPITULASI DATA USAHA MIKRO KABUPATEN SANGGAU TAHUN 2025.....	31
Tabel 2. 18 REKAPITULASI DATA USAHA KECIL KABUPATEN SANGGAU TAHUN 2025.....	32
Tabel 2. 19 REKAPITULASI DATA USAHA MENENGAH KABUPATEN SANGGAU TAHUN 2025.....	33
Tabel 2. 20 DATA BANGUNAN PASAR RAKYAT MILIK PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU TAHUN 2025.....	35
Tabel 2. 21 REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH DAN PENCAPAIAN RENTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2026 KABUPATEN SANGGAU	36
Tabel 2. 22 PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO	60
Tabel 2. 23 USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN DARI PEMANGKU KEPENTINGAN TAHUN 2027 KABUPATEN SANGGAU	88
Tabel 2. 24 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AKHIR RKPD TAHUN 2027 DAN HASIL ANALISIS KEBUTUHAN 2027 KABUPATEN SANGGAU 2027	94
Tabel 3. 1 RUMUSAN TUJUAN, SASARAN RENCANA STRATEGIS DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, DAN USAHA MIKRO	118
Tabel 3. 2 RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2027 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2028 KABUPATEN SANGGAU.....	127
Tabel 3. 3 ARAH KEBIJAKAN RENCANA STRATEGIS DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, DAN USAHA MIKRO KABUPATEN SANGGAU 2025-2029	142
Tabel 3. 4 RUMUSAN TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN ARAH KEBIJAKAN DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, DAN USAHA MIKRO KABUPATEN SANGGAU	144



Tabel 4. 1 INDIKATOR KINERJA DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO KABUPATEN SANGGAU YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD TAHUN 2025-2029	148
Tabel 4. 2 INDIKATOR KINERJA DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO KABUPATEN SANGGAU.....	149
Tabel 4. 3 RENCANA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN DAN PENDANAAN DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO KABUPATEN SANGGAU.....	150
Tabel 5. 1 INDIKATOR KINERJA DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO KABUPATEN SANGGAU YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD TAHUN 2025-2029	192
Tabel 5. 2 INDIKATOR KINERJA DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO KABUPATEN SANGGAU.....	193



BAB I

PENDAHULUAN



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) adalah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan untuk periode satu tahun baik yang dilaksanakan secara langsung oleh pemerintah daerah maupun ditempuh dengan cara mendorong partisipasi masyarakat (Lampiran 6, Permendagri No.54, Tahun 2010). Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sanggau berkewajiban menyusun Rencana Kerja Tahun 2027 sebagai satu kesatuan sistem perencanaan pemerintah Kabupaten Sanggau. Rencana Kerja Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sanggau Tahun 2027 selanjutnya disebut Renja 2027 berperan penting dalam mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah yang termuat dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) serta menjadi dasar untuk penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sanggau untuk Tahun 2027.

Penyusunan Rencana Kerja 2027 berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Rencana Kerja 2027 merupakan penjabaran dari kebijakan dan strategi pembangunan yang termuat dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Sanggau, Renstra Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sanggau Tahun 2025-2029, dan menjadi bagian tak terpisahkan dari program pembangunan sektor industri perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro tahun sebelumnya. Renja 2027 adalah penerjemahan visi, misi, program dan kegiatan dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sanggau.



1.2 Dasar Hukum

Dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sanggau Tahun 2027 ini adalah:

1. Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
5. Permendagri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 59 Tahun 2007;
6. Permendagri Nomor 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah
7. Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Akhir Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
8. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2025-2029;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten



- Sanggau Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 2);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 3 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025–2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Sanggau Tahun 2024 Nomor 3);
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 2 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sanggau Tahun 2025-2029;
 12. Peraturan Bupati Sanggau Nomor 71 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sanggau.
 13. Rencana Strategis Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sanggau Tahun 2025 - 2029;

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Rencana Kerja Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sanggau disusun dengan maksud sebagai pedoman dan panduan dalam pelaksanaan program dan kegiatan Tahun Anggaran 2027 oleh sebab itu Rencana Kerja Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sanggau Tahun 2027 merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) dan memuat indikator keluaran / kinerja yang bersifat kuantitatif maupun kualitatif sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.

1.3.2 Tujuan

Sedangkan tujuan dari penyusunan Rencana Kerja ini adalah agar penyusunan dan pelaksanaan program dan kegiatan tahunan berjalan efektif dan efisien sesuai dengan pagu anggaran yang tersedia serta memudahkan pimpinan untuk melakukan evaluasi kinerja masing-masing bidang dan sekretariat dalam rangka pelaksanaan pengawasan melekat.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika Rencana Kerja Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sanggau Tahun 2027 adalah sebagai berikut:



BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Dasar Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

**BAB II HASIL EVALUASI RENJA DINAS PERINDUSTRIAN,
PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO KABUPATEN
SANGGAU**

- 2.1 Evaluasi Capaian Kinerja Bidang Urusan Tahun 2025.
- 2.2 Evaluasi Capaian SPM Tahun 2023-2025.
- 2.3 Rumusan Permasalahan dan Isu Strategis Tahun 2027.
- 2.4 Telaah Pokok-pokok Pikiran DPRD.
- 2.5 Inovasi Bidang Urusan.

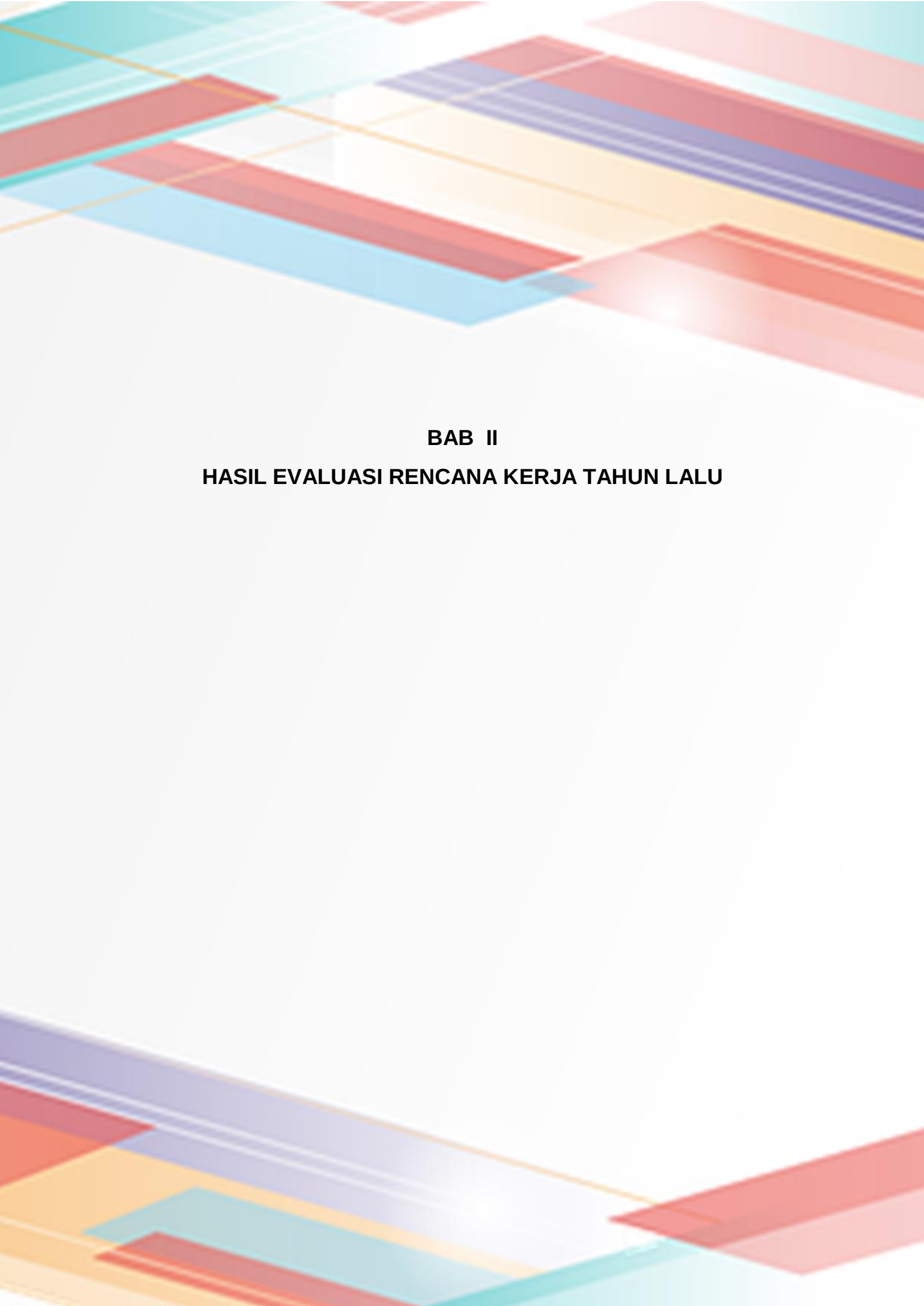
**BAB III TUJUAN DAN SASARAN DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN,
KOPERASI DAN USAHA MIKRO KABUPATEN SANGGAU**

- 3.1 Tujuan dan Sasaran Renja Tahun 2027.
- 3.2 Arah Kebijakan.

**BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS PERINDUSTRIAN,
PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO KABUPATEN
SANGGAU**

BAB V KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VI PENUTUP



BAB II

HASIL EVALUASI RENCANA KERJA TAHUN LALU



BAB II

HASIL EVALUASI RENCANA KERJA TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Capaian Kinerja Bidang Urusan

2.1.1 Tugas dan Fungsi SKPD

2.1.1.1 Umum

Sesuai Peraturan Bupati Sanggau Nomor 71 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan daerah di bidang Perindustrian, bidang Perdagangan dan bidang Koperasi dan Usaha Mikro yang dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang Perindustrian, bidang Perdagangan, bidang Koperasi dan Usaha Mikro serta tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.

Dalam penyelenggaraan tugas dimaksud Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro berfungsi :

- 1) Merumuskan kebijakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian, bidang perdagangan, bidang koperasi dan usaha mikro;
- 2) Pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian, bidang perdagangan, bidang koperasi dan usaha mikro;
- 3) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan atas penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang perindustrian, bidang perdagangan, bidang koperasi dan usaha mikro;
- 4) Pelaksanaan administrasi di lingkup Dinas; dan
- 5) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

2.1.1.2 Sekretariat

Sekretariat merupakan unsur pembantu pimpinan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas yang mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh Unit Organisasi di lingkungan Dinas yang membawahi 3 (tiga) subbagian yaitu :

- a. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- b. Subbagian Perencanaan dan Akuntabilitas Kinerja; dan



c. Subbagian Keuangan dan Aset.

Selanjutnya untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut di atas, sekretariat mempunyai fungsi :

- 1) Koordinasi penyusunan kebijakan, rencana, program, kegiatan, dan anggaran Dinas;
- 2) Koordinasi dan pelaksanaan kerja sama di lingkungan Dinas;
- 3) Koordinasi pengelolaan laporan kinerja dan keuangan di lingkungan dinas;
- 4) Koordinasi dan penyusunan bahan publikasi dan hubungan masyarakat dibidang perindustrian, perdagangan, koperasi dan usaha kecil dan menengah;
- 5) Koordinasi pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan dibidang perindustrian, perdagangan, koperasi dan usaha kecil dan menengah;
- 6) Penyusunan bahan rancangan peraturan perundang-undangan dan koordinasi bantuan hukum di lingkungan Dinas;
- 7) Pengelolaan kepegawaian di lingkungan Dinas;
- 8) Pengelolaan data dan informasi di lingkungan Dinas;
- 9) Pengelolaan barang milik daerah di lingkungan Dinas;
- 10) Pelaksanaan urusan organisasi dan tata laksana di lingkungan Dinas;
- 11) Pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan di lingkungan Dinas;
- 12) Pelaporan terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi, sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan pelayanan publik di lingkungan Dinas;
- 13) Pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan Dinas;
- 14) Pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas berkenaan dengan tugas dan fungsi dibidang kesekretariatan;
- 15) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan Dinas; dan
- 16) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2.1.1.3 Bidang Perindustrian

Bidang Perindustrian mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan dibidang pengembangan industri, pembinaan usaha industri, dan pendataan dan pelaporan informasi industri serta bertanggungjawab memimpin seluruh kegiatan pelayanan dan administrasi dibidang perindustrian.



Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, bidang perindustrian diberikan fungsi:

- 1) Perumusan kebijakan di bidang perindustrian meliputi pengembangan industri, pembinaan usaha industri, serta pendataan dan pelaporan informasi industri;
- 2) Pelaksanaan kebijakan dibidang perindustrian meliputi pengembangan industri, pembinaan usaha industri, serta pendataan dan pelaporan informasi industri;
- 3) Pelaksanaan pembinaan umum dan koordinasi dibidang perindustrian meliputi pengembangan industri, pembinaan usaha industri, serta pendataan dan pelaporan informasi industri;
- 4) Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan dibidang perindustrian meliputi pengembangan industri, pembinaan usaha industri, serta pendataan dan pelaporan informasi industri;
- 5) Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi dibidang perindustrian meliputi pengembangan industri, pembinaan usaha industri, serta pendataan dan pelaporan informasi industri;
- 6) Pelaksanaan administrasi bidang perindustrian; dan
- 7) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

2.1.1.4 Bidang Perdagangan

Sebagaimana bidang Perindustrian, bidang Perdagangan juga mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan dibidang pengembangan perizinan dan usaha perdagangan, metrologi dan perlindungan konsumen, dan pembinaan ekspor dan impor serta bertanggungjawab memimpin seluruh kegiatan pelayanan dan administrasi di bidang perdagangan.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut bidang Perdagangan mempunyai fungsi :

- 1) Perumusan kebijakan di bidang pengembangan perizinan dan usaha perdagangan, metrologi dan perlindungan konsumen, dan pembinaan ekspor dan impor;
- 2) Pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan perizinan dan usaha perdagangan, metrologi dan perlindungan konsumen, dan pembinaan ekspor dan impor;
- 3) Pelaksanaan pembinaan umum dan koordinasi di bidang pengembangan perizinan dan usaha perdagangan, metrologi dan perlindungan konsumen, dan pembinaan ekspor dan impor;



- 4) Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan perizinan dan usaha perdagangan, metrologi dan perlindungan konsumen, dan pembinaan ekspor dan impor;
- 5) Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengembangan perizinan dan usaha perdagangan, metrologi dan perlindungan konsumen, dan pembinaan ekspor dan impor;
- 6) Pelaksanaan administrasi bidang perdagangan; dan
- 7) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

2.1.1.5 Bidang Koperasi dan Usaha Mikro

Bidang Koperasi dan Usaha Mikro mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang kelembagaan, sumber daya manusia dan pengawasan koperasi, pengembangan usaha koperasi dan usaha mikro, dan permodalan dan simpan pinjam serta bertanggungjawab memimpin seluruh kegiatan pelayanan dan administrasi di bidang koperasi dan usaha mikro.

Dalam pelaksanaan tugas seperti tersebut di atas, Bidang Koperasi dan Usaha Mikro mempunyai fungsi :

- 1) Perumusan kebijakan di bidang kelembagaan, sumber daya manusia dan pengawasan koperasi, pengembangan usaha koperasi dan usaha mikro, dan permodalan dan simpan pinjam;
- 2) Pelaksanaan kebijakan di bidang kelembagaan, sumber daya manusia dan pengawasan koperasi, pengembangan usaha koperasi dan usaha mikro, dan permodalan dan simpan pinjam;
- 3) Pelaksanaan pembinaan umum dan koordinasi di bidang kelembagaan, sumber daya manusia dan pengawasan koperasi, pengembangan usaha koperasi dan usaha mikro, dan permodalan dan simpan pinjam;
- 4) Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang kelembagaan, sumber daya manusia dan pengawasan koperasi, pengembangan usaha koperasi dan usaha mikro, dan permodalan dan simpan pinjam;
- 5) Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang kelembagaan, sumber daya manusia dan pengawasan koperasi, pengembangan usaha koperasi dan usaha mikro, dan permodalan dan simpan pinjam;
- 6) Pelaksanaan administrasi bidang koperasi dan usaha mikro; dan
- 7) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.



2.1.1.6 Bidang Pasar

Sebagai salah satu bidang teknis yang juga dibawahhi oleh Kepala Dinas dimana bidang Pasar mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan sarana dan prasarana pasar, informasi pasar dan pembinaan pasar serta bertanggungjawab memimpin seluruh kegiatan pelayanan dan administrasi di bidang pasar. Selanjutnya dalam rangka melaksanakan tugas tersebut, bidang Pasar diberikan fungsi-fungsi sebagai berikut :

- 1) Perumusan kebijakan di bidang pengembangan sarana dan prasarana pasar, informasi pasar, dan pembinaan pasar;
- 2) Pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan sarana dan prasarana pasar, informasi pasar, dan pembinaan pasar;
- 3) Pelaksanaan pembinaan umum dan koordinasi di bidang pengembangan sarana dan prasarana pasar, informasi pasar, dan pembinaan pasar;
- 4) Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan sarana dan prasarana pasar, informasi pasar, dan pembinaan pasar;
- 5) Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengembangan sarana dan prasarana pasar, informasi pasar, dan pembinaan pasar;
- 6) Pelaksanaan administrasi bidang pasar; dan
- 7) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

2.1.1.7 UPTD Kemetrolagian

Selanjutnya untuk membantu operasional teknis tugas dan fungsi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro, terdapat Unit Pelaksana Teknis (UPT) Metrologi Legal Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sanggau ,yang dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Sanggau Nomor 48 Tahun 2018, dengan tugas sebagai berikut :

- Mengumpulkan, mengolah data dan informasi, menginventarisasi permasalahan dan melaksanakan pemecahan permasalahan yang berkaitan dengan metrologi;
- Menyenggarakan fasilitasi pelayanan tera bagi pelaku usaha;
- Melaksanakan pelayanan tera dan / tera ulang alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya;
- Melaksanakan fasilitasi penyelenggaraan kerjasama metrologi;
- Melaksanakan pembinaan operasional reparatir alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya;



- Melaksanakan penyuluhan dan pengamatan alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya, barang dalam keadaan terbungkus dan satuan sistem internasional;
- Melaksanakan pengawasan alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya, Barang Dalam Keadaan Terbungkus, dan Satuan Sistem Internasional;
- Melaksanakan pengelolaan standar ukuran dan instalasi uji;
- Melaksanakan pengujian alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya dalam rangka izin tipe dan izin tanda pabrik;
- Melaksanakan operasional terpadu penindakan pelanggaran dibidang metrologi;
- Melaksanakan pembinaan produsen dan importir alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya; dan
- Melaksanakan kajian rekomendasi izin dan/atau perpanjangan izin tipe dan tanda pabrik, serta izin reparatir alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya.

Adapaun UPT Metrologi Legal mempunyai fungsi pelayanan tera / tera ulang alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya, serta penyuluhan dan pengawasan kemetrologian.

2.1.2 Struktur Organisasi Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sanggau

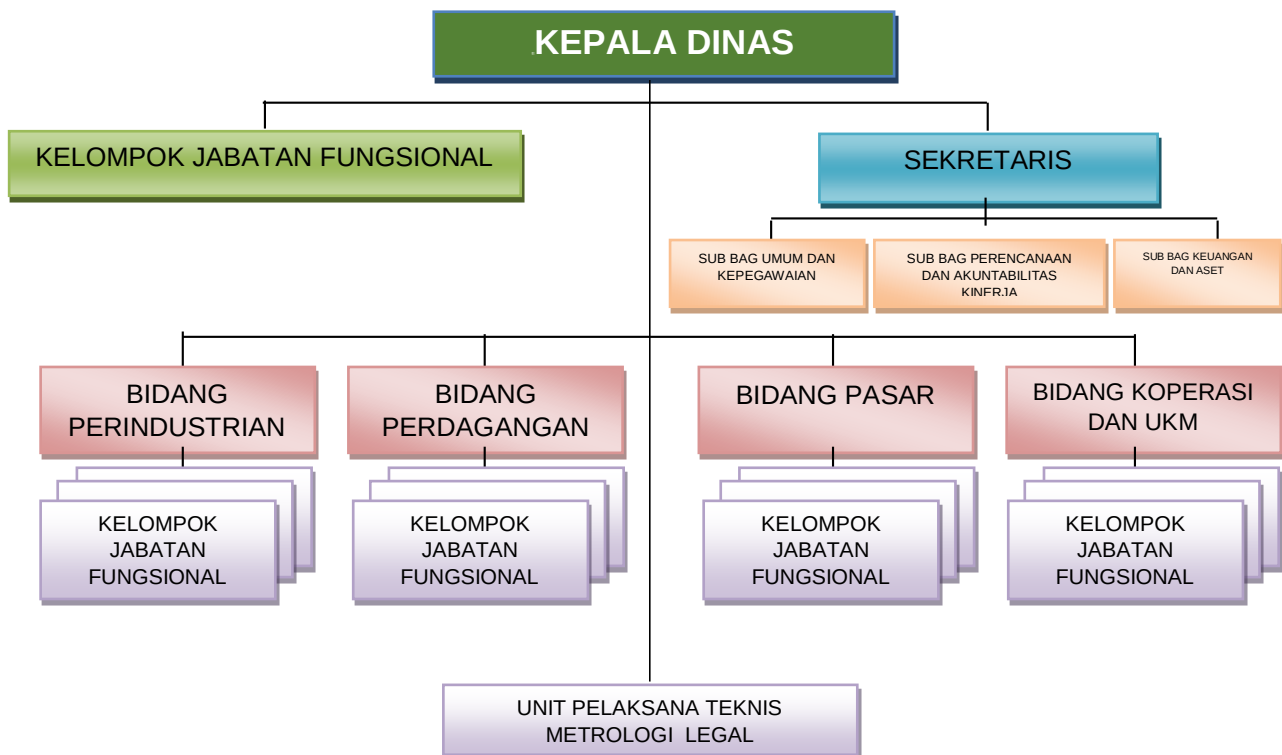
Sesuai dengan yang telah diatur dalam Peraturan Bupati Sanggau No. 71 Tahun 2021, tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro terdiri dari Kepala Dinas dibantu Sekretaris dan 4 (empat) Kepala Bidang, seperti berikut ini :

- a. Kepala;
- b. Sekretaris membawahi 3 (tiga) sub bagian, yaitu:
 - 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2) Sub Bagian Perencanaan dan Akuntabilitas Kinerja; dan
 - 3) Sub Bagian Keuangan dan Aset.
- c. Bidang Perindustrian membawahi jabatan pelaksana dan jabatan fungsional, yaitu:
 - 1) Kelompok Jabatan Fungsional
- d. Bidang Perdagangan membawahi jabatan pelaksana dan jabatan fungsional yaitu:

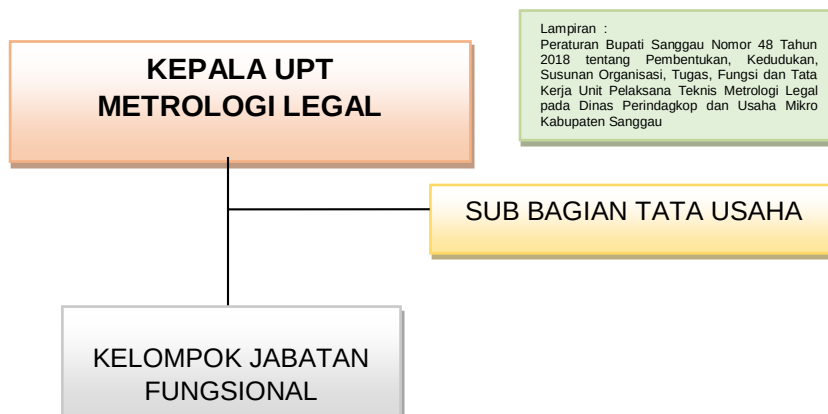


- 1) Kelompok Jabatan Fungsional.
 - e. Bidang Koperasi dan UM membawahi jabatan pelaksana dan jabatan fungsional, yaitu :
 - 1) Kelompok Jabatan Fungsional
 - f. Bidang Pasar membawahi jabatan pelaksana dan jabatan fungsional, yaitu :
 - 1) Kelompok Jabatan Fungsional.
 - g. Unit Pelaksana Teknis Metrologi Legal
 - h. Jabatan Fungsional Pengawas Koperasi
- Seperti pada tabel 2.1 dan 2.2 berikut ini

Tabel 2. 1 STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO, KABUPATEN SANGGAU



Tabel 2. 2 STRUKTUR ORGANISASI UPT METROLOGI LEGAL DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO KABUPATEN SANGGAU



2.1.3 Sumber Daya SKPD

Dengan berbagai keterbatasan yang dimiliki oleh Perangkat Daerah mulai dari sumberdaya, sarana, prasarana kerja serta anggaran belum banyak yang bisa dilaksanakan dan dicapai oleh Dinas Perindagkop dan UM. Adapun gambaran sumber daya Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sanggau sebagai berikut :

2.1.3.1 Kepegawaian

Pegawai merupakan unsur pelaksana program dan kegiatan yang dilaksanakan Perangkat Daerah. Kekuatan pegawai akan sangat berpengaruh terhadap kinerja dan pencapaian tujuan organisasi. Jumlah pegawai ASN Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sanggau sebanyak = 59 (Lima Puluh Sembilan) orang, yang terdiri golongan IV sebanyak = 5 orang, Golongan III = 27 orang, Golongan II = 1 orang. Golongan IX = 8 orang, Golongan V = 17 orang dan Golongan I = 1 orang. Selanjutnya bila dilihat dari tingkatan pendidikan adalah sebagai berikut : berpendidikan S2 sebanyak = 7 orang, S1 sebanyak = 28 orang, SMA / sederajat sebanyak = 21 Orang, SMP /sederajat sebanyak = 1 Orang sedangkan yang berpendidikan SD/sederajat sebanyak 2 Orang, Bila dilihat dari jumlah pegawai yang ada, dirasa sudah cukup, karena berbagai jabatan (khususnya) non struktural, seperti pengetik, pengumpul dan pengolah data telah diisi oleh pegawai yang ada. Jumlah pegawai ideal pada Dinas Perindagkop. dan Usaha Mikro berdasarkan analisis jabatan yang telah dilaksanakan sebelumnya adalah 69 (Enam Puluh Sembilan) orang. Namun demikian pimpinan terus berupaya untuk



memaksimalkan pegawai yang ada dengan cara memberikan tugas dan tanggung jawab yang jelas kepada semua pegawai yang ada. seperti pada tabel 2.3 berikut ini :

**Tabel 2. 3 DATA APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) DINAS PERINDUSTRIAN
PERDAGANGAN KOPERASI DAN USAHA MIKRO, KABUPATEN SANGGAU
TAHUN 2025**

No	Perangkat Daerah (SKPD)	Tingkat Pendidikan	Pangkat	Golongan	Jumlah
1	Disperindagkop dan Usaha Mikro Kabupaten Sanggau	S 2	Pembina Utama Muda	IV / c	1
			Pembina Tk.I	IV / b	1
			Pembina	IV / a	1
			Penata Tk. I	III / d	3
			Penata	III / c	1
		S 1	Pembina	IV / a	2
			Penata Tk. I	III / d	3
			Penata	III / c	6
			Penata Muda Tk.I	III / b	3
			Penata Muda	III / a	6
				IX	8
		SLTA	Penata Muda Tk. I	III / b	3
			Penata Muda	III / a	2
				V	16
		SLTP		V	1
		SD	Pengatur Muda	II / a	1
		SD		I	1
Jumlah					59

2.1.3.2 Keuangan / Anggaran

Anggaran merupakan salah satu faktor penting dalam rangka pencapaian Visi dan Misi suatu organisasi karena strategi yang telah ditetapkan tidak akan bisa terlaksana dengan baik dan utuh tanpa didukung anggaran yang cukup dan memadai. Saat ini karena keterbatasan anggaran daerah, anggaran yang tersedia untuk operasional kegiatan di Dinas Perindagkop. dan Usaha Mikro juga masih dinilai terbatas, sehingga pimpinan membuat kebijakan dengan menginventarisir dan menseleksi seluruh program dan kegiatan sekretariat dan



masing-masing bidang yang benar-benar mutlak dan sangat prioritas dalam rangka mendukung tujuan organisasi. Sebagai gambaran dalam 3 (tiga) tahun terakhir anggaran belanja langsung Dinas Perindagkop dan Usaha Mikro, dinilai belum memadai bila dikaitkan dengan tugas pokok dan fungsi organisasi serta program-program yang telah ditetapkan, secara global anggaran belanja 3 (tiga) tahun terakhir adalah sebagai berikut

- a. Tahun 2023 sebesar Rp. 10.619.420.170,00
- b. Tahun 2024 sebesar Rp. 10.063.527.421,52
- c. Tahun 2025 sebesar Rp. 11.683.878.200,14

seperti pada tabel 2.4 berikut ini :



Tabel 2. 4 ANGGARAN DAN REALISASI DAN ANGGARAN, DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO KABUPATEN SANGGAU

Uraian	Anggaran Pada Tahun			Realisasi Anggaran Pada Tahun			Persentase		
	2023	2024	2025	2023	2024	2025	2023	2024	2025
BELANJA DAERAH									
BELANJA OPERASI	10.265.099.910	9.845.818.678	10.306.767.500	9.518.855.081	9.144.307.775	9.325.804.286	92, 73	92,87	90,48
Belanja Pegawai	3.955.683.653	4.046.138.027	4.797.987.488,98	3.428.337.264	3.630.220.575	4.217.290.530	86,67	89,72	87,90
Belanja Barang dan Jasa	6.309.416.257	4.409.680.651	5.508.780.073,02	6.090.517.817	4.124.037.201	5.108.513.756	96,53	93,52	90,76
Belanja Subsidi	-	1.390.000.000	-	-	1.390.000.000	-	-	100,00	-
BELANJA MODAL	354.320.260	217.708.743,52	1.377.110.636,16	353.368.173,97	214.911.960	1.232.802.414	99,73	98,71	89,52
Belanja Peralatan dan Mesin dan Home Use	354.320.260	19.092.000	43.811.700	353.368.173,97	17.000.000	1.232.802.414	99,73	89,04	89,52
Belanja Modal Gedung dan bangunan,	-	198.616.743,52	1.333.298.938,16	-	197.911.960	-	-	99,64	-
Jumlah Belanja	10.619.420.170	10.063.527.421,52	11.683.878.200,14	9.872.223.254,97	9.359.169.736	10.558.606.700	92,96	93,00	89,45

2.1.3.3 Sarana dan prasarana kerja

Dalam rangka mendukung kinerja aparatur, keberadaan sarana dan prasarana kerja yang memadai sangat dibutuhkan. Secara umum keberadaan sarana dan prasarana kerja belum dapat dikatakan memadai.

Beberapa sarana dan prasarana kerja masih dirasa kurang dan dalam kondisi yang kurang baik, seperti : kendaraan operasional roda dua, komputer, Selain itu belum tersedianya bangunan untuk penyimpanan peralatan Metrologi dan masih menggunakan bangunan yang ada. Kondisi beberapa sarana atau inventaris penunjang kerja yang sangat berpengaruh pada pelayanan dan pelaksanaan administrasi seperti pada tabel 2.5 dan tabel 2.6, berikut ini :

Tabel 2. 5 KONDISI BEBERAPA SARANA ATAU INVENTARIS PENUNJANG KERJA PADA DINAS PERINDAGKOP DAN USAHA MIKRO KAB. SANGGAU TAHUN 2025

No.	Nama Inventaris	Tahun Pengadaan	Jumlah (Unit)	Kondisi	Ket
1.	Kendaraan Roda 4	2014	1	Baik	
		2016	1	Rusak Berat	
		2018	1	Baik	
2.	Kendaraan Roda 2	< 2002	14	Rusak Berat	Diusulkan Lelang
		2003-2009	5	Kurang Baik	
		2012	2	Baik	
		2013	8	Baik	
		2014	1	Baik	
		2016	5	Baik	
		2017	1	Baik	
3.	Komputer	2006	2	Kurang Baik	Usulan penghapusan
		2008	1	Baik	
		2009	1	Baik	
		2012	4	Baik	
		2013	8	Baik	
		2017	2	Baik	
4.	Laptop	< 2009	9	Kurang Baik	
		2010	1	Kurang Baik	
		2011	1	Kurang Baik	
		2013	2	Kurang Baik	
		2014	10	Kurang Baik	
		2015	2	Baik	
		2016	2	Baik	
		2017	5	Baik	
		2019	2	Baik	
		2022	3	Baik	
		2023	1	Baik	



		2025	2	Baik	
5.	Mesin Ketik	2002-2005	2	Kurang Baik	
		2006	2	Baik	
		2009	1	Baik	
6.	Printer	2007-2009	9	Kurang Baik	
		2010	4	Baik	
		2011	1	Baik	
		2012	9	Baik	
		2013	5	Baik	
		2014-2015	7	Baik	
		2016	1	Baik	
		2017	2	Baik	
		2020	2	Baik	
		2025	3	Baik	
7.	Kamera Digital	< 2008	4	Rusak Berat	
		2014	1	Rusak Berat	
		2016	1	Kurang Baik	
8.	Handycamp	2014	1	Rusak Berat	



**Tabel 2. 6 ASET YANG DIMILIKI DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN,
KOPERASI DAN USAHA MIKRO KABUPATEN SANGGAU TAHUN 2025**

No	Gol	Kode Bidang Barang	Nama Bidang Barang	Jumlah Barang	Jumlah Harga
1	01	01	TANAH	17	4.957.666.022,90
2	02		PERALATAN DAN MESIN	510	4.522.207.478,11
		01	Alat Besar	-	0,00
		02	Alat Angkut	32	1.470.616.816,99
		03	Alat Bengkel dan Alat Ukur	75	77.751.338,00
		04	Alat Pertanian / Peternakan	1	620.216.192,00
		05	Alat Kantor dan Rumah Tangga	275	884.971.723,02
		06	Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar	34	90.909.697,01
		07	Alat Kedokteran dan Kesehatan	3	6.684.149,00
		08	Alat Laboratorium	10	740.890.167,00
		09	Alat Persenjataan	-	0,00
		10	Komputer	80	630.167.395,09
3	03		GEDUNG DAN BANGUNAN	32	32.423.392.603,01
		01	Bangunan Gedung	32	32.423.392.603,01
4	04		JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN	4	93.379.003,27
		03	Instalasi	4	93.379.003,27
5	05		ASET TETAP LAINNYA		0,00
6	06		KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan	-	0,00
			Jumlah Aset Tetap Nilai Perolehan	-	41.996.645.106,85
			Akumulasi Penyusutan	-	(20.956.488.922,80)
			Jumlah Aset Tetap Nilai Buku		21.040.156.184,05
7	07		ASET LAINNYA	1	173.000.000,00
		01	Aset Tak Berwujud	-	0,00
		02	Aset Lain-lain	1	173.000.000,00
		03	Amortisasi	-	(0,00)
		04	Penyusutan Aset Lain-lain	-	(137.000.000,00)
TOTAL				566	21.040.156.184,05



2.1.4 Kinerja Pelayanan SKPD

Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Perindagkop dan Usaha Mikro merupakan salah satu SKPD yang mempunyai tugas pembinaan dan pelayanan kepada masyarakat, khususnya para pelaku bisnis yang bergerak di berbagai sektor usaha, seperti perdagangan, industri, jasa dan aneka usaha yang umumnya masih berskala usaha mikro. Disamping itu juga pelayanan dan pemberdayaan terhadap koperasi yang merupakan kumpulan orang dan badan usaha.

Dengan berbagai keterbatasan yang dimiliki Perangkat Daerah dalam meningkatkan kinerja pelayanan Perangkat Daerah telah banyak yang bisa dilaksanakan dan dicapai oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sanggau. Adapun gambaran beberapa capaian hasil pembinaan dan pelayanan tersebut sebagai berikut :

2.1.4.1 Bidang Perindustrian

Sektor industri merupakan salah satu sektor penting yang dapat memberikan kontribusi terhadap penyerapan tenaga kerja, peningkatan pendapatan masyarakat serta peningkatan perekonomian daerah. Pembinaan terhadap sektor industri di Kabupaten Sanggau diarahkan pada industri kecil/rumah tangga, dan industri menengah. Sesuai dukungan anggaran yang tersedia beberapa program pengembangan industri di Kabupaten Sanggau telah dilaksanakan, dan akan terus dilanjutkan, seiring dengan program-program terobosan baru baik melalui APBD maupun APBN (tugas pembantuan) seperti : program pengembangan industri kecil dan menengah akan tetap difokuskan pada : Pendataan industri kecil dan menengah (IKM), Pembinaan industri kecil dan menengah (IKM), serta promosi produk industri Kabupaten Sanggau

Bila dilihat dari jumlah usaha industri di Kabupaten Sanggau per 30 September 2025 terdapat 1351 industri kecil formal, 439 industri kecil non formal, dan 92 industri Menengah, dengan berbagai jenis usaha seperti kerajinan, makanan dan minuman, meubel, pandai besi, industri olahan hasil pertanian dan perkebunan, dan lain-lain yang keseluruhannya merupakan industri potensial dan memberikan nilai tambah serta penyerapan tenaga kerja.

Proses produksi industri di Kabupaten Sanggau secara umum masih dilakukan secara sederhana, meskipun demikian banyak hasil-hasil produksi olahan yang telah dilakukan secara semi mekanis dan mekanis dan memiliki nilai jual yang tinggi. Data



perkembangan industri kecil, dan menengah dalam 3 (tiga) tahun terakhir, seperti pada table 2.7, tabel 2.8 dan tabel 2.9 berikut ini :

**Tabel 2. 7 REKAPITULASI PERKEMBANGAN INDUSTRI KECIL FORMAL
KABUPATEN SANGGAU**

No.	Kecamatan	Tahun		
		2023	2024	2025
1	BALAI	38	44	45
2	BEDUAI	7	11	12
3	BONTI	16	18	22
4	ENTIKONG	35	36	37
5	JANGKANG	15	22	24
6	KAPUAS	400	483	510
7	KEMBAYAN	102	123	125
8	MELIAU	100	109	113
9	MUKOK	33	37	42
10	NOYAN	8	9	9
11	PARINDU	89	100	105
12	SEKAYAM	90	102	105
13	TAYAN HILIR	90	105	108
14	TAYAN HULU	48	54	59
15	TOBA	20	29	35
Jumlah		1091	1282	1351

Sumber Data Directory Industri Kecil Menengah Kabupaten Sanggau Per Desember 2025



**Tabel 2. 8 REKAPITULASI PERKEMBANGAN INDUSTRI KECIL NON FORMAL
KABUPATEN SANGGAU**

No.	Kecamatan	Tahun		
		2023	2024	2025
1	BALAI	10	10	10
2	BEDUAI	7	7	7
3	BONTI	14	15	15
4	ENTIKONG	7	8	8
5	JANGKANG	7	7	7
6	KAPUAS	137	134	134
7	KEMBAYAN	54	53	53
8	MELIAU	13	13	13
9	MUKOK	19	18	24
10	NOYAN	9	9	9
11	PARINDU	47	48	49
12	SEKAYAM	21	21	26
13	TAYAN HILIR	49	49	49
14	TAYAN HULU	19	19	19
15	TOBA	16	16	16
Jumlah		429	425	439

Sumber Data : Directory Industri Kecil Menengah Kabupaten Sanggau Desember 2025



**Tabel 2. 9 REKAPITULASI PERKEMBANGAN INDUSTRI MENENGAH
KABUPATEN SANGGAU**

No.	Kecamatan	Tahun		
		2023	2024	2025
1	BALAI	2	2	2
2	BEDUAI	1	1	1
3	BONTI	1	1	1
4	ENTIKONG	1	1	1
5	JANGKANG	1	1	1
6	KAPUAS	25	30	35
7	KEMBAYAN	3	5	5
8	MELIAU	1	3	4
9	MUKOK	2	2	2
10	NOYAN	-	-	-
11	PARINDU	5	5	6
12	SEKAYAM	8	9	9
13	TAYAN HILIR	11	15	19
14	TAYAN HULU	4	5	5
15	TOBA	1	1	1
Jumlah		66	81	92

Sumber Data Directory Industri Kecil Menengah Kabupaten Sanggau Desember 2025

2.1.4.2 Bidang Perdagangan

Bidang Perdagangan merupakan sektor yang banyak berperan dalam rangka kelancaran pendistribusian barang dari produsen kepada konsumen termasuk arus barang dari dan ke luar negeri (ekspor dan impor). Melalui arus perdagangan juga diharapkan dapat menjaga kestabilan ketersediaan kebutuhan pokok masyarakat, melalui peran pedagang-pedagang kecil, menengah dan pedagang besar.

a. Perdagangan

Sesuai dengan kondisi saat ini jumlah usaha perdagangan di Kabupaten Sanggau berjumlah 1.652 buah yang tersebar diseluruh Kecamatan dan desa-desa 15 Kecamatan seperti pada tabel 2.10.



Berdasarkan data yang berada di tiap kecamatan, jumlah Toko Tradisional / Perdagangan Eceran sebanyak 319, Pasar Tradisional sebanyak 25 unit, Pasar Modern / Swalayan sebanyak 19 unit.

Seperti pada tabel 2.11

1. Permasalahan yang dihadapi dalam pembinaan terhadap pelaku usaha perdagangan diantaranya :
 - a. Kurangnya kesadaran pelaku usaha dalam melaksanakan legalitas usahanya
 - b. Faktor geografis letak usaha yang tersebar dipelosok desa.
 - c. Kurangnya Sosialisasi implementasi kebijakan dari instansi terkait terhadap pelaku usaha.
 - d. Kurang sumber Daya manusia dalam mensosialisasikan kebijakan Pemerintah.
2. Upaya pemecahan permasalahan adalah sebagai berikut :
 - a. Meningkatkan kesadaran masyarakat sebagai pelaku usaha agar melegalkan usaha yang dikelola dengan melengkapi perizinannya sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
 - b. Perlu adanya petugas khusus yang menangani perizinan jemput bola dalam melayani perizinan.
 - c. Diminta kepada Aparat Kecamatan / instansi terkait agar terus melaksanakan pembinaan/sosialisasi kebijakan terhadap legalitas usaha perdagangan.
 - d. Meningkatkan kemampuan Sumber Daya yang dengan mengikut sertakan bimtek Usaha perdagangan



**Tabel 2. 10 DATA PELAKU USAHA SEKTOR PERDAGANGAN
KABUPATEN SANGGAU TAHUN 2025**

No.	Kecamatan	Jumlah
1	BALAI	53
2	BEDUAI	23
3	BONTI	36
4	ENTIKONG	66
5	JANGKANG	63
6	KAPUAS	643
7	KEMBAYAN	61
8	MELIAU	170
9	MUKOK	57
10	NOYAN	13
11	PARINDU	106
12	SEKAYAM	92
13	TAYAN HULU	89
14	TAYAN HILIR	112
15	TOBA	68
Jumlah		1652

**Tabel 2. 11 DATA SARANA PERDAGANGAN MENURUT JENISNYA
KABUPATEN SANGGAU TAHUN 2025**

No.	Jenis	Jumlah
1.	Pasar Tradisional	25
2.	Pasar Modern / Swalayan	22
3.	Toko Tradisional / Perdagangan Eceran	319

b. Ekspor impor

Sebagai daerah perbatasan yang telah memiliki PPLB (Pos Perdagangan Lintas Batas), maka keberadaan Kabupaten Sanggau dinilai sangat strategis untuk kegiatan ekspor import. Berkaitan dengan itu, telah dikeluarkan Permen Perdagangan No. 56/M-DAG/ PER/12/2008 yang mengatur tentang import produk tertentu yang hanya diperbolehkan masuk lewat/melalui 5 (lima) pelabuhan laut dan bandara internasional yaitu : pelabuhan Tanjung Priok, Tanjung Emas, Tanjung

Perak, Belawan dan pelabuhan Makasar serta bandara Soekarno-Hatta (Banten), Juanda (Surabaya), Akhmad Yani (Semarang), Polonia (Medan) dan bandara Sultan Hasanudin (Makasar).

Dengan dikeluarkannya Permendag ini sangat menyulitkan para pedagang-pedagang ekspor impor yang berada di perbatasan, karena barang-barang yang biasa mereka perdagangan dilarang masuk, namun ternyata kondisi ini tidak berlaku untuk kegiatan keluar masuk barang di PPLB Entikong, karena telah memiliki dasar hukum tersendiri yaitu *Border Trade Agreement* yang dibuat oleh pihak Indonesia-Malaysia pada tahun 1970 yang memperbolehkan masyarakat perbatasan untuk berbelanja tidak lebih dari RM 600 per bulan.

Seperti pada tabel 2.12

Tabel 2. 12 DATA POTENSI EKSPOR KABUPATEN SANGGAU TAHUN 2025

NO	KECAMATAN	REALISASI EKSPOR	PRODUK POTENSI EKSPOR
1.	KAPUAS	13.489.095,59 (US \$)	Produk Olahan Hasil Hutan
2.	BALAI	NIHIL	NIHIL
3.	TAYAN HILIR	NIHIL	NIHIL
4.	TAYAN HULU	NIHIL	NIHIL
5.	MELIAU	NIHIL	NIHIL
6.	KEMBAYAN	NIHIL	Produk Pertanian seperti : Durian, Pisang, Jagung, Cabe dan Olahan Gula Aren
7.	ENTIKONG	Jasa Fasilitas Ekspor oleh Bumdes Desa Entikong	Produk Pertanian seperti : Durian, Terong, Semangka, Sahang
8.	SEKAYAM	NIHIL	Produk Pertanian seperti : Pisang, Durian, Jagung, Sahang

c. Perusahaan Aktif Pemilik API UP

Untuk tertib administrasi dan penegakan aturan dari implementasi Permendag Nomor 27/M-DAG/PER/5/2012 yaitu penerapan sanksi antara lain :

- API dibekukan apabila tidak melaksanakan Pendaftaran ulang dan tidak melaksanakan kewajiban melaporkan realisasi import dan perubahan data API
- API dicabut apabila tidak melaksanakan kewajiban pelaporan realisasi import atau tidak melaksanakan pelaporan perubahan data paling lama 30 Hari sejak tanggal pembekuan.
- Menyampaikan informasi atau data yang tidak valid dalam dokumen
- Tidak bertanggungjawab terhadap barang yang diimport.
- Melanggar ketentuan Perundang-undangan yang berlaku di Bidang Impor.

d. Kemetrolagian

Dalam rangka pelaksanaan Undang-undang RI Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal (UUML), dan Keputusan Menteri Perdagangan RI Nomor : 66/M-DAG/PER/11/2013 tanggal 13 Nopember 2013 tentang Tanda Tera Tahun 2015. dari data yang ada *seperti pada tabel 2.13* masih banyak alat ukur timbang dan perlengkapannya (UTTP) yang belum mengikuti pelayanan tera ulang dikarenakan:

1. Pemilik UTTP belum memahami pentingnya ikut pelayann tera-tera ulang
2. Letak geografis yang jauh dari tempat pelayanan tera-tera ulang
3. Sumber daya manusia dari Unit kemetrolagian yang kurang sehingga tidak semua kecamatan dapat dijangkau
4. Dana dari penyelenggara teta-tera ulang yang terbatas

Dari hasil keterangan diatas Berdasarkan Peraturan Bupati Sanggau Nomor 48 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Metrologi Legal Pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sanggau sudah dapat melaksanakan Kegiatan pelayanan tera, tera ulang dan pengawasan metrologi, tujuan utamanya untuk menjamin kepastian hukum dalam hal kebenaran hasil pengukuran dan juga melindungi konsumen atau kepentingan umum.

Sesuai UU No. 23 tahun 2015 Halaman 140 Sub Urusan Standarlisasi dan Perhitungan Konsumen, Pelaksanaan Metrologi Legal berupa tera ulang dan pengawasan kemetrolagian dilakukan oleh daerah Kabupaten / Kota. Serah terima Personal, Pendanaan, Sarana dan Prasarana serta Dokumen (P3D) dari Daerah Provinsi ke Daerah Kabupaten / Kota dilakukan paling lama 2 (dua) Tahun sejak UU ini diberlakukan. Dengan demikian, batas waktu serah terima tersebut adalah bulan Oktober 2016 dan setelah itu Daerah Kabupaten / Kota wajib memberikan pelayanan tera, tera ulang UTTP dan melakukan pengawasan UTTP, BDKT serta satuan SI.

Tabel 2. 13 DATA ALAT UKUR TAKAR TIMBANG DAN PERLENGKAPANNYA (UTTP) KABUPATEN SANGGAU TAHUN 2025

No.	UTTP yang ditera/tera ulang	UTTP		
		Yang Ditera/Tera Ulang	Belum Ditera/Tera Ulang	Jumlah UTTP
1	Dispenser	151	22	173
2	Tangki BBM	-	87	87
6	Timbangan Jembatan	27	73	100
7	Timbangan Pasar	44	1432	1476
Jumlah		222	1614	1836

Sumber data : Bidang Perdagangan Desember 2025

2.1.4.1 Bidang Koperasi dan Usaha Mikro

a. Koperasi

Koperasi sebagai salah satu badan usaha maupun gerakan ekonomi rakyat memiliki peran yang sangat penting dan strategis dalam kegiatan pembangunan ekonomi. Melalui kegiatan usahanya koperasi memberikan pelayanan kepada anggota maupun masyarakat sebagai bagian kontribusinya dalam pembangunan ekonomi.

Sebagai salah satu lembaga keuangan ekonomi masyarakat di Kabupaten Sanggau, lembaga koperasi mempunyai kontribusi yang cukup signifikan dalam meningkatkan kesejahteraan anggotanya. Sampai akhir tahun 2025 jumlah koperasi di Kabupaten Sanggau tercatat sebanyak 528 koperasi.

Ada dua catatan penting tahun 2014 berkenaan aturan perkoperasian. Pertama UU nomor 17 tahun 2012 tentang perkoperasian telah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi melalui uji materi pada tanggal 28 Mei 2014. Kedua, melalui UU nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, kewenangan dalam Pengesahan Akte Pendirian, Perubahan Anggaran Dasar Dan Pembubaran Koperasi serta pengumuman pada Berita Negara menjadi urusan Pemerintah Pusat.

Dari 495 unit Koperasi, tidak semuanya termasuk kategori koperasi aktif. Koperasi tidak aktif tercatat ada 166 unit dan ada 694 unit Koperasi aktif. Dari 528 unit Koperasi aktif tersebut, yang melaksanakan RAT Tahun Buku 2025 ada 80 unit Koperasi. Penyebaran koperasi berdasarkan kecamatan , seperti pada tabel 2.14 tabel 2.15 dan tabel 2.16



**Tabel 2. 14 DATA SEBARAN KOPERASI BERDASARKAN KECAMATAN
TAHUN 2025**

No.	Kecamatan	Total Koperasi	Koperasi Aktif	Koperasi Tidak Aktif	Melaksanakan RAT
1	Kapuas	178	111	67	29
2	Parindu	52	43	9	8
3	Mukok	38	32	6	3
4	Jangkang	25	16	9	0
5	Bonti	21	17	4	2
6	Meliau	74	63	11	11
7	Tayan Hulu	67	54	13	10
8	Balai	24	19	5	1
9	Tayan Hilir	59	52	7	5
10	Toba	26	22	4	4
11	Kembayan	43	36	7	3
12	Beduwai	13	10	3	0
13	Noyan	12	9	3	2
14	Sekayam	49	35	14	1
15	Entikong	13	9	4	1
Jumlah		694	528	166	80

Sumber data Keragaan Koperasi Per Desember 2025



**Tabel 2. 15 KOPERASI MENURUT JENIS KOPERASI KABUPATEN SANGGAU
TAHUN 2025**

No.	Kecamatan	Jenis Usaha				
		PRODUS EN	KONSUM EN	PEMASA RAN	JASA	SIMPAN PINJAM
1	Kapuas	45	86	4	9	8
2	Parindu	30	6	0	2	0
3	Mukok	22	5	0	1	1
4	Jangkang	5	6	1	2	0
5	Bonti	8	1	0	2	1
6	Meliau	38	14	0	2	1
7	Tayan Hulu	38	12	4	1	0
8	Balai	9	1	0	1	1
9	Tayan Hilir	25	15	0	2	0
10	Toba	9	7	1	1	1
11	Kembayan	18	12	1	1	0
12	Beduawai	5	1	0	1	0
13	Noyan	4	2	0	1	0
14	Sekayam	15	21	0	1	2
15	Entikong	2	6	0	0	0
Jumlah		273	195	11	27	15

Sumber data Keragaan Koperasi Per Desember 2025



Tabel 2. 16 DATA KOPERASI KABUPATEN SANGGAU TAHUN 2025

No.	Uraian	Tahun		
		2023	2024	2025
1	Jumlah Koperasi	481	495	649
2	Koperasi Aktif	315	329	528
3	Koperasi Tidak Aktif	166	166	166
4	Telah RAT	85	92	80
5	Jumlah Anggota	42.478	42.335	41.524
6	Modal Sendiri	122.580.397.909	204.029.643.328	216.173.601.701
7	Modal Luar	207.115.595.043	379.409.938.366	392.742.347.424
8	Volume Usaha	133.373.883.288	696.830.437.155	1.738.958.512.333
9	SHU	32.562.608.524	29.747.220.773	57.609.143.835
10	Aset	329.695.992.952	584.300.602.904	635.268.534.663
11	Karyawan	292	278	316
12	Manager	5	4	4

Sumber data Keragaan Koperasi Per Desember 2025

b. Usaha Mikro (UM)

Jika kita lihat UMKM di Kabupaten Sanggau, cukup banyak jumlahnya sampai dengan akhir tahun 2025 mencapai 4.356 unit usaha sampai dengan Desember 2025 total asset atau kekayaan bersih UM mencapai Rp.111.565.274.250,-. Dengan total omset atau hasil penjualan tahunan mencapai Rp.750.750.615.000,-. Untuk lebih rinci, Usaha Mikro (UM) untuk di Kabupaten Sanggau dapat kita lihat pada tabel 2.17, tabel 2.18 dan tabel 2.19

Dari tabel 2,17, Usaha Mikro yang ada di Kabupaten Sanggau sampai dengan akhir tahun 2025 berjumlah 4.040 unit usaha, dengan karyawan sebanyak 961 orang, tenaga kerja yang terserap sebanyak 3.080 orang, dengan total omset Rp. 72.565.615.000,- dan total asset sebanyak Rp. 105.207.274.250,- Pada tabel 2.18, Usaha Kecil yang ada di Kabupaten Sanggau sampai dengan akhir tahun 2025 berjumlah 237 unit usaha dengan total omset Rp. 660.725.000.000,- dan total asset sebanyak Rp 3.850.000.000,-

Jika kita lihat pada tabel 2.19 berikut ini, Usaha Menengah yang ada di Kabupaten Sanggau sampai dengan akhir tahun 2025 berjumlah 43 unit usaha, tenaga kerja yang terserap sebanyak 1 orang dengan total omset Rp. 1.746.000.000,- dan total asset sebanyak Rp. 2.508.000.000,-



**Tabel 2. 17 REKAPITULASI DATA USAHA MIKRO KABUPATEN SANGGAU
TAHUN 2025**

No.	Kecamatan	Jumlah Unit Usaha	Jumlah Karyawan		Jumlah Tenaga Kerja		Jumlah Omzet (Rp.000)	Jumlah Aset (Rp.000)
			L	P	L	P		
1	Kapuas	1082	88	197	285	318	2.604.590.00	1.733.159.250
2	Parindu	284	35	63	98	199	6.852.580.00	28.678.150.00
3	Mukok	204	4	38	42	62	410.460.000	446.980.000
4	Jangkang	408	3	5	24	33	9.843.950.00	17.442.610.00
5	Bonti	66	5	33	15	44	104.750.000	151.450.000
6	Meliau	200	10	16	98	68	9.440.000.00	7.870.100.000
7	Tayan Hulu	63	5	6	15	32	735.800.000	415.600.000
8	Tayan Hilir	216	3	35	17	47	1.077.500.00	1.638.800.000
9	Toba	21	27	19	28	19	1.739.000.00	786.000.000
10	Balai	88	2	-	16	18	3.273.260.00	8.288.000.000
11	Kembayan	90	2	8	37	42	347.750.000	72.500.000
12	Beduai	200	157	112	212	174	11.131.900.00	4.402.600.000
13	Sekayam	486	8	35	239	203	16.733.500.00	23.347.500.00
14	Noyan	244	2	3	14	8	1.874.925.00	7.318.235.000
15	Entikong	388	16	34	98	147	6.395.650.00	2.615.500.000
Jumlah		4040	367	594	1392	1688	72.565.615.00	105.207.274.250

Sumber data Keragaan Koperasi Per Desember 2025



**Tabel 2. 18 REKAPITULASI DATA USAHA KECIL KABUPATEN SANGGAU
TAHUN 2025**

No.	Kecamatan	Jumlah Unit Usaha	Jumlah Karyawan		Jumlah Tenaga Kerja		Jumlah Omzet (Rp.)	Jumlah Aset (Rp.)
			L	P	L	P		
1	Kapuas	105	-	-	-	-	262.500.000.00	-
2	Parindu	25	-	-	-	-	62.500.000.00	-
3	Mukok	4	-	-	-	-	10.000.000.00	-
4	Jangkang	2	-	-	-	-	5.000.000.000	-
5	Bonti	1	-	-	-	-	2.500.000.000	-
6	Meliau	8	-	-	-	-	20.000.000.00	-
7	Tayan Hulu	38	-	-	-	-	95.000.000.00	-
8	Tayan Hilir	19	-	-	-	-	4.750.000.000	-
9	Toba	-	-	-	-	-	-	-
10	Balai	14	-	-	-	-	35.000.000.00	-
11	Kembayan	13	-	-	-	-	32.500.000.00	-
12	Beduai	3	-	-	-	-	5.750.000.000	300.000.000
13	Sekayam	32	-	-	-	-	62.150.000.00	3.450.000.00
14	Noyan	-	-	-	-	-	-	-
15	Entikong	9	-	-	-	-	20.325.000.00	100.000.000
Jumlah		273	-	-	-	-	660.725.000.00	3.850.000.00

Sumber data Keragaan Koperasi Per Desember 2025



**Tabel 2. 19 REKAPITULASI DATA USAHA MENENGAH
KABUPATEN SANGGAU TAHUN 2025**

No.	Kecamatan	Jumlah Unit Usaha	Jumlah Karyawan		Jumlah Tenaga Kerja		Jumlah Omzet (Rp.)	Jumlah Aset (Rp.)
			L	P	L	P		
1	Kapuas	12	-	-	-	-	319.500.000.00	2.500.000.00
2	Parindu	4	-	-	-	-	200.000.000.00	-
3	Mukok	5	-	-	-	-	207.500.000.00	-
4	Jangkang	-	-	-	-	-	-	-
5	Bonti	1	-	-	-	-	6.500.000.000	-
6	Meliau	5	-	-	-	1	212.500.000.00	8.000.000
7	Tayan Hulu	4	-	-	-	-	200.000.000.00	-
8	Tayan Hilir	6	-	-	-	-	300.000.000.00	-
9	Toba	-	-	-	-	-	-	-
10	Balai	-	-	-	-	-	-	-
11	Kembayan	2	-	-	-	-	100.000.000.00	-
12	Beduai	-	-	-	-	-	-	-
13	Sekayam	3	-	-	-	-	150.000.000.00	-
14	Noyan	-	-	-	-	-	-	-
15	Entikong	1	-	-	-	-	50.000.000.00	-
Jumlah		43	-	-	-	1	1.746.000.000	2.508.000.00 0

Sumber data Keragaan Koperasi Per Desember 2025



2.1.4.4 Bidang Pasar

Bidang pasar merupakan unsur pembantu Kepala Dinas untuk urusan Pasar dengan titik PAD Sarana dan Prasarana Pasar serta Monitoring Informasi Harga kebutuhan pokok masyarakat dan Operasi Pasar.

Sedangkan pembangunan / rehab pasar saat ini baru dapat dilakukan di beberapa kecamatan dengan jumlah pasar yang telah direhabilitasi / dibangun diantaranya Penataan Bangunan Pasar Jarai Kecamatan Kapuas, Penataan Bangunan Pasar Kembayan Kecamatan Kembayan dan Penataan Bangunan Pasar Meliau Kecamatan Meliau dengan mempergunakan Dana Alokasi Umum (DAU) Tahun Anggaran 2025. sedangkan untuk lima tahun mendatang program ini akan tetap dilanjutkan terutama di kecamatan-kecamatan yang belum mendapat program dimaksud, baik melalui dana APBD maupun APBN..

Data Base Fasilitas Pasar keadaan sampai Tahun 2025 terdiri dari 25 lokasi pasar yang tersebar di 13 Kecamatan, tersedia fasilitas pasar sebanyak 1.085 unit tempat berusaha. *seperti pada tabel 2.20*

Adapun maksud dan tujuan dilaksanakan kegiatan Rehabilitasi dan Pembangunan Pasar Kabupaten Sanggau diantaranya adalah Tersedianya Fasilitas Pasar bagi dunia usaha berupa bangunan pasar sebagai tempat berusaha bagi para pedagang tradisional terutama bagi PKL yang belum mendapatkan fasilitas tersebut. Sehingga pasar di Wilayah Kabupaten Sanggau tertata bersih, Rapi dan Indah dengan demikian jumlah Pedagang Kaki lima / Pedagang Asongan berkurang, dan dengan tersedianya fasilitas pasar diharapkan dapat meningkatkan PAD Kabupaten Sanggau.



**Tabel 2. 20 DATA BANGUNAN PASAR RAKYAT MILIK PEMERINTAH
KABUPATEN SANGGAU TAHUN 2025**

No.	Nama Pasar	Jumlah Pedagang				Kondisi
		Ruko	Kios	Los/Meja	Dasaran	
1	Pasar Tayan	-	9	-	-	Cukup/Rusak Ringan
2	Pasar Rakyat Jangkang	-	8	-	-	Cukup/Rusak Ringan
3	Pasar Meliau	-	44	44	-	Cukup/Rusak Ringan
4	Pasar Parindu	-	-	22	-	Rusak Berat
5	Pasar Sentral Sanggau	-	11	106	-	Cukup/Rusak Ringan
6	Pasar Sayur Barito (Sleng)	-	-	40	-	Rusak Berat
7	Pasar Buah Rawabangun	-	30	-	-	Cukup/Rusak Ringan
8	Pasar Mukok (lama)	-	12	-	-	Rusak Berat
9	Pasar Barito	-	42	46	-	Rusak Berat
10	Pasar Mpora Noyan	-	6	-	-	Rusak Berat
11	Pasar Kartini	8	-	-	-	Cukup/Rusak Ringan
12	Pasar Bonti	-	6	-	-	Rusak Berat
13	Pasar Mentari	-	-	28	-	Baik
14	Pasar Rakyat Tampun Juah	-	9	96	-	Baik
15	Pasar Rakyat Jarai	-	23	183	-	Baik
16	Pasar Rakyat Mukok (Baru)	-	8	10	-	Baik
17	Pasar Rakyat Balai	-	10	20	-	Baik
18	Pasar Sayur Sosok	-	-	44	-	Baik
19	Pasar Rakyat Kembayan	-	6	48	-	Baik
20	Pasar Seroja (Kios)	-	11	-	-	Baik
21	Pasar Impres Entikong	12	-	-	-	Cukup/Rusak Ringan
22	Pasar Perbatasan Entikong	-	6	-	-	Rusak Berat
23	Pasar Pujasera	-	33	14	-	Cukup/Rusak Ringan
25	Pasar Seroja (Dasaran)	-	-	-	80	Baik
Jumlah		20	274	711	80	

Sumber data Pasar Rakyat Kabupaten Sanggau Per Desember 2025

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro dan Pencapaian Renstra s/d Tahun 2025, seperti pada tabel 2.21 dibawah ini :



Tabel 2. 21 REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH DAN PENCAPAIAN RENTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2026 KABUPATEN SANGGAU

Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2025)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2026	Perkiraan Realisasi Capai Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun berjalan					
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2025	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan (Tahun 2026	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)				
<u>1</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>	<u>5</u>	<u>6</u>	<u>7</u>	<u>8=(7/6)</u>	<u>9</u>	<u>10=(5+7+9)</u>	<u>11=(10/4)</u>				
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
2	17				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH									
2	17	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Ketersediaan Layanan Umum Penunjang Pemerintahan Bidang Urusan Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian								
2	17	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penjabaran Konsistensi Program Renstra kedalam Renja								
2	17	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100	2 Dokumen	6 Dokumen	100
2	17	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	3 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100	1 Dokumen	3 Dokumen	100



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan				Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2025)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2026)	Perkiraan Realisasi Capai Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun berjalan	
								Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2025	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan (Tahun 2026)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
<u>1</u>	<u>2</u>				<u>3</u>	<u>4</u>	<u>5</u>	<u>6</u>	<u>7</u>	<u>8=(7/6)</u>	<u>9</u>	<u>10=(5+7+9)</u>	<u>11=(10/4)</u>
2	1	0	2.0	000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	3 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100	1 Dokumen	3 Dokumen	100
2	1	0	2.0	000	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	3 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100	1 Dokumen	3 Dokumen	100
2	1	0	2.0	000	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	3 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100	1 Dokumen	3 Dokumen	100
2	1	0	2.0	000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100	1 Laporan	3 Laporan	100
2	1	0	2.0	000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	100	4 Laporan	12 Laporan	100
2	1	0	2.0		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Prosentase Laporan Keuangan SKPD sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan							



Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2025)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2026)	Perkiraan Realisasi Capai Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2025	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan (Tahun 2026)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2	1	0	2.0	000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	90 Orang / Bulan	26 Orang / Bulan	30 Orang / Bulan	30 Orang / Bulan	100	30 Orang / Bulan	86 Orang / Bulan	95
2	1	0	2.0	000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	42 Dokumen	14 Dokumen	14 Dokumen	14 Dokumen	100	14 Dokumen	42 Dokumen	100
2	1	0	2.0	000	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	36 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	100	12 Dokumen	36 Dokumen	100
2	1	0	2.0	000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100	1 Laporan	3 Laporan	100
2	1	0	2.0	000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	3 Laporan	9 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	100	3 Laporan	15 Laporan	100
2	1	0	2.0		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang dipergunakan dan yang tidak dipergunakan								



Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2025)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2026)	Perkiraan Realisasi Capai Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2025	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan (Tahun 2026)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2	1	0	2.0	000	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	6 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100	2 Dokumen	6 Dokumen	100
2	1	0	2.0	000	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	6 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100	2 Dokumen	6 Dokumen	100
2	1	0	2.0	000	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	6 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	100	2 Laporan	6 Laporan	100
2	1	0	2.0	000	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	6 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	100	2 Laporan	10 Laporan	100
2	1	0	2.0		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pelayanan Administrasi Kepegawaian								
2	1	0	2.0	000	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta atribut kelengkapannya	55 Paket	0 Paket	0 Paket	0 Paket	0	55 Paket	0 Paket	0
2	1	0	2.0	000	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	3 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100	1 Dokumen	3 Dokumen	100
2	1	0	2.0	000	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	3 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100	1 Dokumen	3 Dokumen	100



Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2025)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2026)	Perkiraan Realisasi Capai Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2025	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan (Tahun 2026	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2	1	0	2.0	000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	31 Orang	0 Orang	0 Orang	0 Orang	100	0 Orang	0 Orang	0
2	1	0	2.0		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pelayanan Kegiatan Administrasi Umum								
2	1	0	2.0	000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	27 Paket	9 Paket	9 Paket	9 Paket	100	9 Paket	27 Paket	100
2	1	0	2.0	000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	10 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	100	0 Paket	2 Paket	72
2	1	0	2.0	000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	39 Paket	13 Paket	13 Paket	13 Paket	100	13 Paket	39 Paket	100
2	1	0	2.0	000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	12 Paket	4 Paket	4 Paket	4 Paket	100	4 Paket	14 Paket	70
2	1	0	2.0	000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	36 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	100	Dokumen	24 Dokumen	60
2	1	0	2.0	000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	36 Laporan	120 Laporan	120 Laporan	120 Laporan	100	120 Laporan	360 Laporan	100



Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2025)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2026)	Perkiraan Realisasi Capai Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2025	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan (Tahun 2026)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2	1	0	2.0		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Kebutuhan Barang Milik Daerah yang disediakan								
2	1	0	2.0	000 2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	3 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	100	1 Unit	3 Unit	100
2	1	0	2.0	000 5	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 Unit	0 Unit	1 Unit	1 Unit	100	1 Unit	2 Unit	100
2	1	0	2.0	000 6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	6 Unit	0 Unit	0 Unit	0 Unit	100	5 Unit	5 Unit	83
2	1	0	2.0		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pelayanan Kegiatan Administrasi Umum								
2	1	0	2.0	000 1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	36 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100	- Laporan	24 Laporan	100
2	1	0	2.0	000 2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	36 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100	12 Laporan	36 Laporan	100
2	1	0	2.0	000 4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	36 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100	12 Laporan	36 Laporan	100
2	1	0	2.0		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Kebutuhan Barang Milik Daerah yang dipelihara								



Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2025)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2026)	Perkiraan Realisasi Capai Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2025	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan (Tahun 2026	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2	1	0	2.0	000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	3 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	100	1 Unit	3 Unit	100
2	1	0	2.0	000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	6 Unit	2 Unit	2 Unit	2 Unit	100	2 Unit	6 Unit	100
2	1	0	2.0	000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	153 Unit	51 Unit	51 Unit	51 Unit	100	51 Unit	152 Unit	100
2	1	0	2.0	000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung kantor dan Bangunan lainnya yang dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	0 Unit	1 Unit	1 Unit	1	1 Unit	1 Unit	33
2	1	0	2.0		PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase koperasi yang diawasi								
2	1	0	2.0		Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Tingkat Pengawasan Koperasi								



Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2025)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2026)	Perkiraan Realisasi Capai Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2025	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan (Tahun 2026	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2	1	0	2.0	000	Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	57 Unit Usaha	0 Unit Usaha	19 Unit Usaha	0 Unit Usaha	100	0 Unit Usaha	0 Unit Usaha	80
2	1	0	2.0	000	Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	Jumlah Koperasi yang Dilakukan Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	80 Unit Usaha	0 Unit Usaha	0 Unit Usaha	0 Unit Usaha	0	0 Unit Usaha	0 Unit Usaha	0
2	1	0	2.0	000	Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan	27 Unit Usaha	90 Unit Usaha	90 Unit Usaha	90 Unit Usaha	100	90 Unit Usaha	270 Unit Usaha	100
2	1	0			PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Persentase koperasi yang sehat								
2	1	0	2.0		Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi								



Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2025)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2026	Perkiraan Realisasi Capai Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2025	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan (Tahun 2026	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2	1	0	2.0	000	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah unit usaha koperasi yang telah dilakukan penilaian kesehatannya	12 Unit Usaha	40 Unit Usaha	40 Unit Usaha	40 Unit Usaha	100	40 Unit Usaha	120 Unit Usaha	100
2	1	0	2.0	000	Penilaian Kesehatan Koperasi Meliputi Tata Kelola, Profil Risiko, Kinerja Keuangan, dan Permodalan	Jumlah Koperasi yang Diberikan Penilaian Kesehatan	40 Unit Usaha	0 Unit Usaha	0 Unit Usaha	0 Unit Usaha	0	0 Unit Usaha	0 Unit Usaha	0
2	1	0			PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase pengurus dan pengawas koperasi yang terlatih								
2	1	0	2.0		Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Kemampuan di Bidang Akuntansi bagi Pengurus Koperasi								
2	1	0	2.0	000	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	70 Orang	0 Orang	0 Orang	0 Orang	0	0 Orang	0 Orang	0
2	1	0			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Terfasilitasinya Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi								
2	1	0	2.0		Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya	Meningkatnya jumlah pemberdayaan koperasi								



Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2025)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2026)	Perkiraan Realisasi Capai Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2025	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan (Tahun 2026)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
					dalam Daerah Kabupaten/Kota									
2	1	0	2.0	000	Pemulihan Usaha Koperasi yang Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang dipulihkan usahanya	15 Unit Usaha	0 Unit Usaha	0 Unit Usaha	0 Unit Usaha	0	0 Unit Usaha	0 Unit Usaha	0
2	1	0	2.0	000	Fasilitasi Pelaporan Koperasi yang Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang Difasilitasi Pelaporannya	18 Unit Usaha	0 Unit Usaha	0 Unit Usaha	0 Unit Usaha	0	0 Unit Usaha	0 Unit Usaha	0
2	1	0			PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Terfasilitasinya Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro								
2	1	0	2.0		Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Jumlah Dokumen Informasi Usaha Kecil dan Menengah								
2	1	0	2.0	000	Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan	0 Dokumen	144 Dokumen	48 Dokumen	48 Dokumen	100	0 Dokumen	192 Dokumen	80



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan				Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2025)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2026)	Perkiraan Realisasi Capai Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun berjalan	
								Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2025	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan (Tahun 2026	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
<u>1</u>	<u>2</u>				<u>3</u>	<u>4</u>	<u>5</u>	<u>6</u>	<u>7</u>	<u>8=(7/6)</u>	<u>9</u>	<u>10=(5+7+9)</u>	<u>11=(10/4)</u>
					Restrukturisasi Usaha Mikro di Kabupaten/Kota								
2	1	0	2.0	000	Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	12 Unit Usaha	0 Unit Usaha	0 Unit Usaha	0 Unit Usaha	0	0 Unit Usaha	0 Unit Usaha	0
2	1	0	2.0	000	Pemulihan Usaha Mikro	13 Unit Usaha	0 Unit Usaha	0 Unit Usaha	0 Unit Usaha	0	0 Unit Usaha	0 Unit Usaha	0
2	1	0	2.0	001	Fasilitasi Sertifikasi dan Standardisasi Usaha Mikro	53 Unit Usaha	0 Unit Usaha	0 Unit Usaha	0 Unit Usaha	0	0 Unit Usaha	0 Unit Usaha	0
2	1	0	2.0	000	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembanganm Usaha Mikro	12 Unit Usaha	40 Unit Usaha	40 Unit Usaha	40 Unit Usaha	100	40 Unit Usaha	120 Unit Usaha	100
2	1	0	2.0	000	Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	45 Orang	0 Orang	0 Orang	0 Orang	0	0 Orang	0 Orang	0
2	1	0	2.0	001	Penyusunan Basis Data Usaha Mikro	22 Unit Usaha	0 Unit Usaha	0 Unit Usaha	0 Unit Usaha	0	0 Unit Usaha	0 Unit Usaha	0



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan				Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2025)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2026)	Perkiraan Realisasi Capai Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun berjalan	
								Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2025	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan (Tahun 2026)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
<u>1</u>	<u>2</u>				<u>3</u>	<u>4</u>	<u>5</u>	<u>6</u>	<u>7</u>	<u>8=(7/6)</u>	<u>9</u>	<u>10=(5+7+9)</u>	<u>11=(10/4)</u>
2	1	0	2.0	001	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Usaha Mikro dan Kewirausahaan	11 Orang	0 Orang	0 Orang	0 Orang	0	0 Orang	0
2	1	0			PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Terfasilitasinya Pengembangan Usaha Mikro							
2	1	0	2.0		Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Jumlah Dokumen Informasi Usaha Mikro							
2	1	0	2.0	000	Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi	13 Unit Usaha	0 Unit Usaha	0 Unit Usaha	0 Unit Usaha	0	0 Unit Usaha	0
2	1	0	2.0	000	Penumbuhan dan Pengembangan Kewirausahaan	Jumlah yang Difasilitasi	13 Orang	0 Orang	0 Orang	0 Orang	0	0 Orang	0
3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN								
3	3				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN								
3	3	0	2.0		PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Persentase Gudang yang teregistrasi							
3	3	0	2.0		Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan	Jumlah laporan hasil Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin							



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2025)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2026	Perkiraan Realisasi Capai Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2025	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan (Tahun 2026	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
		Usaha Toko Swalayan yang tersedia								
3	302.000	Fasilitasi pembinaan dan pemantauan kepemilikan Nomor Induk Berusaha (NIB) untuk distributor, agen, grosir/perkulakan dan toko swalayan melalui sistem berusaha melalui Sistem Elektronik	Jumlah laporan hasil pembinaan dan pemantauan kepemilikan Nomor Induk Berusaha (NIB) untuk distributor, agen, grosir/perkulakan dan toko swalayan melalui Sistem Perizinan Berusaha melalui Sistem Elektronik	2 Laporan	0 Laporan	0 Laporan	0 Laporan	0	0 Laporan	0
3	302.2	Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Jumlah Dokumen Tanda Daftar Gudang yang difasilitasi							
3	302.000	Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Jumlah Dokumen Tanda Daftar Gudang	3 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100	1 Dokumen	3 Dokumen
3	303	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Daya tampung pasar terhadap pedagang (%)							
3	303.20	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan yang disediakan							
3	303.000	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan	5 Unit	1 Unit	2 Unit	1 Unit	100	2 Unit	4 Unit



Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2025)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2026)	Perkiraan Realisasi Capai Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2025	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan (Tahun 2026	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
3	3	0	3	2.0	Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	Jumlah Pedagang, Pengurus dan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan yang dibina								
3	3	0	3	2.0	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	3 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100	1 Dokumen	3 Dokumen	100
3	3	0	4		PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Ketersediaan Informasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting								
3	3	0	4	2.0	Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah laporan hasil ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting yang disusun								
3	3	0	4	2.0	Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Jumlah Laporan Pengendalian Stok atau Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan barang penting ditingkat agen dan pasar rakyat	3 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100	1 Laporan	3 Laporan	100
3	3	0	4	2.0	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di	Jumlah dokumen hasil pengendalian harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting yang disusun								



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2025)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2026)	Perkiraan Realisasi Capai Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2025	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan (Tahun 2026	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
<u>1</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>	<u>5</u>	<u>6</u>	<u>7</u>	<u>8=(7/6)</u>	<u>9</u>	<u>10=(5+7+9)</u>	<u>11=(10/4)</u>
	Tingkat Pasar Kabupaten/Kota									
3 3 0 4 2 000 1	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	3 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100	1 Laporan	3 Laporan	100
3 3 0 4 2 000 3	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	3 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100	1 Laporan	3 Laporan	100
3 3 0 4 2 000 3	Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi yang disusun								
3 3 0 4 3 000 3	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90%	3 Laporan	0 Laporan	0 Laporan	0 Laporan	0	0 Laporan	0 Laporan	0
3 3 0 5	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Pertumbuhan nilai ekspor (%)								



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2025)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2026)	Perkiraan Realisasi Capai Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2025	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan (Tahun 2026)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
<u>1</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>	<u>5</u>	<u>6</u>	<u>7</u>	<u>8=(7/6)</u>	<u>9</u>	<u>10=(5+7+9)</u>	<u>11=(10/4)</u>
3 3 0 5 2.0 1	Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Informasi Ekspor Impor dan Perdagangan lintas Batas								
3 3 0 5 2.0 1	Pembinaan dan Pengembangan Usaha Produk Ekspor Unggulan Kabupaten/Kota	Jumlah Usaha Produk Ekspor Unggulan yang dibina	4 Pelaku Usaha	2 Pelaku Usaha	2 Pelaku Usaha	2 Pelaku Usaha	100	2 Pelaku Usaha	6 Pelaku Usaha	60
3 3 0 5 2.0 2	Pameran Dagang Nasional	Jumlah Pelaku Usaha yang difasilitasi dalam Pameran Dagang	4 Pelaku Usaha	0 Pelaku Usaha	0 Pelaku Usaha	0 Pelaku Usaha	0	0 Pelaku Usaha	0 Pelaku Usaha	0
3 3 0 5 2.0 3	Pameran Dagang Lokal	Jumlah Pelaku Usaha yang difasilitasi dalam Pameran Dagang Lokal	0 Pelaku Usaha	0 Pelaku Usaha	0 Pelaku Usaha	0 Pelaku Usaha	0	0 Pelaku Usaha	0 Pelaku Usaha	0
3 3 0 5 2.0 4	Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan	Jumlah Pelaku Usaha yang difasilitasi dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan	60 Pelaku Usaha	30 Pelaku Usaha	30 Pelaku Usaha	30 Pelaku Usaha	100	30 Pelaku Usaha	30 Pelaku Usaha	100
3 3 0 5 2.0 6	Pembinaan Pelaku Usaha Ekspor	Jumlah Pelaku Usaha yang dibina	0 Pelaku Usaha	0 Pelaku Usaha	0 Pelaku Usaha	0 Pelaku Usaha	0	0 Pelaku Usaha	0 Pelaku Usaha	0
3 3 0 6	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Cakupan alat UTP yang ditera dan ditera ulang								



Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2025)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2026	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2025	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan (Tahun 2026	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
3	30	06	2.01		Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Jumlah Dokumen Informasi Alat UTTP Kemetrolagian yang disusun								
3	30	06	2.01	0001	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang	790 Unit	300 Unit	300 Unit	300 Unit	100	300 Unit	300 Unit	100
3	30	06	2.01	0002	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang dibina	130 Orang	40 Orang	50 Orang	50 Orang	100	40 Orang	150 Orang	100
3	30	07			PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Ketersediaan Data UDKM								
3	30	07	2.01		Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Persentase Data dan Informasi Usaha Dagang Kecil Menengah								
3	30	07	2.01	0003	Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan	Jumlah Data dan Informasi Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan	3 Dokumen	0 Dokumen	01 Dokumen	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0 Dokumen	0
3	31				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN									
3	31	02			PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Ketersediaan Dokumen Perencanaan dan Pembangunan Industri								



Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2025)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2026)	Perkiraan Realisasi Capai Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2025	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan (Tahun 2026)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
3	3	0	2.0		Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Laporan dalam rangka penyusunan dan evaluasi RPIK								
3	3	0	2.0	0001	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri	3 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0 Dokumen	0
3	3	0	2.0	0002	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan, Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	3 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0 Dokumen	0
3	3	0	2.0	0003	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	3 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1	1 Dokumen	3 Dokumen	100
3	3	0	2.0	0004	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	3 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	0	1 Dokumen	1 Dokumen	100
3	3	0	2.0	0005	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	6 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100	2 Dokumen	6 Dokumen	100



Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2025)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2026)	Perkiraan Realisasi Capai Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2025	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan (Tahun 2026)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
3	3	0	2.0	000	Evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	3 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0 Dokumen	0
3	3	0			PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	Persentase IKM yang dibina								
3	3	0	2.0		Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPIU), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan								
3	3	0	2.0	000	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen perolehan IUI, IPIU, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang Terintegrasi dengan Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Verifikasi Teknis Pemenuhan Kesesuaian Persyaratan Teknis Perizinan Berusaha Sektor Industri dan/atau dalam rangka Perluasan Usaha untuk Bidang Usaha dengan Risiko Usaha MenengahTinggi dan Tinggi, Melalui SIINas yang Terintegrasi dengan Sistem OSS	0 Dokumen	6 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100	0 Dokumen	8 Dokumen	80



Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2025)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2026)	Perkiraan Realisasi Capai Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2025	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan (Tahun 2026	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
3	3	0	2.0	000	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha industri dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah yang berlokasi di satu Kab./Kota sepanjang merupakan Penanaman Modal Dalam Negeri dan selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat	3 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100	1 Dokumen	3 Dokumen	100
	1	3	1	3										
3	3	0	2.0	000	Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan	Jumlah dokumen Laporan Verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko untuk bidang usaha sektor perindustrian dengan	6 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0 Dokumen	0



Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2025)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2026)	Perkiraan Realisasi Capai Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2025	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan (Tahun 2026	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
					Sistem Online Single Submission Risk Base Approach (OSS RBA)	tingkat risiko usaha Menengah-Tinggi dan Tinggi, melalui SIINas yang terintegrasi dengan Sistem OSS RBA, bagi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah, selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat								
3	3	0			PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Ketersediaan Informasi Industri								
3	3	0	2.0		Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Informasi Industri yang memiliki IUI, IPUI, IUKI dan IPKI di Kabupaten Sanggau								
3	3	0	2.0	000	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	3 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100	1 Dokumen	3 Dokumen	100



Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2025)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2026)	Perkiraan Realisasi Capai Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2025	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan (Tahun 2026	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
3	3	0	2.0	000	Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota melalui SIINas	Jumlah Dokumen Hasil Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas	6 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	21 Dokumen	100	2 Dokumen	6 Dokumen	100
3	3	0	2.0	000	Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas	Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas	3 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0 Dokumen	0

2.2 Evaluasi Capaian SPM

Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Standar Pelayanan (SP) Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Mikro Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat, mencakup empat bidang utama pelayanan: perizinan/rekomendasi, pengelolaan pasar, metrologi legal, serta pembinaan koperasi dan UM.

Detail standar pelayanan yang berlaku meliputi:

1. Bidang Perdagangan dan Perindustrian Rekomendasi Ekspor-Impor : Pelayanan rekomendasi Angka Pengenal Importir (API) dan Surat Keterangan Penyalur - Minuman Beralkohol (SKP-LA). Peneraan dan Tera Ulang : Pelayanan kalibrasi dan pengujian alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya (UTTP) untuk menjamin kebenaran pengukuran.
2. Bidang Pasar Informasi Sembako : Pemantauan dan pelaporan perkembangan harga serta ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting lainnya. Penataan dan Retribusi : Pembinaan Pedagang Kaki Lima (PKL), pedagang asongan, serta pengelolaan pembayaran retribusi pemanfaatan bangunan pasar milik pemerintah daerah.
3. Bidang Koperasi dan Usaha Mikro (UM) Kelembagaan: Fasilitasi pembentukan, pengesahan akta, dan pelaksanaan Rapat Anggota Tahunan (RAT) koperasi. Pemberdayaan : Pelatihan peningkatan kapasitas produksi, perizinan berusaha (NIB), dan fasilitasi bantuan/akses permodalan

2.3 Rumusan Permasalahan dan Isu Strategis Tahun 2027

2.3.1 Permasalahan

Kinerja Pelayanan oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sanggau telah berjalan dengan baik terlihat dari capaian Sasaran Strategis yang memuat IKU Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sanggau pada tahun 2025 serta realisasi keuangan baik yang bersumber dari dana APBD ataupun DAK. Walaupun begitu, peningkatan pelayanan merupakan suatu keharusan sehingga dapat memberikan dorongan yang lebih baik dalam rangka pencapaian target kinerja yang tersurat pada Renstra Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sanggau Tahun 2025 - 2029. Dalam rangka meningkatkan pelayanan agar semakin baik kedepannya, perlu ditingkatkan koordinasi baik pada Pemerintah Pusat melalui Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan dan Kementerian Koperasi serta

Pemerintah Kabupaten/ Kota melalui Dinas yang membidangi perindustrian, perdagangan dan Koperasi se-Kalimantan Barat. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sanggau menyediakan beberapa pelayanan bagi masyarakat seperti adanya pelayanan pelatihan bagi IKM untuk peningkatan SDM, serta Sertifikasi Merk, Halal, Keterampilan, Design dan Uji Laboratorium. Pelatihan Manajemen Perkoperasian bagi Gerakan Koperasi dan Pelayanan Tera / Tera Ulang UTTP Kemetrolagian Legal. Hal ini menandakan bahwa pelayanan yang diberikan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan semakin baik dan kedepannya pelayanan ini akan ditingkatkan lebih lanjut.

Sesuai dengan kondisi saat ini dan mencermati berbagai persoalan dan permasalahan yang dihadapi dalam rangka pengembangan sektor industri, perdagangan, koperasi dan usaha mikro serta pasar, permasalahan yang dihadapi sebagai berikut :

- Kualitas SDM para pelaku usaha relatif masih rendah;
- Persaingan usaha yang semakin ketat;
- Citra koperasi sebagai badan usaha masih masih belum cukup baik;
- Produk yang dihasilkan oleh Usaha Mikro belum sepenuhnya dapat bersaing di pasar;
- Luasnya wilayah Kabupaten Sanggau;
- Kemitraan antara usaha mikro, kecil dan koperasi dengan usaha menengah dan besar belum efektif, dan cenderung belum saling menguntungkan;
- Adanya globalisasi perdagangan seperti AFTA dan WTO.

Untuk Analisis pencapaian kinerja pelayanan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sanggau, seperti pada tabel 2.22



Tabel 2. 22 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro

Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator	SPM / Standar nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi				Catat an Analisis
				2024	2025	2026	2027	2024	2025	2024	2025	2026	2027	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	11	12	13
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH														
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH														
Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD			1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD			1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD			1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD			1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	



Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator	SPM / Standar nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi				Catat an Analisis
				2024	2025	2026	2027	2024	2025	2024	2025	2026	2027	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	11	12	13
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	
Adminstrasi Keuangan Perangkat Daerah														
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			37 Orang / Bulan	37 Orang / Bulan	37 Orang / Bulan	37 Orang / Bulan	30 Orang / Bulan	30 Orang / Bulan	37 Orang / Bulan	37 Orang / Bulan	37 Orang / Bulan	37 Orang / Bulan	
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			14 Dokume n	14 Dokume n	14 Dokume n	14 Dokume n	14 Dokume n	14 Dokume n	14 Dokume n	14 Dokume n	14 Dokume n	14 Dokume n	
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			12 Dokume n	12 Dokume n	12 Dokume n	12 Dokume n	12 Dokume n	12 Dokume n	12 Dokume n	12 Dokume n	12 Dokume n	12 Dokume n	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	



Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator	SPM / Standar nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi				Catat an Analisis
				2024	2025	2026	2027	2024	2025	2024	2025	2026	2027	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	11	12	13
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Seme steran SKPD			3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah														
Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD			2 Dokume n	2 Dokume n	2 Dokume n	2 Dokume n	2 Dokume n	2 Dokume n	2 Dokume n	2 Dokume n	2 Dokume n	2 Dokume n	
Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD			2 Dokume n	2 Dokume n	2 Dokume n	2 Dokume n	2 Dokume n	2 Dokume n	2 Dokume n	2 Dokume n	2 Dokume n	2 Dokume n	
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD			2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD			2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah														
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya			55 Paket	55 Paket	60 Paket	60 Paket	-	-	55 Paket	55 Paket	60 Paket	60 Paket	
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian			1 Dokume n	1 Dokume n	1 Dokume n	1 Dokume n	1 Dokume n	1 Dokume n	1 Dokume n	1 Dokume n	1 Dokume n	1 Dokume n	



Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator	SPM / Standar nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi				Catat an Analisis
				2024	2025	2026	2027	2024	2025	2024	2025	2026	2027	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	11	12	13
Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai			1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan			15 Orang	15 Orang	15 Orang	15 Orang	15 Orang	15 Orang	15 Orang	15 Orang	15 Orang	15 Orang	
Administrasi Umum Perangkat Daerah														
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			9 Paket	9 Paket	9 Paket	9 Paket	9 Paket	9 Paket	9 Paket	9 Paket	9 Paket	9 Paket	
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan				3 Jenis	2 Jenis	5 Jenis	3 Paket	1 Paket	5 Paket	5 Paket	5 Paket	5 Paket	
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			13 Paket	13 Paket	13 Paket	13 Paket	13 Paket	13 Paket	13 Paket	13 Paket	13 Paket	13 Paket	
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan			4 Paket	4 Paket	4 Paket	4 Paket	4 Paket	4 Paket	4 Paket	4 Paket	4 Paket	4 Paket	
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan			12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			120 Laporan	120 Laporan	228 Laporan	228 Laporan	218 Laporan	120 Laporan	120 Laporan	120 Laporan	120 Laporan	120 Laporan	



Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator	SPM / Standar nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi				Catatan Analisis
				2024	2025	2026	2027	2024	2025	2024	2025	2026	2027	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	11	12	13
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah														
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang diadakan			1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	
Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan			1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan			0 Unit	1 Unit	5 Unit	5 Unit	0 Unit	1 Unit	0 Unit	1 Unit	5 Unit	5 Unit	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah														
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat			1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan			3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan			1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah														
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayar Pajaknya			1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	



Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator	SPM / Standar nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi				Catat an Analisis
				2024	2025	2026	2027	2024	2025	2024	2025	2026	2027	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	11	12	13
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jmlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan Perizinannya			2 Unit	2 Unit	2 Unit	2 Unit	2 Unit	2 Unit	2 Unit	2 Unit	2 Unit	2 Unit	
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara			51 unit	45 unit	51 unit	51 unit	51 unit	51 unit	51 unit	51 unit	51 unit	51 unit	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung kantor dan Bangunan lainnya yang dipelihara/Direhabilitasi			1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	0 unit	0 unit	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	
PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI														
Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam Daerah Kabupaten/Kota														
Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota			190 Unit Usaha	190 Unit Usaha	190 Unit Usaha	190 Unit Usaha	80 Unit Usaha	80 Unit Usaha	80 Unit Usaha	80 Unit Usaha	190 Unit Usaha	190 Unit Usaha	
Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	Jumlah Koperasi yang Dilakukan Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi			0 Unit Usaha	0 Unit Usaha	90 Unit Usaha	90 Unit Usaha	0 Unit Usaha	0 Unit Usaha	0 Unit Usaha	0 Unit Usaha	80 Unit Usaha	80 Unit Usaha	



Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator	SPM / Standar nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi				Catat an Analisis
				2024	2025	2026	2027	2024	2025	2024	2025	2026	2027	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	11	12	13
Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan			90 Unit Usaha	30 Unit Usaha	35 Unit Usaha	35 Unit Usaha	90 Unit Usaha	90 Unit Usaha	90 Unit Usaha	90 Unit Usaha	30 Unit Usaha	30 Unit Usaha	
PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI														
Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota														
Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah unit usaha koperasi yang telah dilakukan penilaian kesehatannya			20 Unit Usaha	40 Unit Usaha	20 Unit Usaha	20 Unit Usaha	40 Unit Usaha	40 Unit Usaha	40 Unit Usaha	40 Unit Usaha	20 Unit Usaha	20 Unit Usaha	
Penilaian Kesehatan Koperasi Meliputi Tata Kelola, Profil Risiko, Kinerja Keuangan, dan Permodalan	Jumlah Koperasi yang Diberikan Penilaian Kesehatan			0 Unit Usaha	0 Unit Usaha	40 Unit Usaha	40 Unit Usaha	0 Unit Usaha	0 Unit Usaha	0 Unit Usaha	0 Unit Usaha	40 Unit Usaha	40 Unit Usaha	
PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PERKOPERASIAN														
Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota														
Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian			0 Orang	0 Orang	30 Orang	30 Orang	0 Orang	0 Orang	0 Orang	0 Orang	30 Orang	30 Orang	
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI														



Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator	SPM / Standar nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi				Catat an Analisis
				2024	2025	2026	2027	2024	2025	2024	2025	2026	2027	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	11	12	13
Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota														
Pembinaan dan Pendampingan Bagi Keluarga dan Kelompok Masyarakat yang Akan Membentuk Koperasi Dalam Pengembangan Ekonomi	Jumlah Pembinaan dan/atau Pendampingan yang dilaksanakan			0 Kelompok Masyarakat	0 Kelompok Masyarakat	0 Kelompok Masyarakat	5 Kelompok Masyarakat	0 Kelompok Masyarakat	0 Kelompok Masyarakat	0 Kelompok Masyarakat	0 Kelompok Masyarakat	0 Kelompok Masyarakat	5 Kelompok Masyarakat	
Fasilitasi Kemitraan Koperasi yang Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang Difasilitasi Kemitraannya			0 Unit Usaha	0 Unit Usaha	0 Unit Usaha	0 Unit Usaha	0 Unit Usaha	0 Unit Usaha	0 Unit Usaha	0 Unit Usaha	0 Unit Usaha	0 Unit Usaha	
Pemulihan Usaha Koperasi yang Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang dipulihkan usahanya			0 Unit Usaha	0 Unit Usaha	0 Unit Usaha	0 Unit Usaha	0 Unit Usaha	0 Unit Usaha	0 Unit Usaha	0 Unit Usaha	0 Unit Usaha	0 Unit Usaha	
Fasilitasi Pelaporan Koperasi yang Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang Difasilitasi Pelaporannya			0 Unit Usaha	0 Unit Usaha	0 Unit Usaha	0 Unit Usaha	0 Unit Usaha	0 Unit Usaha	0 Unit Usaha	0 Unit Usaha	0 Unit Usaha	0 Unit Usaha	
Pemberdayaan Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang Difasilitasi Pelaporannya			0 Unit Usaha	0 Unit Usaha	0 Unit Usaha	3 Unit Usaha	0 Unit Usaha	0 Unit Usaha	0 Unit Usaha	0 Unit Usaha	0 Unit Usaha	3 Unit Usaha	
PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL DAN USAHA MIKRO (UMKM)														



Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator	SPM / Standar nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi				Catatan Analisis
				2024	2025	2026	2027	2024	2025	2024	2025	2026	2027	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	11	12	13
Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan														
Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Mikro di Kabupaten/Kota			0 Unit Usaha	0 Unit Usaha	0 Unit Usaha	0 Unit Usaha	0 Unit Usaha	0 Unit Usaha	0 Unit Usaha	0 Unit Usaha	0 Unit Usaha	0 Unit Usaha	
Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro yang Telah Mendapatkan Perizinan			0 Unit Usaha	0 Unit Usaha	120 Unit Usaha	120 Unit Usaha	0 Unit Usaha	0 Unit Usaha	0 Unit Usaha	0 Unit Usaha	120 Unit Usaha	120 Unit Usaha	
Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembanganm Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro			40 Unit Usaha	30 Unit Usaha	44 Unit Usaha	44 Unit Usaha	40 Unit Usaha	30 Unit Usaha	40 Unit Usaha	30 Unit Usaha	44 Unit Usaha	44 Unit Usaha	
Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	Jumlah SDM yang Telah Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro			0 Orang	0 Orang	30 Orang	30 Orang	0 Orang	0 Orang	0 Orang	0 Orang	30 Orang	30 Orang	
Pemulihan Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi			0 Unit Usaha	0 Unit Usaha	10 Unit Usaha	10 Unit Usaha	0 Unit Usaha	0 Unit Usaha	0 Unit Usaha	0 Unit Usaha	10 Unit Usaha	10 Unit Usaha	
Fasilitasi Sertifikasi dan Standardisasi Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi			0 Unit Usaha	10 Unit Usaha	28 Unit Usaha	28 Unit Usaha	0 Unit Usaha	10 Unit Usaha	0 Unit Usaha	10 Unit Usaha	28 Unit Usaha	28 Unit Usaha	



Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator	SPM / Standar nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi				Catat an Analisis
				2024	2025	2026	2027	2024	2025	2024	2025	2026	2027	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	11	12	13
Penyusunan Basis Data Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha Mikro Terdata			0 Unit Usaha	90 Unit Usaha	120 Unit Usaha	120 Unit Usaha	0 Unit Usaha	90 Unit Usaha	0 Unit Usaha	90 Unit Usaha	120 Unit Usaha	120 Unit Usaha	
Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Usaha Mikro dan Kewirausahaan			0 Orang	50 Orang	60 Orang	60 Orang	0 Orang	50 Orang	0 Orang	50 Orang	60 Orang	60 Orang	
Peningkatan Kompetensi dan Kapasitas SDM Usaha Mikro dan Kecil (UMK) Pelaku Usaha	Jumlah pelaku usaha yang memperoleh peningkatan kompetensi dan kapasitas SDM Usaha Mikro dan Kecil (UMK)			0 Orang	0 Orang	0 Orang	20 Orang	0 Orang	0 Orang	0 Orang	0 Orang	0 Orang	20 Orang	
Pembinaan dan Fasilitasi Pelaku Usaha dalam Pembentukan Badan Hukum Berusaha	Jumlah Pelaku Usaha yang terfasilitasi Pembentukan Badan Hukum Berusaha			0 Orang	0 Orang	0 Orang	10 Orang	0 Orang	0 Orang	0 Orang	0 Orang	0 Orang	10 Orang	
Fasilitasi Integrasi Basis Data Tunggal UMKM	Jumlah Kegiatan Hasil Fasilitasi Integrasi dan Sinkronisasi Data UMKM			0 Kegiatan	0 Kegiatan	0 Kegiatan	1 Kegiatan	0 Kegiatan	0 Kegiatan	0 Kegiatan	0 Kegiatan	0 Kegiatan	1 Kegiatan	
Pembinaan dan Fasilitasi Sertifikasi dan Standardisasi Produk	Jumlah UMKM yang dibina dan difasilitasi dalam mengakses Sertifikasi dan Standardisasi Produk			0 Unit Usaha	0 Unit Usaha	0 Unit Usaha	28 Unit Usaha	0 Unit Usaha	0 Unit Usaha	0 Unit Usaha	0 Unit Usaha	0 Unit Usaha	28 Unit Usaha	



Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator	SPM / Standar nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi				Catat an Analisis
				2024	2025	2026	2027	2024	2025	2024	2025	2026	2027	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	11	12	13
PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM														
Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil														
Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi			0 Unit Usaha	0 Unit Usaha	8 Unit Usaha	8 Unit Usaha	0 Unit Usaha	0 Unit Usaha	0 Unit Usaha	0 Unit Usaha	8 Unit Usaha	8 Unit Usaha	
Penumbuhan dan Pengembangan Kewirausahaan	Jumlah yang Difasilitasi			0 Orang	0 Orang	8 Orang	8 Orang	0 Orang	0 Orang	0 Orang	0 Orang	8 Orang	8 Orang	
URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN														
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN														
PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN														
Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan														
Fasilitasi pembinaan dan pemantauan kepemilikan Nomor Induk Berusaha (NIB) untuk distributor, agen, grosir/perkulakan dan toko swalayan melalui sistem berusaha melalui Sistem Elektronik	Jumlah laporan hasil pembinaan dan pemantauan kepemilikan Nomor Induk Berusaha (NIB) untuk distributor, agen, grosir/perkulakan dan toko swalayan melalui Sistem Perizinan Berusaha melalui Sistem Elektronik			1 Laporan	0 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	0 Laporan	1 Laporan	0 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	
Penerbitan Tanda Daftar Gudang														
Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Jumlah Dokumen Tanda Daftar Gudang			1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	



Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator	SPM / Standar nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi				Catat an Analisis
				2024	2025	2026	2027	2024	2025	2024	2025	2026	2027	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	11	12	13
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN														
Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan														
Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan			1 Unit	1 Unit	3 Unit	3 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	3 Unit	3 Unit	
Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya														
Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan			1 Dokumen	20 Dokumen	20 Dokumen	20 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	20 Dokumen	20 Dokumen	
PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING														
Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota														
Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Jumlah Laporan Pengendalian Stok atau Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan barang penting ditingkat agen dan pasar rakyat			0 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	0 Laporan	1 Laporan	0 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	
Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota														



Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator	SPM / Standar nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi				Catatan Analisis
				2024	2025	2026	2027	2024	2025	2024	2025	2026	2027	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	11	12	13
Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota			1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	
Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan			0 Laporan	0 Laporan	0 Laporan	48 Laporan	0 Laporan	0 Laporan	0 Laporan	0 Laporan	0 Laporan	48 Laporan	
Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota			1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	
Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota														
Tersedianya Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90%	Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90%			0 Laporan	0 Laporan	0 Laporan	0 Laporan	0 Laporan	0 Laporan	0 Laporan	0 Laporan	0 Laporan	0 Laporan	
PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR														



Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator	SPM / Standar nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi				Catatan Analisis
				2024	2025	2026	2027	2024	2025	2024	2025	2026	2027	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	11	12	13
Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota														
Pembinaan dan Pengembangan Usaha Produk Ekspor Unggulan Kabupaten/Kota	Jumlah Usaha Produk Ekspor Unggulan yang dibina			0 Pelaku Usaha	0 Pelaku Usaha	0 Pelaku Usaha	0 Pelaku Usaha	0 Pelaku Usaha	0 Pelaku Usaha	0 Pelaku Usaha	0 Pelaku Usaha	0 Pelaku Usaha	0 Pelaku Usaha	
Pameran Dagang Nasional	Jumlah Pelaku Usaha yang difasilitasi dalam Pameran Dagang			Pelaku Usaha	Pelaku Usaha	Pelaku Usaha	Pelaku Usaha	Pelaku Usaha	Pelaku Usaha	Pelaku Usaha	Pelaku Usaha	Pelaku Usaha	Pelaku Usaha	
Pameran Dagang Lokal	Jumlah Pelaku Usaha yang difasilitasi dalam Pameran Dagang Lokal			Pelaku Usaha	Pelaku Usaha	Pelaku Usaha	Pelaku Usaha	Pelaku Usaha	Pelaku Usaha	Pelaku Usaha	Pelaku Usaha	Pelaku Usaha	Pelaku Usaha	
Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan	Jumlah Pelaku Usaha yang difasilitasi dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan			2 Pelaku Usaha	2 Pelaku Usaha	2 Pelaku Usaha	10 Pelaku Usaha	2 Pelaku Usaha	2 Pelaku Usaha	2 Pelaku Usaha	3 Pelaku Usaha	2 Pelaku Usaha	10 Pelaku Usaha	
Pembinaan Pelaku Usaha Ekspor	Jumlah Pelaku Usaha yang dibina			Pelaku Usaha	Pelaku Usaha	Pelaku Usaha	Pelaku Usaha	Pelaku Usaha	Pelaku Usaha	Pelaku Usaha	Pelaku Usaha	Pelaku Usaha	Pelaku Usaha	
PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN														
Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan														
Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang			240 Unit	240 Unit	250 Unit	250 Unit	240 Unit	240 Unit	240 Unit	240 Unit	240 Unit	250 Unit	
Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang dibina			40 Orang	40 Orang	40 Orang	40 Orang	40 Orang	40 Orang	40 Orang	40 Orang	40 Orang	40 Orang	



Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator	SPM / Standar nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi				Catatan Analisis
				2024	2025	2026	2027	2024	2025	2024	2025	2026	2027	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	11	12	13
PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI														
Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri														
Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan	Jumlah Data dan Informasi Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan			Dokumen	Dokumen	Dokumen	Dokumen	Dokumen	Dokumen	Dokumen	Dokumen	Dokumen	Dokumen	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG INDUSTRI														
PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI														
Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota														
Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri			0 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	1 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	1 Dokumen	
Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan, Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri			0 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	
Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri			1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	



Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator	SPM / Standar nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi				Catat an Analisis
				2024	2025	2026	2027	2024	2025	2024	2025	2026	2027	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	11	12	13
Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri			1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	
Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat			2 Dokumen 1 SIKM	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	
Evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri			0 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	
Pelaksanaan pengawasan Jaminan Produk Halal (JPH) di level Kabupaten/Kota	Jumlah objek pengawasan jaminan produk halal yang dapat diawasi - Jumlah program pengawasan Jaminan produk halal yang dapat diimplementasikan			0 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	2 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	2 Dokumen	
PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA														
Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota														



Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator	SPM / Standar nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi				Catat an Analisis
				2024	2025	2026	2027	2024	2025	2024	2025	2026	2027	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	11	12	13
Fasilitasi Pemenuhan Komitmen perolehan IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang Terintegrasi dengan Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Verifikasi Teknis Pemenuhan Kesesuaian Persyaratan Teknis Perizinan Berusaha Sektor Industri dan/atau dalam rangka Perluasan Usaha untuk Bidang Usaha dengan Risiko Usaha MenengahTinggi dan Tinggi, Melalui SIINas yang Terintegrasi dengan Sistem OSS			Dokumen	Dokumen	Dokumen	Dokumen	Dokumen	Dokumen	Dokumen	Dokumen	Dokumen	Dokumen	
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha industri dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah yang berlokasi di satu Kab./Kota sepanjang merupakan Penanaman Modal Dalam Negeri dan selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat			1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	



Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator	SPM / Standar nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi				Catat an Analisis
				2024	2025	2026	2027	2024	2025	2024	2025	2026	2027	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	11	12	13
Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Base Approach (OSS RBA)	Jumlah dokumen Laporan Verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko untuk bidang usaha sektor perindustrian dengan tingkat risiko usaha Menengah-Tinggi dan Tinggi, melalui SIINas yang terintegrasi dengan Sistem OSS RBA, bagi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah, selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat			2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	
PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL														
Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota														
Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)			1 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	1 Dokumen	0 Dokumen	1 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	



Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator	SPM / Standar nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi				Catat an Analisis
				2024	2025	2026	2027	2024	2025	2024	2025	2026	2027	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	11	12	13
Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota melalui SIINas	Jumlah Dokumen Hasil Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas			1 Dokume n	1 Dokume n	2 Dokume n	2 Dokume n	1 Dokume n	1 Dokume n	1 Dokume n	1 Dokume n	2 Dokume n	2 Dokume n	
Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas	Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas			Dokume n	Dokume n	Dokume n	Dokume n	Dokume n	Dokume n	Dokume n	Dokume n	1 Dokume n	1 Dokume n	

2.3.2 Isu – isu Strategis Tahun 2027

Pemerintah Kabupaten Sanggau bertekad melanjutkan mengamankan dan mengawal kebijakan-kebijakan yang sudah dilakukan dalam membangun Kabupaten Sanggau sebagai **“Rumah Kita”** untuk sebuah gerakan dengan mengedepankan **“Bekerja dengan Hati”** serta semangat **“Dompu”** dan **“Gotong Royong”**. Sanggau maju berkelanjutan dan berkeadilan diwujudkan dengan menjadikan Kabupaten Sanggau untuk Indonesia yang sejati-jatinya "merdeka". Merdeka dari kemiskinan, kebodohan, dan keterbelakangan sebagai upaya agar berdaulat secara politik, berdikari secara ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan. Perumusan visi dan misi tentunya disusun dengan memperhatikan isu strategis, lingkungan strategis dan tujuan pembangunan jangka panjang daerah serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Barat dan Nasional.

Dalam menuangkan visi dan misi, juga perlu melanjutkan penguatan kepada setiap pemangku kepentingan semangat patriotisme **“SABANG MERAH”** (Sanggau Bangga Mengukir Sejarah) yang telah dilaksanakan pada periode pembangunan jangka menengah sebelumnya melalui 7 (tujuh) Brand Images, yaitu: (1) Sanggau Pintar, (2) Sanggau Sehat, (3) Sanggau Bersih dan Indah, (4) Sanggau Tertib, (5) Sanggau Terang, (6) Sanggau Manjur (Maju Infrastruktur), dan (7) Sanggau Budiman (Berbudaya dan Beriman).

Dengan motto **“YOSH”** (Yakin, Optimis, Sanggau Hebat), masyarakat Kabupaten Sanggau memiliki keimanan dan keyakinan kepada Tuhan Yang Maha Esa untuk senantiasa optimis dalam melaksanakan pembangunan maju berkelanjutan dan berkeadilan menuju Kabupaten Sanggau yang hebat.

Visi pembangunan daerah kabupaten Sanggau tahun 2025-2029 merupakan penjabaran dari visi Bupati dan Wakil Bupati Sanggau Periode 2025 – 2030. Secara politis visi merupakan perwujudan dari cita-cita Bupati dan Wakil Bupati dalam membangun Kabupaten Sanggau yang juga menggambarkan arah pembangunan atau kondisi masa depan Kabupaten Sanggau yang ingin dicapai. Visi pembangunan daerah Kabupaten Sanggau untuk periode RPJMD tahun 2025-2029 sesuai visi Bupati dan Wakil Bupati terpilih yaitu :

“ SANGGAU MAJU BERKELANJUTAN DAN BERKEADILAN ”

Makna dari visi “Maju Berkelanjutan” menunjukkan keadaan semakin meningkatnya berbagai indikator pembangunan daerah yang telah dicapai pada periode pemerintahan yang sebelumnya. Beberapa indikator pembangunan daerah



yang menjadi fokus pada masa RPJMD tahun 2025-2029 meliputi pendidikan, kesehatan, ekonomi, sosial dan budaya dengan dukungan ketersediaan infrastruktur dasar, sarana dan prasarana, pelayanan publik yang baik dan pemerintahan daerah yang profesional, transparan, akuntabel dan demokratis berbasis elektronik secara berkesinambungan.

Makna “Berkeadilan” menunjukkan keadaan pembangunan yang merata antar wilayah dengan perlakuan yang setara tanpa membedakan latar belakang. Kabupaten Sanggau memiliki ciri khas latar belakang budaya yang beragam karena memiliki penduduk dari berbagai jenis suku dan agama. Oleh karena itu pembangunan daerah yang dilaksanakan akan memberikan aspek keadilan bagi setiap suku dan budaya yang ada di Kabupaten Sanggau.

Misi untuk mewujudkan Sanggau Maju Berkelanjutan dan Berkeadilan, diperlukan misi sebagai suatu yang harus dilaksanakan agar tujuan dapat terlaksana dan berhasil dengan baik. Dalam hal ini misi merupakan pernyataan mengenai hal yang harus dicapai sebagai cerminan pelayanan dan tujuan pembangunan. Dengan demikian misi yang diemban menjawab permasalahan masyarakat, memiliki sasaran publik dan memiliki daya saing yang dapat meyakinkan masyarakat. Adapun misi pembangunan daerah untuk menuju Sanggau Maju Berkelanjutan Dan Berkeadilan sebagai berikut:

1. MENINGKATKAN PEMBANGUNAN DAN PERBAIKAN INFRASTRUKTUR DASAR DI PERDESAAN, PERKOTAAN DAN PERBATASAN NEGARA;

Misi ini dimaksudkan melanjutkan upaya pembangunan di Kabupaten Sanggau dengan meningkatkan fasilitas-fasilitas infrastruktur dasar yang mendukung kehidupan masyarakat untuk mencapai pertumbuhan ekonomi. Infrastruktur dasar yang dimaksud meliputi jalan, jembatan, sistem irigasi dan sarana perhubungan. Selain itu penanganan dan penataan terhadap pemukiman kumuh juga perlu dilakukan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat serta lingkungan melalui penyediaan sarana dan prasarana air bersih dan sanitasi.

Percepatan pembangunan untuk sejumlah kebutuhan infrastruktur dasar masyarakat di perdesaan dan perkotaan serta daerah perbatasan yang merupakan beranda depan Negara Kesatuan Republik Indonesia, akan memberikan dampak terhadap pertumbuhan ekonomi, mengurangi ketimpangan wilayah serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat karena mempermudah akses ke layanan pendidikan dan kesehatan. Kawasan perbatasan merupakan



kawasan yang strategis karena merupakan titik perekonomian regional maupun nasional. Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Entikong yang ada di Kabupaten Sanggau, merupakan PLBN pertama yang ada di Kalimantan Barat. Melalui kawasan perbatasan, aktivitas perdagangan antar negara dapat dilakukan dengan mudah, cepat dan murah yang akhirnya berujung pada peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu peran serta masyarakat dan swasta dalam kegiatan pembangunan dan penyelenggaraan kebutuhan dasar mutlak diperlukan dalam mengantisipasi keterbatasan anggaran pemerintah. Selain itu, Pemerintah Daerah juga perlu meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Pusat dalam pembangunan di kawasan perbatasan, mengingat kewenangan tentang pengelolaan dan pemanfaatan kawasan perbatasan merupakan kewenangan Pemerintah Pusat. Penyediaan dan pemerataan akses infrastruktur yang berkualitas diharapkan tetap berada dalam koridor menjaga kualitas lingkungan hidup sehingga daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup dapat tetap terjaga melalui pemanfaatan ruang yang serasi antara penggunaan untuk permukiman, kegiatan sosial ekonomi, dan upaya konservasi. Lingkungan hidup yang sehat mempengaruhi kelangsungan hidup generasi sekarang dan mendatang.

2. MENINGKATKAN PEREKONOMIAN MASYARAKAT;

Misi ini dimaksudkan untuk melanjutkan peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui penguatan dan pengembangan sektor-sektor ekonomi dan meningkatkan investasi daerah yang berbasis pada pemanfaatan potensi sumber daya alam.

Kabupaten Sanggau memiliki berbagai potensi produk yang bisa diangkat dan dikembangkan. Hal tersebut tentunya dapat dijadikan sebagai modal keunggulan dalam persaingan bagi Kabupaten Sanggau dalam membangkitkan perekonomian masyarakat yang kuat dan tangguh serta mewujudkan peningkatan indeks daya saing daerah.

Selain potensi sumber daya alam, upaya pengembangan berbagai komoditi pangan unggulan kabupaten sanggau dalam rangka meningkatkan ketahanan pangan daerah juga diharapkan dapat menjadi akselerasi dalam mewujudkan kebijakan swasembada pangan.

3. MENINGKATKAN KEMAMPUAN DAN KOMPETESI SUMBER DAYA MANUSIA YANG UNGGUL;



Misi ini dimaksudkan untuk melanjutkan peningkatan kualitas sumber daya manusia, pendidikan, kesehatan, tenaga kerja, serta gender. kesetaraan gender dan generasi muda menjadi atensi dalam agenda pembangunan berkelanjutan global karena memiliki peran penting dalam pembangunan dan kemajuan masyarakat. masyarakat yang cerdas, sehat jasmani dan rohani, terpenuhi kesejahteraan sosialnya memiliki daya saing dalam berperan aktif disemua bidang pembangunan.

Generasi muda merupakan aset dan harapan masa depan bangsa dalam pembangunan daerah. untuk mewujudkan generasi muda berkualitas, berkompeten, berdaya saing tinggi, adaptif, kreatif dan inovatif, diperlukan upaya yang terencana dan berkelanjutan, baik dari segi pendidikan, kesehatan, kebijakan, maupun dukungan infrastruktur.

Dengan demikian, generasi muda akan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi, teknologi, serta sosial budaya di daerah, serta menjadi generasi muda yang dapat berperan aktif dan menjadi penggerak dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045.

4. MELESTARIKAN ADAT BUDAYA DAN LINGKUNGAN HIDUP YANG BERMANFAAT;

Kearifan lokal diharapkan mampu memberikan solusi dalam menjaga ekosistem alam, mengelola sumber daya dan mengembangkan ekonomi hijau dan mengadopsi praktek budaya yang ramah lingkungan.

Misi ini memiliki maksud membangun tatanan kehidupan sosial masyarakat kabupaten sanggau melalui penguatan budaya lokal serta mensinergikan kearifan lokal kedalam progam pembangunan daerah. tata nilai budaya dan adat istiadat dapat menjadi kekuatan penggerak dan modal dasar pembangunan.

Upaya menjaga kelestarian dan pengelolaan lingkungan hidup, meliputi pengelolaan limbah domestik yang aman, penanganan dan pengolahan sampah yang inklusif dari hulu ke hilir, upaya mitigasi bencana serta pengendalian dan pengawasan terhadap potensi polusi udara yang ditimbulkan dari aktivitas industri maupun aktivitas perekonomian masyarakat.

5. MENINGKATKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN APARATUR SIPIL NEGARA YANG PROFESIONAL;

Misi ini dimaksudkan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik sebagai kunci dalam menciptakan pelayanan publik yang efektif dan efisien.

Peningkatan tata kelola Pemerintahan dan profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN) bertujuan untuk mewujudkan birokrasi yang transparan, akuntabel, serta responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) mengacu pada sistem pemerintahan yang berbasis pada prinsip transparansi, partisipasi, akuntabilitas, efektivitas dan supremasi hukum. Hal ini mencakup berbagai aspek seperti reformasi birokrasi, peningkatan kualitas layanan publik, serta penguatan etika dan integritas pejabat publik.

Peningkatan tata kelola pemerintahan dan profesionalitas ASN dilakukan melalui penerapan reformasi birokrasi, penguatan aparatur sipil negara, peningkatan pengawasan internal pemerintah, peningkatan transparansi dan akuntabilitas, optimalisasi teknologi dalam pemerintahan (*E-Government*) serta peningkatan kualitas pelayanan publik. Dengan penerapan langkah-langkah tersebut diharapkan tata kelola pemerintahan menjadi lebih baik, transparan, dan efisien, serta ASN mampu bekerja secara profesional dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Ini akan mendorong terciptanya pemerintahan yang bersih, efektif, dan berdaya saing.

Era baru sistem pemerintahan menginginkan transparansi serta keterbukaan informasi publik termasuk dalam pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Optimalisasi pengelolaan PAD dilakukan melalui upaya penguatan sistem pemungutan pajak dan retribusi, pengelolaan aset daerah yang lebih produktif, pemberdayaan BUMD dan berbagai sektor usaha daerah serta meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan retribusi. Dengan penerapan strategi tersebut, optimalisasi PAD akan meningkatkan kapasitas fiskal daerah untuk mendukung pembangunan infrastruktur, pelayanan publik, serta program kesejahteraan masyarakat secara lebih mandiri dan berkelanjutan. Masyarakat juga menginginkan agar pemerintah dan masyarakat bersifat interaktif dan dialogis serta pemerintah yang responsif, yang cepat merespon keluhan-keluhan yang disampaikan oleh masyarakat. Pemerintah yang terbuka dan profesional akan mampu mendorong partisipasi masyarakat untuk terlibat dari proses pengambilan kebijakan publik sampai dengan membuka ruang yang lebih lebar bagi pengawasan-pengawasan publik.

Pemerintahan desa di Kabupaten Sanggau merupakan ujung tombak dalam pelaksanaan pembangunan dan pelayanan publik di tingkat paling dasar. Pemerintah Kabupaten Sanggau berkomitmen memperkuat peran dan kapasitas

aparatur desa agar mampu menjalankan roda pemerintahan secara efektif, transparan, dan partisipatif. Dalam menjalankan tugasnya, pemerintahan desa di Sanggau berupaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), dengan mendorong partisipasi masyarakat dalam Musyawarah Desa (Musdes), serta pengelolaan keuangan desa yang akuntabel dan berbasis kebutuhan riil masyarakat. Dengan sinergi antara pemerintah desa, kecamatan, dan kabupaten, diharapkan pemerintahan desa di Kabupaten Sanggau dapat terus berkembang menjadi pilar pembangunan yang tangguh dan berdaya saing tinggi, demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat desa secara menyeluruh.

6. MENINGKATKAN HARMONISASI DAN TOLERANSI ANTAR UMAT BERAGAMA;

Pemahaman masyarakat terhadap toleransi dan harmonisasi dapat membantu mencegah dan mengelola konflik terutama pada daerah yang memiliki masyarakat yang majemuk. Misi ini dimaksudkan mewujudkan tatanan sosial masyarakat yang saling harmonis dan bertoleransi antar umat beragama dan antar suku, sebagai kunci utama dalam menciptakan masyarakat yang damai, aman, dan sejahtera serta saling menghormati perbedaan keyakinan. Harmonisasi mencerminkan kehidupan yang rukun dan saling mendukung antar pemeluk agama yang berbeda.

Telaahan terhadap visi, misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sanggau memberikan gambaran peran serta dan keterlibatan langsung Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sanggau. Hal ini ditunjukkan melalui pernyataan ***misi ke 2 (dua)***, yaitu : “ **Meningkatan Perekonomian Masyarakat “ dan *Misi ke 5 (lima)* yaitu “ Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Aparatur Sipil Negara Yang Profesional“**

Pada misi ini terlihat peran serta Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sanggau didalam memberikan pelayanan yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka untuk ikut mendukung misi meningkatkan perekonomian masyarakat dan Meningkatkan tata kelola pemerintahan aparatur sipil negara yang profesional; dengan:

1. Meningkatkan perekonomian masyarakat dengan basis pemanfaatan potensi sumberdaya alam;
2. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan;



3. Percepatan pengembangan wilayah perbatasan dan kawasan strategis;
4. Pengentasan kemiskinan, pengurangan pengangguran dan peningkatan pemberdayaan ekonomi kerakyatan;
5. Pengembangan ekonomi kreatif;
6. Promosi Produk Dalam Negeri;
7. Pelayanan di Bidang Kelembagaan, Pengawasan, dan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM serta Pendidikan dan Pelatihan bagi Koperasi dan UMKM
8. Revitalisasi dan Pembangunan pasar
9. Pembinaan Pedagang Kakilima dan Asongan
10. Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dengan Retribusi dan Sewa Pasar.

Industri 5.0 menandai babak baru dalam revolusi industri, di mana integrasi antara teknologi canggih dan faktor manusia menjadi fokus utama. Tidak hanya otomatisasi yang menjadi prioritas, tetapi juga kolaborasi harmonis antara manusia dan mesin. Dalam bidang sumber daya manusia (SDM), transformasi digital memainkan peran krusial untuk mendukung efisiensi organisasi, meningkatkan daya saing, dan memberikan pengalaman yang lebih bermakna. Adopsi teknologi seperti kecerdasan buatan (AI), big data, dan *Internet of Things* (IoT) menciptakan lingkungan kerja yang lebih cerdas dan terhubung. Meski demikian, perjalanan menuju transformasi digital di era Industri 5.0 tidaklah mudah. Tantangan yang dihadapi organisasi sangat beragam, termasuk resistensi terhadap perubahan budaya kerja serta kebutuhan untuk membekali sumber daya manusia (SDM), dengan keterampilan baru yang relevan. Perubahan cepat ini juga menuntut perhatian ekstra pada isu-isu sensitif seperti privasi data dan keamanan informasi yang semakin rentan terhadap ancaman digital. Dengan demikian, pemahaman mendalam tentang bagaimana mengelola proses transformasi ini menjadi sangat penting.

Berdasarkan uraian diatas dapat kita simpulkan bahwa transformasi sektor industri 4.0 ke industri 5.0 dapat menjadi peluang atau ancaman terhadap Kabupaten Sanggau. Ancaman terbesar dengan revolusi industry ini ialah Kabupaten Sanggau yang saat ini masih bertumpu terhadap industry. Sumber Daya Alam akan terancam, menginat kecerdasan buatan yang mungkin diterapkan pada sektor- sektor tertentu akan memberikan dampak terhadap kebutuhan tenaga kerja semakin berkurang dan digantikan dengan komputer maupun mesin. Dalam perspektif sektor bisnis dan

pengusaha Revolusi Industri 5.0 justru menguntungkan jangka panjang, hal tersebut dikarenakan dengan jumlah tenaga kerja yang dapat digantikan fungsi dan perannya oleh komputer.

Oleh karena itu berikut merupakan beberapa poin-poin penting sebagai bentuk persiapan Kabupaten Sanggau dalam menghadapi Revolusi Industri 5.0.

Sektor UM dan Industri yang akan berdampak secara signifikan adalah mulai merubah mindset konvensional ke modern berbasis dengan teknologi. Hal tersebut tentunya untuk dapat bertahan dimana dengan terbukanya pasar seluas mungkin, maka pesaing tidak hanya dari Kabupaten Sanggau, namun juga dari seluruh Indonesia bahkan manca negara. Sehingga disaat tidak dapat memanfaatkan ancaman menjadi peluang yang terjadi akan tergerus. Khususnya untuk sektor industri padat karya, sebelum berencana menggantikan SDM menjadi mesin atau teknologi setidaknya melakukan kajian terlebih dahulu sehingga menemukan titik equilibrium antara sumber daya manusia dengan teknologi. Sehingga meminimalisir mengorbankan SDM khususnya masyarakat Kabupaten Sanggau.

Adapun isu- isu strategis Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sanggau yang merupakan permasalahan yang akan diselesaikan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan (tahun 2025 – 2029) yang merupakan keberlanjutan dari permasalahan yang belum dapat diselesaikan pada periode 5 tahun sebelumnya tahun 2019-2024 dan perlu penyelesaian secara bertahap, yaitu :

1. Lemahnya daya saing industri kecil dan menengah;
2. Sistem pembinaan industri kecil dan menengah yang belum komprehensif dan analistik;
3. Belum optimalnya pembenahan infrastruktur pasar;
4. Belum optimalnya pengendalian harga barang kebutuhan pokok dan barang penting;
5. Terbatasnya pelaku usaha yang berorientasi ekspor;
6. Belum optimalnya penyelenggaraan perlindungan konsumen;
7. Terbatasnya kualitas sumber daya manusia pembina dan pengurus koperasi serta pelaku Usaha Mikro; dan
8. Belum optimalnya pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro.

2.4 Telaah Pokok-pokok Pikiran DPR

Telaah Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) DPRD adalah kajian sistematis terhadap permasalahan pembangunan daerah yang bersumber dari aspirasi masyarakat (dijaring melalui reses, reses, atau Musrenbang). Pelaksanaan Musrenbang di Kecamatan se Kabupaten yang sekaligus merupakan kegiatan rutin tahunan yang dilaksanakan dalam rangka menjaring usulan kegiatan, permasalahan, peluang, solusi yang ingin dicapai, serta penyamaan persepsi dalam rangka pengembangan sektor industri perdagangan Koperasi serta Usaha Mikro di Kabupaten Sanggau. Usulan-usulan tersebut kemudian ditelaah serta disusun menjadi kegiatan pada Rencana Kerja Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sanggau Pada Tahun 2027. Namun berdasarkan hasil penelaahan, terdapat kendala yang ditemui sehingga usulan-usulan tersebut selanjutnya tidak hanya diarahkan untuk masuk pada Renja Perangkat daerah namun juga diusulkan pada Musrenbang Provinsi, maupun mekanisme DAK Kementerian. Dengan minimnya penganggaran Perangkat Daerah sehingga usulan tersebut selanjutnya diarahkan untuk diusulkan melalui mekanisme Musrenbang Provinsi dan DAK Kementerian; seperti Usulan Pembangunan / Revitalisasi pasar, Pelatihan Manajemen Perkoperasian Bagi Gerakan Koperasi dan Peningkatan Kapasitas SDM Koperasi dan UM diarahkan pada mekanisme DAK Kementerian sesuai dengan persyaratan pengusulan.

Dalam kesesuaian usulan tersebut dikaitkan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sanggau, yang disajikan dalam tabel 2.23 sebagai berikut.



Tabel 2. 23 USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN DARI PEMANGKU KEPENTINGAN TAHUN 2027 KABUPATEN SANGGAU

Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sanggau

No.	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				
1.1	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UM)				
1.1.1	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan				
1.1.1.1	Peningkatan Kompetensi dan Kapasitas SDM Usaha Mikro dan Kecil (UMK)/Pelaku Usaha	Dusun Balaikarangan, Desa Balaikarangan, Kec. Sekayam, Kab. Sanggau	Perlunya Peningkatan Pemberdayaan di Masyarakat (Fasitasi Mesin Peralatan Bagi IKM atau Kelompok Usaha), Bantuan Peralatan Masak Majelis Taklim Khoirunnisa	1 Paket	Pokir
1.1.1.2		Dusun Bali Manunggal, Desa Persiapan Seguna, Kec. Mukok, Kab. Sanggau	Perlunya Peningkatan Kapasitas dan kompetensi SDM para pelaku usaha, Pengadaan Alat Masak UM	1 Paket	Pokir
1.1.1.3		Kabupaten Sanggau, Kab. Sanggau	Perlunya Peningkatan Pemberdayaan di Masyarakat (Fasilitasi Mesin Peralatan bagi IKM atau Kelompok Usaha), Pengadaan Mesin Cetak Batako	1 Paket	Pokir



No.	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
1.1.1.4		Kabupaten Sanggau, Kab. Sanggau	Perlunya Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi SDM para pelaku usaha, Pengadaan Mesin Digital Printing Outdoor	1 Paket	Pokir
1.1.1.5		Kec. Kapuas, Kabupaten Sanggau, Kab. Sanggau	Pentingnya Meningkatkan Kapasitas Produksi Usaha Industri Masyarakat	1 Paket	Pokir
2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN				
2.1	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI				
2.1.1	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota				
2.1.1.1	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	RT 01, RT 02, RT 03, RT 04 Dusun Tantang B Desa Maringin Jaya, Kecamatan Parindu, Kelurahan Maringin Jaya, Kab. Sanggau	Pemberdayaan industri dan peran serta masyarakat (Pengadaan alat/mesin pengolahan bagi IKM)	1 Paket	Aspirasi
2.1.1.2		Desa Malenggang, Kecamatan Sekayam, Kelurahan Melenggang, Kab. Sanggau	Pemberdayaan industri dan peran serta masyarakat (Pengadaan alat/mesin pengolahan bagi IKM)	1 Paket	Aspirasi
3	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN				



No.	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
3.1	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN				
3.1.1	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan				
3.1.1.1	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Rt 004 Dusun Hilir, Kecamatan Balai, Kelurahan Hilir, Kabupaten Sanggau	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan (Pembangunan, Rehabilitasi dan pemeliharaan Pasar)	1 Paket	
3.1.1.2		Dusun Beriang Rt 002, Kecamatan Beduai, Kelurahan Kasro Mego, Kabupaten Sanggau	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan (Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Pasar)	1 Paket	Aspirasi
3.1.1.3		Dusun Meliau Hilir, Kecamatan Meliau, Kelurahan Meliau Hilir, Kab. Sanggau	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan (Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Pasar)	1 Paket	Aspirasi

2.5 Inovasi bidang urusan dalam upaya memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Inovasi bidang urusan dalam (pemerintahan dalam negeri) bertujuan menghadirkan layanan yang lebih cepat, transparan, dan efisien. Hal ini diwujudkan melalui digitalisasi layanan administrasi, penyederhanaan birokrasi, penyediaan kanal pengaduan terpadu, serta jemput bola langsung ke masyarakat guna meningkatkan kepercayaan publik.

Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sanggau menghadirkan beberapa inovasi pelayanan publik. Terobosan utamanya meliputi portal pasar digital Gerai Samer (www.geraisamer.com) dan sistem pendataan industri SAPPU-IN, serta fasilitasi legalitas gratis untuk membantu pelaku usaha.

Selain inovasi yang berorientasi pada pelayanan kepada masyarakat, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sanggau juga mengembangkan inovasi internal organisasi yang diberi nama **TUNAS KANGKUNG (Tanaman Inisiatif ASN Kantor dan Lingkungan)**. Inovasi ini merupakan gerakan partisipatif seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam menciptakan lingkungan kantor yang bersih, hijau, asri, dan produktif melalui kegiatan penghijauan serta pemanfaatan lahan kosong di lingkungan kantor.

Pelaksanaan **TUNAS KANGKUNG** tidak hanya bertujuan memperindah lingkungan kerja, tetapi juga membangun budaya kerja yang kolaboratif, meningkatkan kepedulian ASN terhadap pelestarian lingkungan, serta mengoptimalkan pemanfaatan lahan sebagai media edukasi mengenai ketahanan pangan dan penghijauan. Setiap bidang dan subbagian diberikan tanggung jawab untuk melakukan penanaman, pemeliharaan, dan pengembangan area tanaman secara berkelanjutan sehingga tercipta rasa memiliki terhadap lingkungan kerja.

Melalui inovasi ini, diharapkan terwujud lingkungan kerja yang sehat, nyaman, dan produktif, sekaligus mendukung penerapan nilai-nilai dasar ASN BerAKHLAK, khususnya nilai kolaboratif, harmonis, adaptif, dan berorientasi pelayanan. Keberadaan lingkungan kantor yang tertata dan hijau juga memberikan kenyamanan bagi masyarakat yang datang memperoleh pelayanan, sehingga secara tidak langsung meningkatkan kualitas pelayanan publik yang diberikan oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sanggau.



Dengan berbagai inovasi yang telah dikembangkan, baik yang berorientasi pada pelayanan kepada masyarakat maupun penguatan tata kelola internal organisasi, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sanggau berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik, mendorong tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, inovatif, serta mendukung terwujudnya birokrasi yang profesional dan berkelanjutan.

Dari penjelasan – penjelasan yang telah disampaikan diatas baik dari Kepegawaian, Keuangan / Anggaran, Sarana dan prasarana belum banyak terjadi perubahan dibandingkan tahun- tahun sebelumnya, seperti Pegawai merupakan unsur pelaksana program dan kegiatan yang dilaksanakan Perangkat Daerah. Jumlah Pegawai yang dinilai masih kurang berdasarkan analisis jabatan karena kekuatan pegawai akan sangat berpengaruh terhadap kinerja dan pencapaian tujuan organisasi. Anggaran merupakan salah satu faktor penting dalam rangka pencapaian Visi dan Misi suatu organisasi, karena strategi yang telah ditetapkan tidak akan bisa terlaksana dengan baik dan utuh tanpa didukung anggaran yang cukup dan memadai. Saat ini karena keterbatasan anggaran daerah, anggaran yang tersedia untuk operasional kegiatan di Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sanggau juga masih dinilai terbatas, sehingga pimpinan membuat kebijakan dengan menginventarisir dan menseleksi seluruh program dan kegiatan yang ada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sanggau, Dalam rangka mendukung kinerja aparatur, keberadaan sarana dan prasarana kerja yang memadai sangat dibutuhkan. Secara umum keberadaan sarana dan prasarana kerja belum dapat dikatakan memadai. Dari kekurangan yang ada, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sanggau tetap konsisten menjalankan Tugas dan Fungsinya yang merupakan salah satu unsur pelaksanaan otonomi daerah yang dibentuk sesuai dengan Peraturan Bupati Sanggau Nomor 71 Tahun 2021, yang mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang perindustrian, perdagangan, koperasi dan usaha mikro berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan. Agar pelaksanaan tugas yang telah digariskan diatas berjalan dengan efektif dan terarah,

RKPD Tahun 2027 merupakan dokumen perencanaan yang telah disusun sebagai tahun ketiga pencapaian RPD 2025-2029 yang telah mengakomodir kegiatan-kegiatan dalam rangka pencapaian visi dan misi. RKPD Tahun 2027 dan



Renja Perangkat Daerah Tahun 2027 dimana dalam penyusunan tersebut diharapkan dapat memberikan dampak yang maksimal, adil dan merata bagi masyarakat dengan penganggaran yang efisien. RKPD Tahun 2027 dengan Renja Tahun 2027 yang dapat dilihat dari tabel 2.24 sebagai berikut:



**Tabel 2. 24 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AKHIR RKPD TAHUN 2027 DAN HASIL ANALISIS KEBUTUHAN 2027
KABUPATEN SANGGAU 2027**

No.	Rancangan Akhir RKPD 2027					Hasil Analisis Kebutuhan 2027					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I.	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					
I.1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH					
I.1.1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH					PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH					7.586.749.294,39
I.1.1.1	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					16.229.570,85
I.1.1.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kabupaten Sanggau	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	5.656.940,91	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kabupaten Sanggau	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	2.698.865,10	
I.1.1.1.2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kabupaten Sanggau	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	5.007.358,85	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kabupaten Sanggau	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	2.239.741,35	
I.1.1.1.3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kabupaten Sanggau	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	4.188.787,73	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kabupaten Sanggau	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	2.144.786,40	



I.1.1.1.4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kabupaten Sanggau	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	4.915.877,52	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kabupaten Sanggau	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	2.311.802,55	
I.1.1.1.5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kabupaten Sanggau	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	5.001.584,63	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kabupaten Sanggau	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	2.095.569,00	
I.1.1.1.6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kabupaten Sanggau	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Kinerja SKPD	1 Laporan	5.088.596,40	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kabupaten Sanggau	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Kinerja SKPD	1 Laporan	2.005.475,85	
I.1.1.1.7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kabupaten Sanggau	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	4.717.433,70	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kabupaten Sanggau	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	2.733.330,60	
I.1.1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				5.209.881.645,92					6.165.331.814,24	



I.2.1.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kabupaten Sanggau	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	37 Orang / Bulan	3.260.264.179,58	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kabupaten Sanggau	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	37 Orang / Bulan	5.956.534.475,78	
I.1.1.2.2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kabupaten Sanggau	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	14 Dokumen	1.731.562.003,98	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kabupaten Sanggau	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	14 Dokumen	-	
I.1.1.2.3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kabupaten Sanggau	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	202.628.304,00	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kabupaten Sanggau	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	200.160.000,00	
I.1.1.2.4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kabupaten Sanggau	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	8.112.843,60	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kabupaten Sanggau	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	4.461.179,91	
I.1.1.2.5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kabupaten Sanggau	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	3 Laporan	7.314.314,76	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kabupaten Sanggau	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	3 Laporan	4.176.158,55	



I.1.1.3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				46.178.629,46					32.964.098,40	
I.1.1.3.1	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Kabupaten Sanggau	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen	2.518.778,23	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Kabupaten Sanggau	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen	2.161.186,65	
I.1.1.3.2	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Kabupaten Sanggau	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen	20.105.730,00	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Kabupaten Sanggau	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen	20.400.000,00	
I.1.1.3.3	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kabupaten Sanggau	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	2.329.961,23	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kabupaten Sanggau	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	2.002.911,75	
I.1.1.3.4	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kabupaten Sanggau	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	21.224.160,00	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kabupaten Sanggau	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	8.400.000,00	
I.1.1.5	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				223.961.273,19					19.183.230,90	
I.1.1.5.1	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Kabupaten Sanggau	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta atribut kelengkapannya	60 Paket	-	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Kabupaten Sanggau	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta atribut kelengkapannya	60 Paket	-	
I.1.1.5.2	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kabupaten Sanggau	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	205.673.319,67	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kabupaten Sanggau	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	10.013.976,00	



I.1.1.5.3	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Kabupaten Sanggau	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	18.287.953,52	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Kabupaten Sanggau	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	9.169.254,90	
I.1.1.5.4	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kabupaten Sanggau	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti Pelatihan	15 Orang	-	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kabupaten Sanggau	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti Pelatihan	3 Orang	-	
I.1.1.6	Administrasi Umum Perangkat Daerah				244.877.642,30					103.464.612,00	
I.1.1.6.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kabupaten Sanggau	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	9 Paket	70.950.150,83	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kabupaten Sanggau	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	9 Paket	12.225.107,10	
I.1.1.6.2	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kabupaten Sanggau	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	13 Paket	100.154.959,13	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kabupaten Sanggau	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	13 Paket	31.753.098,00	
I.1.1.6.3	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kabupaten Sanggau	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	4 Paket	27.427.914,34	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kabupaten Sanggau	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	4 Paket	15.011.406,90	
I.1.1.6.4	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kabupaten Sanggau	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	12 Dokumen	-	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kabupaten Sanggau	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	Dokumen	-	



I.1.1.6.5	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kabupaten Sanggau	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	120 Laporan	46.344.618,00	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kabupaten Sanggau	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	120 Laporan	44.475.000,00	
I.1.1.7	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				196.393.518,48					179.462.375,28	
I.1.1.7.1	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kabupaten Sanggau	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang diadakan	1 Unit	170.417.520,00	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kabupaten Sanggau	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang diadakan	1 Unit	163.800.000,00	
I.1.1.7.2	Pengadaan Mebel	Kabupaten Sanggau	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Unit	2.852.464,68	Pengadaan Mebel	Kabupaten Sanggau	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	15 Unit	-	
I.1.1.7.3	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kabupaten Sanggau	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	23.123.533,80	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kabupaten Sanggau	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	15.662.375,28	
I.1.1.8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				176.505.904,39					146.348.227,89	
I.1.1.8.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kabupaten Sanggau	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	5.056.344,00	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kabupaten Sanggau	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	4.860.000,00	
I.1.1.8.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kabupaten Sanggau	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	3 Laporan	152.728.758,85	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kabupaten Sanggau	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	3 Laporan	135.744.090,00	



I.1.1.8.3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kabupaten Sanggau	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	1 Laporan	18.720.801,54	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kabupaten Sanggau	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	1 Laporan	5.744.137,89	
I.1.1.9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				136.363.303,26					97.254.650,00	
I.1.1.9.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kabupaten Sanggau	Jumlah Kendaraan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayar Pajaknya	1 Unit	31.222.404,00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kabupaten Sanggau	Jumlah Kendaraan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayar Pajaknya	1 Unit	16.650.000,00	
I.1.1.9.2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kabupaten Sanggau	Jmlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan Perizinannya	2 Unit	74.883.986,46	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kabupaten Sanggau	Jmlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan Perizinannya	2 Unit	59.514.650,00	
I.1.1.9.3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kabupaten Sanggau	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	51 Unit	30.256.912,80	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kabupaten Sanggau	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	51 Unit	21.090.000,00	
I.1.1.9.4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kabupaten Sanggau	Jumlah Gedung kantor dan Bangunan lainnya yang dipelihara/Direhabilitasi	unit	-	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kabupaten Sanggau	Jumlah Gedung kantor dan Bangunan lainnya yang dipelihara/Direhabilitasi	unit	-	
I.1.2	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI				107.494.590,63					90.000.603,80	



I.1.2.1	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota				107.494.590,63					90.000.603,80	
I.1.2.1.1	Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	Kabupaten Sanggau	Jumlah Koperasi yang Dilakukan Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	Unit Usaha	-	Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	Kabupaten Sanggau	Jumlah Koperasi yang Dilakukan Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	Unit Usaha	-	
I.1.2.1.2	Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Sanggau	Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan	35 Unit Usaha	107.494.590,63	Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Sanggau	Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan	35 Unit Usaha	90.000.603,80	
I.1.3	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI				17.567.215,38					4.999.846,86	
I.1.3.1	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota				17.567.215,38					4.999.846,86	
I.1.3.1.1	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Kabupaten Sanggau	Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan	20 Unit Usaha	17.567.215,38	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Kabupaten Sanggau	Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan	20 Unit Usaha		
I.1.3.1.2	Penilaian Kesehatan Koperasi Meliputi Tata Kelola, Profil Risiko, Kinerja Keuangan, dan Permodalan	Kabupaten Sanggau	Jumlah Koperasi yang Diberikan Penilaian Kesehatan	Unit Usaha	-	Penilaian Kesehatan Koperasi Meliputi Tata Kelola, Profil Risiko, Kinerja Keuangan, dan Permodalan	Kabupaten Sanggau	Jumlah Koperasi yang Diberikan Penilaian Kesehatan	Unit Usaha	4.999.846,86	



I.1.3	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN				0					-	
I.1.3.1	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota				0					-	
I.1.3.1.1	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Kabupaten Sanggau	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	Orang	-	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Kabupaten Sanggau	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	Orang	-	
I.1.4	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI				15.000.000					4.999.119,23	
I.1.4.1	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota				15.000.000					4.999.119,23	
I.1.4.1.1	Fasilitasi Kemitraan Koperasi yang Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Sanggau	Jumlah Koperasi yang Difasilitasi Kemitraannya	Unit Usaha	-	Fasilitasi Kemitraan Koperasi yang Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Sanggau	Jumlah Koperasi yang dipulihkan usahanya	Unit Usaha	4.999.119,23	
I.1.4.1.2	Pemulihan Usaha Koperasi yang Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Sanggau	Jumlah Koperasi yang dipulihkan usahanya	Unit Usaha	-	Pemulihan Usaha Koperasi yang Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Sanggau	Jumlah Koperasi yang dipulihkan usahanya	Unit Usaha	-	
I.1.4.1.3	Fasilitasi Pelaporan Koperasi yang Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Sanggau	Jumlah Koperasi yang Difasilitasi Pelaporannya	Unit Usaha	-	Fasilitasi Pelaporan Koperasi yang Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Sanggau	Jumlah Koperasi yang Difasilitasi Pelaporannya	Unit Usaha	-	



I.1.4.1.4	Pembinaan dan Pendampingan Bagi Keluarga dan Kelompok Masyarakat yang Akan Membentuk Koperasi Dalam Pengembangan Ekonomi	Kabupaten Sanggau	Jumlah Pembinaan dan/atau Pendampingan yang dilaksanakan	5 Kelompok Masyarakat	5.000.000,00	Pembinaan dan Pendampingan Bagi Keluarga dan Kelompok Masyarakat yang Akan Membentuk Koperasi Dalam Pengembangan Ekonomi	Kabupaten Sanggau	Jumlah Pembinaan dan/atau Pendampingan yang dilaksanakan	5 Kelompok Masyarakat	-	Pagu Hasil Diskusi Rakortekrenbang 2026 Rp 5,000,000
I.1.4.1.5	Pemberdayaan Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Sanggau	Jumlah Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota	3 Unit Usaha	10.000.000,00	Pemberdayaan Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Sanggau	Jumlah Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota	3 Unit Usaha	-	Pagu Hasil Diskusi Rakortekrenbang 2026 Rp 10,000,000
I.1.5	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)				1.822.666.278,00					726.511.144,94	
I.1.5.1	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan				1.822.666.278,00					726.511.144,94	
I.1.5.1.1	Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	Kabupaten Sanggau	Jumlah Usaha Mikro yang Telah Mendapatkan Perizinan	Unit Usaha	-	Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	Kabupaten Sanggau	Jumlah Usaha Mikro yang Telah Mendapatkan Perizinan	Unit Usaha	-	
I.1.5.1.2	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Kabupaten Sanggau	Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro	44 Unit Usaha	181.887.352,68	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Kabupaten Sanggau	Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro	44 Unit Usaha	-	



I.1.5.1.3	Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	Kabupaten Sanggau	Jumlah SDM yang Telah Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	Orang	-	Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	Kabupaten Sanggau	Jumlah SDM yang Telah Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	Orang	-	
I.1.5.1.4	Pemulihan Usaha Mikro	Kabupaten Sanggau	Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi	Unit Usaha	-	Pemulihan Usaha Mikro	Kabupaten Sanggau	Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi	Unit Usaha	-	
I.1.5.1.5	Fasilitasi Sertifikasi dan Standardisasi Usaha Mikro	Kabupaten Sanggau	Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi	28 Unit Usaha	19.258.423,09	Fasilitasi Sertifikasi dan Standardisasi Usaha Mikro	Kabupaten Sanggau	Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi	28 Unit Usaha	-	
I.1.5.1.6	Penyusunan Basis Data Usaha Mikro	Kabupaten Sanggau	Jumlah Unit Usaha Mikro Terdata	120 Unit Usaha	26.529.692,34	Penyusunan Basis Data Usaha Mikro	Kabupaten Sanggau	Jumlah Unit Usaha Mikro Terdata	120 Unit Usaha	-	
I.1.5.1.7	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan	Kabupaten Sanggau	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Usaha Mikro dan Kewirausahaan	60 Orang	1.494.990,809,89	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan	Kabupaten Sanggau	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Usaha Mikro dan Kewirausahaan	60 Orang	-	



I.1.5.1.8	Peningkatan Kompetensi dan Kapasitas SDM Usaha Mikro dan Kecil (UMK)/Pelaku Usaha	Kabupaten Sanggau	Jumlah pelaku usaha yang memperoleh peningkatan kompetensi dan kapasitas SDM Usaha Mikro dan Kecil (UMK)	20 Orang	50.000.000,00	Peningkatan Kompetensi dan Kapasitas SDM Usaha Mikro dan Kecil (UMK)/Pelaku Usaha	Kabupaten Sanggau	Jumlah pelaku usaha yang memperoleh peningkatan kompetensi dan kapasitas SDM Usaha Mikro dan Kecil (UMK)	20 orang	125.947.262,80	
I.1.5.1.9	Pembinaan dan Fasilitasi Perizinan Berusaha bagi UMKM	Kabupaten Sanggau	Jumlah UMKM yang terfasilitasi Perizinan Berusaha	Unit Usaha		Pembinaan dan Fasilitasi Perizinan Berusaha bagi UMKM	Kabupaten Sanggau	Jumlah UMKM yang terfasilitasi Perizinan Berusaha	20 Unit usaha	50.551.409,00	
I.1.5.1.10	Pembinaan dan Fasilitasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah kepada pelaku UMKM	Kabupaten Sanggau	Jumlah UMKM yang memperoleh pembinaan dan fasilitasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	Unit Usaha		Pembinaan dan Fasilitasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah kepada pelaku UMKM	Kabupaten Sanggau	Jumlah UMKM yang memperoleh pembinaan dan fasilitasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	10 Unit Usaha	550.012.473,14	
I.1.5.1.11	Pembinaan dan Fasilitasi Pelaku Usaha dalam Pembentukan Badan Hukum Berusaha *PROSN/TEMATIK Pengarusutamaan Gender	Kabupaten Sanggau	Jumlah Pelaku Usaha yang terfasilitasi Pembentukan Badan Hukum Berusaha	10 Orang	-	Pembinaan dan Fasilitasi Pelaku Usaha dalam Pembentukan Badan Hukum Berusaha *PROSN/TEMATIK Pengarusutamaan Gender	Kabupaten Sanggau	Jumlah Pelaku Usaha yang terfasilitasi Pembentukan Badan Hukum Berusaha	10 Orang	-	Pagu Anggaran Menyesuaikan Rakortekrenbang 2026
I.1.5.1.12	Fasilitasi Integrasi Basis Data Tunggal UMKM	Kabupaten Sanggau	Jumlah Kegiatan Hasil Fasilitasi Integrasi dan Sinkronisasi Data UMKM	1 Kegiatan	-	Fasilitasi Integrasi Basis Data Tunggal UMKM	Kabupaten Sanggau	Jumlah Kegiatan Hasil Fasilitasi Integrasi dan Sinkronisasi Data UMKM	1 Kegiatan	-	Pagu Anggaran Menyesuaikan Rakortekrenbang 2026



I.1.5.1.13	Pembinaan dan Fasilitasi Sertifikasi dan Standardisasi Produk *PROSN/TEMATIKI Ekonomi Syariah	Kabupaten Sanggau	Jumlah UMKM yang dibina dan difasilitasi dalam mengakses Sertifikasi dan Standardisasi Produk	28 Unit Usaha	50.000.000,00	Pembinaan dan Fasilitasi Sertifikasi dan Standardisasi Produk *PROSN/TEMATIKI Ekonomi Syariah	Kabupaten Sanggau	Jumlah UMKM yang dibina dan difasilitasi dalam mengakses Sertifikasi dan Standardisasi Produk	28 Unit Usaha	-	Pagu Hasil Diskusi Rakortekre nbang 2026 Rp 150,000,000
I.1.6	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM				0					-	
I.1.6.1	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil				0					-	
I.1.6.1.1	Pengembangan Usaha Mikro	Kabupaten Sanggau	Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi	Unit Usaha	-	Pengembangan Usaha Mikro	Kabupaten Sanggau	Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi	Unit Usaha	-	
I.1.6.1.2	Penumbuhan dan Pengembangan Kewirausahaan	Kabupaten Sanggau	Jumlah yang Difasilitasi	Orang	-	Penumbuhan dan Pengembangan Kewirausahaan	Kabupaten Sanggau	Jumlah yang Difasilitasi	Orang	-	
II	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN				3.252.718,430,23					568.570.478,45	
II.1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN				2.255.423,440,62					152.990.065,35	
II.1.1	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN				22.638.100,01					9.998.086,50	
II.1.1.1	Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan				0					-	



II.1.1.1.1	Fasilitasi pembinaan dan pemantauan kepemilikan Nomor Induk Berusaha (NIB) untuk distributor, agen, grosir/perkulakan dan toko swalayan melalui sistem berusaha melalui Sistem Elektronik	Kabupaten Sanggau	Jumlah laporan hasil pembinaan dan pemantauan kepemilikan Nomor Induk Berusaha (NIB) untuk distributor, agen, grosir/perkulakan dan toko swalayan melalui Sistem Perizinan Berusaha melalui Sistem Elektronik	Laporan	-	Fasilitasi pembinaan dan pemantauan kepemilikan Nomor Induk Berusaha (NIB) untuk distributor, agen, grosir/perkulakan dan toko swalayan melalui sistem berusaha melalui Sistem Elektronik	Kabupaten Sanggau	Jumlah laporan hasil pembinaan dan pemantauan kepemilikan Nomor Induk Berusaha (NIB) untuk distributor, agen, grosir/perkulakan dan toko swalayan melalui Sistem Perizinan Berusaha melalui Sistem Elektronik	Laporan	-
II.1.1.2	Penerbitan Tanda Daftar Gudang				22.638.100,01					9.998.086,50
II.1.1.2.1	Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Kabupaten Sanggau	Jumlah Dokumen Tanda Daftar Gudang	1 Dokumen	22.638.100,01	Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Kabupaten Sanggau	Jumlah Dokumen Tanda Daftar Gudang	1 Dokumen	9.998.086,50
II.1.2	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN				1.524.680.648,59					27.055.467,00
II.1.2.1	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan				1.418.890.331,65					27.055.467,00
II.1.2.1.1	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Kabupaten Sanggau	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan	3 Unit	1.418.890.331,65	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Kabupaten Sanggau	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan	3 Unit	27.055.467,00
II.1.2.2	Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya				105.790.316,94					-



II.1.2. 2.1	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Kabupaten Sanggau	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	20 Dokumen	105.790.316,94	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Kabupaten Sanggau	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	20 Dokumen	-	
II.1.3	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING				276.777.749,87					68.607.825,50	
II.1.3.1	Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				40.805.807,23					19.163.774,60	
II.1.3.1.1	Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Kabupaten Sanggau	Jumlah Laporan Pengendalian Stok atau Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan barang penting ditingkat agen dan pasar rakyat	1 Laporan	40.805.807,23	Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Kabupaten Sanggau	Jumlah Laporan Pengendalian Stok atau Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan barang penting ditingkat agen dan pasar rakyat	1 Laporan	19.163.774,60	
II.1.3.2	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota				235.971.942,64					49.444.050,90	
II.1.3.2.1	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Kabupaten Sanggau	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	1 Laporan	172.210.763,84	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota		Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	1 Laporan		



II.1.3.2.2	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Kabupaten Sanggau	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	48 Laporan	55.446.302,00	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Kabupaten Sanggau	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	48 Laporan	24.560.592,60	
II.1.3.2.3	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Kabupaten Sanggau	Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	1 Laporan	8.314.876,80	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota		Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	1 Laporan	24.883.458,30	
II.1.3.3	Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				0					-	
II.1.3.3.1	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Kabupaten Sanggau	Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Laporan	-	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Kabupaten Sanggau	Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90%	Laporan	-	
			dengan Realisasi Minimal 90%								



II.1.4	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR				31.918.513,79					-	
II.1.4.1	Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota				31.918.513,79					-	
II.1.4.1.1	Pembinaan dan Pengembangan Usaha Produk Ekspor Unggulan Kabupaten/Kota	Kabupaten Sanggau	Jumlah Usaha Produk Ekspor Unggulan yang dibina	Pelaku Usaha	-	Pembinaan dan Pengembangan Usaha Produk Ekspor Unggulan Kabupaten/Kota	Kabupaten Sanggau	Jumlah Usaha Produk Ekspor Unggulan yang dibina	Pelaku Usaha	-	
II.1.4.1.2	Pameran Dagang Nasional	Kabupaten Sanggau	Jumlah Pelaku Usaha yang difasilitasi dalam Pameran Dagang	Pelaku Usaha	-	Pameran Dagang Nasional	Kabupaten Sanggau	Jumlah Pelaku Usaha yang difasilitasi dalam Pameran Dagang	Pelaku Usaha	-	
II.1.4.1.3	Pameran Dagang Lokal	Kabupaten Sanggau	Jumlah Pelaku Usaha yang difasilitasi dalam Pameran Dagang Lokal	Pelaku Usaha	-	Pameran Dagang Lokal	Kabupaten Sanggau	Jumlah Pelaku Usaha yang difasilitasi dalam Pameran Dagang Lokal	Pelaku Usaha	-	
II.1.4.1.4	Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan	Kabupaten Sanggau	Jumlah Pelaku Usaha yang difasilitasi dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan	10 Pelaku Usaha	31.918.513,79	Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan	Kabupaten Sanggau	Jumlah Pelaku Usaha yang difasilitasi dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan	10 Pelaku Usaha	-	Pagu Anggaran Menyesuaikan Rakortekrenbang 2026
II.1.4.1.5	Pembinaan Pelaku Usaha Ekspor	Kabupaten Sanggau	Jumlah Pelaku Usaha yang dibina	Pelaku Usaha	-	Pembinaan Pelaku Usaha Ekspor	Kabupaten Sanggau	Jumlah Pelaku Usaha yang dibina	Pelaku Usaha	-	
II.1.5	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN				399.408.428,36					47.328.686,35	
II.1.5.1	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan				399.408.428,36					47.328.686,35	



II.1.5.1.1	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Kabupaten Sanggau	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang	240 Unit	370.393.917,49	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Kabupaten Sanggau	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang	250 Unit	39.831.089,60	
II.1.5.1.2	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	Kabupaten Sanggau	Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang dibina	40 Orang	29.014.510,87	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	Kabupaten Sanggau	Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang dibina	40 Orang	7.497.596,75	
II.2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN				997.294.989,61					415.580.413,10	
II.2.1	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI				933.723.497,84					379.793.753,30	
II.2.1.1	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota				933.723.497,84					379.793.753,30	
II.2.1.1.1	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Kabupaten Sanggau	Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri	1 Dokumen	150.000.000,00	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Kabupaten Sanggau	Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri	1 Dokumen	-	Pagu Hasil Diskusi Rakortekre nbang 2026 Rp 150.000,000
II.2.1.1.2	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Kabupaten Sanggau	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan, Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Dokumen	-	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Kabupaten Sanggau	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan, Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Dokumen	-	



II.2.1.1.3	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Kabupaten Sanggau	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	1 Dokumen	176.675.583,22	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Kabupaten Sanggau	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	1 Dokumen	11.520.645,00	
II.2.1.1.4	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Kabupaten Sanggau	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	1 Dokumen	247.047.914,62	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Kabupaten Sanggau	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	1 Dokumen	88.081.898,10	
II.2.1.1.5	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Kabupaten Sanggau	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	2 Dokumen	360.000.000,00	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Kabupaten Sanggau	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	2 Dokumen	280.191.210,20	
II.2.1.1.6	Evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Kabupaten Sanggau	Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Dokumen	-	Evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Kabupaten Sanggau	Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Dokumen	-	



	Pelaksanaan Pengawasan Jaminan Produk Halal (JPH) di level Kabupaten/Kota	Kabupaten Sanggau	Jumlah objek pengawasan jaminan produk halal yang dapat diawasi - Jumlah program pengawasan Jaminan produk halal yang dapat diimplementasikan	2 Dokumen	-	Pelaksanaan Pengawasan Jaminan Produk Halal (JPH) di level Kabupaten/Kota	Kabupaten Sanggau	Jumlah objek pengawasan jaminan produk halal yang dapat diawasi - Jumlah program pengawasan Jaminan produk halal yang dapat diimplementasikan	2 Dokumen	-	Pagu Anggaran Menyesuaikan
II.2.2	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA				50000000					23.692.425,00	
II.2.2.1	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPIU), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota				50000000					23.692.425,00	
II.2.2.1.1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota	Kabupaten Sanggau	Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha industri dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah yang berlokasi di satu Kab./Kota sepanjang merupakan Penanaman Modal Dalam Negeri dan selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat	1 Dokumen	-	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota	Kabupaten Sanggau	Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha industri dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah yang berlokasi di satu Kab./Kota sepanjang merupakan Penanaman Modal Dalam Negeri dan selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat	1 Dokumen	12.411.900,00	



II.2.2.1.2	Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Base Approach (OSS RBA)	Kabupaten Sanggau	Jumlah dokumen Laporan Verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko untuk bidang usaha sektor perindustrian dengan tingkat risiko usaha Menengah-Tinggi dan Tinggi, melalui SIINas yang terintegrasi dengan Sistem OSS RBA, bagi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah, selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat	2 Dokumen	50.000.000,00	Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Base Approach (OSS RBA)	Kabupaten Sanggau	Jumlah dokumen Laporan Verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko untuk bidang usaha sektor perindustrian dengan tingkat risiko usaha Menengah-Tinggi dan Tinggi, melalui SIINas yang terintegrasi dengan Sistem OSS RBA, bagi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah, selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat	2 Dokumen	11.280.525,00	
II.2.3	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL				13.571.491,77					12.094.234,80	



II.2.3.1	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPU, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota				13.571.491,77					12.094.234,80	
II.2.3.1.1	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Kabupaten Sanggau	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Dokumen	-	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Kabupaten Sanggau	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Dokumen	4.381.350,00	
II.2.3.1.2	Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota melalui SIINas	Kabupaten Sanggau	Jumlah Dokumen Hasil Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas	2 Dokumen	13.571.491,77	Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota melalui SIINas	Kabupaten Sanggau	Jumlah Dokumen Hasil Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas	2 Dokumen	3.716.149,80	



II.2.3. 1.3	Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas	Kabupaten Sanggau	Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas	Dokumen	-	Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas	Kabupaten Sanggau	Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas	Dokumen	3.996.735,00	
Jumlah					11.484.185,010,98					8.155.319.772,84	



BAB III

TUJUAN DAN SASARAN

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN

Perumusan tujuan dan sasaran Jangka Menengah Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sanggau merupakan salah satu tahap penting penyusunan Dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah. Perumusan tujuan dan sasaran yang terukur akan memberikan arah yang jelas bagaimana mencapai kinerja yang diharapkan dan mengatasi permasalahan yang terjadi.

3.1 Tujuan dan Sasaran Rancangan Akhir Rencana Kerja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sanggau

3.1.1 Tujuan Jangka Menengah Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sanggau

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi. Adapun tujuan jangka menengah Dinas Perindustrian, Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sanggau Tahun 2025-2029 sebagai berikut :

1. Terwujudnya Pertumbuhan PDRB Sektor Strategis.
2. Terwujudnya Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah.

3.1.2 Sasaran Jangka Menengah Dinas Perindustrian, Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sanggau

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai dan rasional. Perumusan sasaran perlu memperhatikan indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi Dinas Perindustrian, Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten atau kelompok sasaran yang dilayani, serta profil pelayanan yang terkait dengan indikator kinerja.

Sasaran jangka menengah Dinas Perindustrian, Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Tahun 2025-2029 sebagai berikut :

1. Meningkatnya Produktivitas Perindustrian dan Perdagangan;
2. Meningkatnya Kualitas Koperasi dan UM; dan
3. Meningkatnya akuntabilitas kinerja DISPERINDAGKOP



Tabel 3.1 RUMUSAN TUJUAN, SASARAN RENCANA STRATEGIS DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, DAN USAHA MIKRO

Sasaran RPJMD	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Strategis	Target						Ket
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Meningkatnya Pertumbuhan PDRB Sektor Strategis	Terwujudnya Pertumbuhan PDRB Sektor Strategis	Meningkatnya Produktivitas Perindustrian dan Perdagangan	Kontribusi PDRB Industri terhadap PDRB Kabupaten Sanggau	17,30	17,47	18,22	18,96	19,71	17,30	
			Nilai perdagangan (milyar rupiah)	3.140,56	3.187,35	3.203,14	3.318,93	3.434,73	3.140,56	
		Meningkatnya Kualitas Koperasi dan UM	persentase Koperasi yang Sehat	2,50	5,00	7,50	10,00	12,50	2,50	
			Volume Usaha Koperasi (milyar rupiah)	696	699	703	706	710	696	
			Persentase UM yang meningkat Omzetnya	0,93	0,95	0,98	1,02	1,07	0,93	
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Pengawasan Internal Pemerintah Daerah	Terwujudnya Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	Meningkatnya akuntabilitas kinerja DISPERINDAGKOP	Nilai SAKIP DISPERINDAGKOP	66,95	67,5	68	68,5	69	66,95	



Berdasarkan Isu-isu penting, RKPD Tahun 2027 dan tujuan serta sasaran Tahun 2027, maka Rencana Kerja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sanggau pada tahun 2027 terdiri dari Program yang mencakup urusan perindustrian, urusan perdagangan dan urusan Koperasi serta program-program penunjang.

Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang mencakup urusan perindustrian, urusan perdagangan dan urusan Koperasi diantaranya sebagai berikut :

1. Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
 - 1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota, dengan Kegiatan sebagai berikut :
 - a) Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah; dengan Sub Kegiatan sebagai berikut :
 1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;
 2. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD;
 3. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD;
 4. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD;
 5. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD;
 6. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD; dan
 7. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
 - b) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, dengan Sub Kegiatan sebagai berikut :
 1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;
 2. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN;
 3. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengajuan / Verifikasi Keuangan SKPD;
 4. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD; dan
 5. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD.
 - c) Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah, dengan Sub Kegiatan sebagai berikut :



1. Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD;
 2. Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD;
 3. Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD; dan
 4. Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD.
- d) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, dengan Sub Kegiatan sebagai berikut :
1. Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya
 2. Pendataan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian; dan
 3. Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai.
 4. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
- e) Administrasi Umum Perangkat Daerah, dengan Sub Kegiatan sebagai berikut :
1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;
 2. Penyediaan Bahan Logistik Kantor;
 3. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan;
 4. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan; dan
 5. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.
- f) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
1. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 2. Pengadaan Mebel; dan
 3. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya.
- g) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan Sub Kegiatan sebagai berikut :
1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat;
 2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik; dan
 3. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.
- h) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah; dengan Sub Kegiatan sebagai berikut :



1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan.
 2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan;
 3. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya; dan
 4. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.
- 2) Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi, dengan Kegiatan sebagai berikut :
- a) Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota, dengan Sub Kegiatan sebagai berikut :
 1. Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi; dan
 2. Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya daerah Kabupaten/Kota.
- 3) Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi, dengan Kegiatan sebagai berikut :
- a) Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam / Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota, dengan Sub Kegiatan sebagai berikut :
 1. Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota; dan
 2. Penilaian Kesehatan Koperasi Meliputi Tata Kelola, Profil Risiko, Kinerja Keuangan, dan Permodalan.
- 4) Program Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian, dengan Kegiatan sebagai berikut :
- a) Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota, dengan Sub Kegiatan sebagai berikut :
 1. Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi.
- 5) Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi, dengan Kegiatan sebagai berikut :



- a) Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota, dengan Sub Kegiatan sebagai berikut :
 - 1. Pembinaan dan Pendampingan Bagi Keluarga dan Kelompok Masyarakat yang Akan Membentuk Koperasi Dalam Pengembangan Ekonomi (Sub kegiatan baru);
 - 2. Fasilitasi Kemitraan Koperasi yang Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota (Sub kegiatan baru);
 - 3. Pemulihan Usaha Koperasi yang Keanggotannya Daerah Kabupaten / Kota; dan
 - 4. Fasilitasi Pelaporan Koperasi yang Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota.
 - 5. Pemberdayaan Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota (Sub kegiatan baru).
- 6) Program Pemberdayaan Usaha Mikro (UM), dengan Kegiatan sebagai berikut :
 - a) Pemberdayaan Usaha Mikro yang dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan, dengan Sub Kegiatan sebagai berikut :
 - 1. Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro;
 - 2. Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro;
 - 3. Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro;
 - 4. Pemulihan Usaha Mikro;
 - 5. Fasilitasi Sertifikasi dan Standardisasi Usaha Mikro;
 - 6. Penyusunan Basis Data Usaha Mikro; dan
 - 7. Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan.
 - 8. Peningkatan Kompetensi dan Kapasitas SDM Usaha Mikro dan Kecil (UMK)/Pelaku Usaha (Sub kegiatan baru);



9. Pembinaan dan Fasilitasi Pelaku Usaha dalam Pembentukan Badan Hukum Berusaha (Sub kegiatan baru);
 10. Fasilitasi Integrasi Basis Data Tunggal UMKM (Sub kegiatan baru);
 11. Pembinaan dan Fasilitasi Sertifikasi dan Standardisasi Produk (Sub kegiatan baru).
- 7) Program Pengembangan UMKM, dengan Kegiatan sebagai berikut :
- a) Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil, dengan Sub Kegiatan sebagai berikut :
 1. Pengembangan Usaha Mikro; dan
 2. Penumbuhan dan Pengembangan Kewirausahaan.
2. Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan
- 1) Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan, dengan Kegiatan sebagai berikut
 - a) Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Izin Usaha Toko Swalayan, dengan Sub Kegiatan sebagai berikut :
 1. Fasilitasi Pembinaan dan Pemantauan Kepemilikan Nomor Induk Berusaha (NIB) untuk Distributor, Agen, Grosir/Perkulakan dan Toko Swalayan Melalui Sistem Berusaha Melalui Sistem Elektronik.
 - b) Penerbitan Tanda Daftar Gudang, dengan Sub Kegiatan sebagai berikut:
 1. Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang.
 - 2) Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan, dengan Kegiatan sebagai berikut :
 - a) Pembangunan dan Pengelolaan Distribusi Perdagangan, dengan Sub Kegiatan sebagai berikut :
 1. Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan.
 - b) Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya, dengan Sub Kegiatan sebagai berikut :
 1. Pembinaan dan Pengendalian Pengelola sarana Distribusi Perdagangan.
 - 3) Program Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting, dengan Kegiatan sebagai berikut :



- a) Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota, dengan Sub Kegiatan sebagai berikut :
 - 1. Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat
- b) Pengendalian Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota, dengan Sub Kegiatan sebagai berikut :
 - 1. Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota; dan
 - 2. Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam System Informasi Perdagangan
 - 3. Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota.
- c) Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota, dengan Sub Kegiatan sebagai berikut :
 - 1. Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi.
- 4) Program Pengembangan Ekspor, dengan Kegiatan sebagai berikut :
 - a) Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota, dengan Sub Kegiatan sebagai berikut :
 - 1. Pameran Dagang Nasional;
 - 2. Pameran Dagang Lokal
 - 3. Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan; dan
- 5) Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen, dengan Kegiatan sebagai berikut :
 - a) Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang dan Pengawasan, dengan Sub Kegiatan sebagai berikut :
 - 1. Pelaksanaan Metrologi Legal, berupa Tera, Tera Ulang; dan
 - 2. Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal.



3. Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian

1) Program Perencanaan dan Pembangunan Industri, dengan Kegiatan sebagai berikut :

a) Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota, dengan Sub Kegiatan sebagai berikut :

1. Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota (Sub kegiatan baru);
2. Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri;
3. Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri;
4. Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri;
5. Koordinasi dan Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat (Sub kegiatan baru);
6. Evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri;
7. Pelaksanaan Pengawasan Jaminan Produk Halal (JPH) di Level Kabupaten/Kota (Sub kegiatan baru).

2) Program Pengendalian Izin usaha Industri Kabupaten/Kota, dengan Kegiatan sebagai berikut :

a) Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota, dengan Sub Kegiatan sebagai berikut :

1. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota, dan;
2. Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Base Approach (OSS RBA).



3) Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional, dengan Kegiatan sebagai berikut :

a) Penyediaan Informasi Industri untuk informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota, dengan Sub Kegiatan sebagai berikut :

1. Fasilitas Pengumpulan, Pengelolaan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas); dan
2. Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Kabupaten/Kota melalui SIINas.
3. Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas. (Sub Kegiatan Baru)

Adapun Rumusan Rencana Kerja Program dan Kegiatan, seperti tabel 3.2 berikut :



**Tabel 3. 2 RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2027 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2028
KABUPATEN SANGGAU**

Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sanggau

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan dan Sub Kegiatan				Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Rencana Tahun 2027 (Tahun Rencana 2027)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2028	
						Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			8.231.466.580,74				8.278.795.912,36
2	17				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH			8.231.466.580,74				8.393.795.912,36
2	17	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Ketersediaan Layanan Umum Penunjang Pemerintahan Bidang Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian		6.268.738.496,73				6.394.113.266,67
2	17	1	2.01		Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penjabaran Konsistensi Program Renstra ke dalam Renja		34.576.579,73				35.268.111,33
2	17	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kabupaten Sanggau	2 Dokumen	5.656.940,91		2 Dokumen	5.770.079,73
2	17	1	2.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kabupaten Sanggau	1 Dokumen	5.007.358,85		1 Dokumen	5.107.506,02
2	17	1	2.01	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kabupaten Sanggau	1 Dokumen	4.188.787,73		1 Dokumen	4.272.563,49
2	17	1	2.01	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Kabupaten Sanggau	1 Dokumen	4.915.877,52		1 Dokumen	5.014.195,07
2	17	1	2.01	5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Kabupaten Sanggau	1 Dokumen	5.001.584,63		1 Dokumen	5.101.616,32



Kode					Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Rencana Tahun 2027 (Tahun Rencana 2027)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2028	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	17	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Kinerja SKPD	Kabupaten Sanggau	1 Laporan	5.088.596,40			1 Laporan	5.190.368,33
2	17	1	2.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kabupaten Sanggau	4 Laporan	4.717.433,70			4 Laporan	4.811.782,37
2	17	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Laporan Keuangan SKPD sesuai Standar Akuntansi Pemerintah			5.209.881.645,92				5.314.079.278,84
2	17	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kabupaten Sanggau	37 Orang / Bulan	3.260.264.179,58			37 Orang / Bulan	3.325.469.463,17
2	17	1	2.02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kabupaten Sanggau	14 Dokumen	1.731.562.003,98			14 Dokumen	1.766.193.244,06
2	17	1	2.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kabupaten Sanggau	12 Dokumen	202.628.304,00			12 Dokumen	206.680.870,08
2	17	1	2.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kabupaten Sanggau	1 Laporan	8.112.843,60			1 Laporan	8.275.100,48
2	17	1	2.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Kabupaten Sanggau	3 Laporan	7.314.314,76			3 Laporan	7.460.601,05
2	17	1	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang dipergunakan dan yang tidak dipergunakan			46.178.629,46				47.102.202,05
2	17	1	2.03	1	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Kabupaten Sanggau	2 Dokumen	2.518.778,23			2 Dokumen	2.569.153,79
2	17	1	2.03	2	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Kabupaten Sanggau	2 Dokumen	20.105.730,00			2 Dokumen	20.507.844,60



Kode					Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Rencana Tahun 2027 (Tahun Rencana 2027)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2028	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	17	1	2.03	5	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kabupaten Sanggau	2 Laporan	2.329.961,23			2 Laporan	2.376.560,46
2	17	1	2.03	6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kabupaten Sanggau	2 Laporan	21.224.160,00			2 Laporan	21.648.643,20
2	17	1	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pelayanan Administrasi Kepegawaian			223.961.273,19				228.440.498,66
2	17	1	2.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta atribut kelengkapannya	Kabupaten Sanggau	60 Paket	-			60 Paket	-
2	17	1	2.05	3	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kabupaten Sanggau	1 Dokumen	205.673.319,67			1 Dokumen	209.786.786,06
2	17	1	2.05	5	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Kabupaten Sanggau	1 Dokumen	18.287.953,52			1 Dokumen	18.653.712,59
2	17	1	2.05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti Pelatihan	Kabupaten Sanggau	15 Orang	-			15 Orang	-
2	17	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pelayanan Kegiatan Administrasi Umum			244.877.642,30				249.775.195,14
2	17	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	Kabupaten Sanggau	9 Paket	70.950.150,83			9 Paket	72.369.153,84
2	17	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	Kabupaten Sanggau	13 Paket	100.154.959,13			13 Paket	102.158.058,31
2	17	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	Kabupaten Sanggau	4 Paket	27.427.914,34			4 Paket	27.976.472,63
2	17	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	Kabupaten Sanggau	12 Dokumen	-			12 Dokumen	-
2	17	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kabupaten Sanggau	120 Laporan	46.344.618,00			120 Laporan	47.271.510,36
2	17	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Kebutuhan Barang Milik Daerah yang disediakan			196.393.518,48				200.321.388,85
2	17	1	2.07	2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang diadakan	Kabupaten Sanggau	1 Unit	170.417.520,00			1 Unit	173.825.870,40



Kode					Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Rencana Tahun 2027 (Tahun Rencana 2027)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2028	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	17	1	2.07	5	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Kabupaten Sanggau	1 Unit	2.852.464,68			1 Unit	2.909.513,97
2	17	1	2.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kabupaten Sanggau	1 Unit	23.123.533,80			1 Unit	23.586.004,48
2	17	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pelayanan Kegiatan Administrasi Umum			176.505.904,39				180.036.022,47
2	17	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kabupaten Sanggau	1 Laporan	5.056.344,00			1 Laporan	5.157.470,88
2	17	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	Kabupaten Sanggau	3 Laporan	152.728.758,85			3 Laporan	155.783.334,02
2	17	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	Kabupaten Sanggau	1 Laporan	18.720.801,54			1 Laporan	19.095.217,57
2	17	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Kebutuhan Barang Milik Daerah yang dipelihara			136.363.303,26				139.090.569,33
2	17	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayar pajaknya	Kabupaten Sanggau	1 Unit	31.222.404,00			1 Unit	31.846.852,08
2	17	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jmlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan Perizinannya	Kabupaten Sanggau	2 Unit	74.883.986,46			2 Unit	76.381.666,19
2	17	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	Kabupaten Sanggau	51 Unit	30.256.912,80			51 Unit	30.862.051,06
2	17	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung kantor dan Bangunan lainnya yang dipelihara/Direhabilitasi	Kabupaten Sanggau	1 unit	-			1 unit	-
2	17	3	2.01		PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase koperasi yang diawasi			107.494.590,63				109.644.482,45



Kode					Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Rencana Tahun 2027 (Tahun Rencana 2027)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2028	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	17	1	2.01		Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Tingkat Pengawasan Koperasi			107.494.590,63				109.644.482,45
2	17	3	2.01	3	Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	Jumlah Koperasi yang Dilakukan Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	Kabupaten Sanggau	90 Unit Usaha	-			90 Unit Usaha	-
2	17	3	2.01	4	Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan	Kabupaten Sanggau	35 Unit Usaha	107.494.590,63			35 Unit Usaha	109.644.482,45
2	17	4			PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Persentase koperasi yang sehat			17.567.215,38				17.918.559,69
2	17	4	2.01		Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi			17.567.215,38				17.918.559,69
2	17	4	2.01	1	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan	Kabupaten Sanggau	20 Unit Usaha	17.567.215,38			20 Unit Usaha	17.918.559,69
2	17	4	2.01	3	Penilaian Kesehatan Koperasi Meliputi Tata Kelola, Profil Risiko, Kinerja Keuangan, dan Permodalan	Jumlah Koperasi yang Diberikan Penilaian Kesehatan		40 Unit Usaha	-			40 Unit Usaha	-
2	17	5			PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase pengurus dan pengawas koperasi yang terlatih			0				0



Kode					Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Rencana Tahun 2027 (Tahun Rencana 2027)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2028	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	17	5	2.01		Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Kemampuan di Bidang Akuntansi bagi Pengurus Koperasi			0				0
2	17	5	2.01	1	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	Kabupaten Sanggau	Orang	-			Orang	-
2	17	6			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Terfasilitasinya Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi			15.000.000				15.000.000
2	17	6	2.01		Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya jumlah pemberdayaan koperasi			15.000.000				15.000.000
2	17	6	2.01	3	Pembinaan dan Pendampingan Bagi Keluarga dan Kelompok Masyarakat yang Akan Membentuk Koperasi Dalam Pengembangan Ekonomi	Jumlah Pembinaan dan/atau Pendampingan yang dilaksanakan	Kabupaten Sanggau	5 Kelompok Masyarakat	5.000.000			5 Kelompok Masyarakat	5.000.000
2	17	6	2.01	4	Fasilitasi Kemitraan Koperasi yang Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang Difasilitasi Kemitraannya	Kabupaten Sanggau	Unit Usaha	-			Unit Usaha	-
2	17	6	2.01	6	Pemulihan Usaha Koperasi yang Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang dipulihkan usahanya	Kabupaten Sanggau	Unit Usaha	-			Unit Usaha	-
2	17	6	2.01	8	Fasilitasi Pelaporan Koperasi yang Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang Difasilitasi Pelaporannya	Kabupaten Sanggau	Unit Usaha	-			Unit Usaha	-
2	17	6	2.01	9	Pemberdayaan Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Sanggau	3 Unit Usaha	10.000.000			3 Unit Usaha	10.000.000



Kode					Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Rencana Tahun 2027 (Tahun Rencana 2027)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2028	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	17	7			PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Terfasilitasinya Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro			1.822.666.278,00				1.857.119.603,55
2	17	7	2.01		Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Jumlah Dokumen Informasi Usaha Kecil dan Menengah			1.822.666.278,00				1.857.119.603,55
2	17	7	2.01	3	Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro yang Telah Mendapatkan Perizinan	Kabupaten Sanggau	Unit Usaha	-			Unit Usaha	-
2	17	7	2.01	4	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro	Kabupaten Sanggau	44 Unit Usaha	181.887.352,68			44 Unit Usaha	185.525.099,74
2	17	7	2.01	5	Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	Jumlah SDM yang Telah Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	Kabupaten Sanggau	Orang	-			Orang	-
2	17	7	2.01	8	Pemulihan Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi	Kabupaten Sanggau	Unit Usaha	-			Unit Usaha	-
2	17	7	2.01	11	Fasilitasi Sertifikasi dan Standardisasi Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi	Kabupaten Sanggau	28 Unit Usaha	19.258.423,09			28 Unit Usaha	19.643.591,55
2	17	7	2.01	14	Penyusunan Basis Data Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha Mikro Terdata	Kabupaten Sanggau	120 Unit Usaha	26.529.692,34			120 Unit Usaha	27.060.286,18
2	17	7	2.01	15	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Usaha Mikro dan Kewirausahaan	Kabupaten Sanggau	60 Orang	1.494.990.809,89			60 Orang	1.524.890.626,08
2	17	7	2.01	18	Peningkatan Kompetensi dan Kapasitas SDM Usaha Mikro dan Kecil (UMK)/Pelaku Usaha	Jumlah pelaku usaha yang memperoleh peningkatan kompetensi dan kapasitas SDM Usaha Mikro dan Kecil (UMK)	Kabupaten Sanggau	20 Orang	50.000.000			20 Orang	50.000.000



Kode					Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Rencana Tahun 2027 (Tahun Rencana 2027)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2028	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	17	7	2.01	21	Pembinaan dan Fasilitas Pelaku Usaha dalam Pembentukan Badan Hukum Berusaha *PROSN/TEMATIK Pengarusutamaan Gender	Jumlah Pelaku Usaha yang terfasilitasi Pembentukan Badan Hukum Berusaha	Kabupaten Sanggau	10 Orang	Menyesuaikan			10 Orang	
2	17	7	2.01	23	Fasilitasi Integrasi Basis Data Tunggal UMKM	Jumlah Kegiatan Hasil Fasilitas Integrasi dan Sinkronisasi Data UMKM	Kabupaten Sanggau	1 Kegiatan	Menyesuaikan				
2	17	7	2.01	27	Pembinaan dan Fasilitas Sertifikasi dan Standardisasi Produk *PROSN/TEMATIKI Ekonomi Syariah	Jumlah UMKM yang dibina dan difasilitasi dalam mengakses Sertifikasi dan Standardisasi Produk	Kabupaten Sanggau	28 Unit Usaha	50.000.000			28 Unit Usaha	50.000.000
2	17	8			PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Terfasilitasinya Pengembangan Usaha Mikro			0				0
2	17	8	2.01		Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Jumlah Dokumen Informasi Usaha Mikro			0				0
2	17	8	2.01	2	Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi	Kabupaten Sanggau	Unit Usaha	-			Unit Usaha	-
2	17	8	2.01	3	Penumbuhan dan Pengembangan Kewirausahaan	Jumlah yang Difasilitasi	Kabupaten Sanggau	Orang	-			Orang	-
3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN				3.270.799.916,44				3.377.507.924,72
3	30				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN				2.223.504.926,83				2.266.467.035,32
3	30	2			PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Persentase Gudang yang Teregistrasi			22.638.100,01				22.638.100,01



Kode					Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Rencana Tahun 2027 (Tahun Rencana 2027)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2028	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	30	2	2.01		Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan	Jumlah laporan hasil Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan yang tersedia			0				0
3	30	2	2.01	2	Fasilitasi pembinaan dan pemantauan kepemilikan Nomor Induk Berusaha (NIB) untuk distributor, agen, grosir/perkulakan dan toko swalayan melalui sistem berusaha melalui Sistem Elektronik	Jumlah laporan hasil pembinaan dan pemantauan kepemilikan Nomor Induk Berusaha (NIB) untuk distributor, agen, grosir/perkulakan dan toko swalayan melalui Sistem Perizinan Berusaha melalui Sistem Elektronik	Kabupaten Sanggau	1 Laporan	-			1 Laporan	-
3	30	2	2.02		Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Jumlah Dokumen Tanda Daftar Gudang yang difasilitasi			22.638.100,01				23.090.862,01
3	30	2	2.02	1	Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Jumlah Dokumen Tanda Daftar Gudang	Kabupaten Sanggau	1 Dokumen	22.638.100,01			1 Dokumen	23.090.862,01
3	30	3			PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Daya Tampung Pasar terhadap Pedagang			1.524.680.648,59				1.555.174.261,56
3	30	3	2.01		Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan yang disediakan			1.418.890.331,65				1.447.268.138,28
3	30	3	2.01	1	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan	Kabupaten Sanggau	3 Unit	1.418.890.331,65			3 Unit	1.447.268.138,28
3	30	3	2.02		Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	Jumlah Pedagang, Pengurus dan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan yang dibina			105.790.316,94				107.906.123,28
3	30	3	2.02	1	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Kabupaten Sanggau	20 Dokumen	105.790.316,94			20 Dokumen	107.906.123,28
3	30	4			PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Ketersediaan Informasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting			276.777.749,87				281.258.076,83



Kode					Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Rencana Tahun 2027 (Tahun Rencana 2027)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2028	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	30	4	2.01		Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah laporan hasil ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting yang disusun			40.805.807,23				41.621.923,37
3	30	4	2.01	3	Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Jumlah Laporan Pengendalian Stok atau Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan barang penting ditingkat agen dan pasar rakyat	Kabupaten Sanggau	1 laporan	40.805.807,23			1 laporan	41.621.923,37
3	30	4	2.02		Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting yang disusun			235.971.942,64				239.636.153,46
3	30	4	2.02	1	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Kabupaten Sanggau	1 laporan	172.210.763,84			1 laporan	175.654.979,12
3	30	4	2.02	2	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan *PROSN/TEMATIK Pengendalian Inflasi	Kabupaten Sanggau	48 Laporan	55.446.302			48 Laporan	55.500.000
3	30	4	2.02	3	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Kabupaten Sanggau	1 laporan	8.314.876,80			1 laporan	8.481.174,34
3	30	4	2.03		Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi yang disusun			0				0



Kode					Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Rencana Tahun 2027 (Tahun Rencana 2027)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2028	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	30	4	2.03	3	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90%	Kabupaten Sanggau	laporan	0			laporan	-
3	30	5			PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Pertumbuhan Nilai Ekspor			0,00				0,00
3	30	5	2.01		Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Informasi Ekspor Impor dan Perdagangan lintas Batas			0,00				0,00
3	30	5	2.01	2	Pameran Dagang Nasional	Jumlah Pelaku Usaha yang difasilitasi dalam Pameran Dagang	Kabupaten Sanggau	Pelaku Usaha	-			Pelaku Usaha	-
3	30	5	2.01	3	Pameran Dagang Lokal	Jumlah Pelaku Usaha yang difasilitasi dalam Pameran Dagang Lokal	Kabupaten Sanggau	Pelaku Usaha	-			Pelaku Usaha	-
3	30	5	2.01	4	Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan *Rakoretekrenbang 2026	Jumlah Pelaku Usaha yang difasilitasi dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan	Kabupaten Sanggau	10 Pelaku Usaha				2 Pelaku Usaha	
3	30	6			PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Cakupan alat UTTP yang ditera dan ditera ulang			399.408.428,36				407.396.596,92
3	30	6	2.01		Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Jumlah Dokumen Informasi Alat UTTP Kemetrolgian yang disusun			399.408.428,36				407.396.596,93
3	30	6	2.01	1	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang	Kabupaten Sanggau	250 Unit	370.393.917,49			250 Unit	377.801.795,84
3	30	6	2.01	2	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang dibina	Kabupaten Sanggau	40 Orang	29.014.510,87			40 Orang	29.594.801,09



Kode					Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Rencana Tahun 2027 (Tahun Rencana 2027)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2028	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	31				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN				1.047.294.989,61				1.111.040.889,40
3	31	2			PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Ketersediaan Dokumen Perencanaan dan Pembangunan Industri			933.723.497,84				967.197.967,80
3	31	2	2.01		Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Laporan dalam rangka penyusunan dan evaluasi RPIK			933.723.497,84				967.197.967,80
3	31	2	2.01	1	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri	Kabupaten Sanggau	1 Dokumen	150.000.000,00			1 Dokumen	155.000.000,00
3	31	2	2.01	2	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan, Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Kabupaten Sanggau	Dokumen	-			Dokumen	-
3	31	2	2.01	3	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Kabupaten Sanggau	1 Dokumen	176.675.583,22			1 Dokumen	180.209.094,89
3	31	2	2.01	4	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Kabupaten Sanggau	1 Dokumen	247.047.914,62			1 Dokumen	251.988.872,91
3	31	2	2.01	5	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Kabupaten Sanggau	2 Dokumen	360.000.000,00			2 Dokumen	380.000.000,00
3	31	2	2.01	6	Evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Kabupaten Sanggau	Dokumen	-			Dokumen	-
3	31	2	2.01	8	Pelaksanaan pengawasan Jaminan Produk Halal (JPH) di level Kabupaten/Kota	Jumlah objek pengawasan jaminan produk halal yang dapat diawasi - Jumlah program pengawasan Jaminan produk halal yang dapat diimplementasikan	Kabupaten Sanggau	2 Dokumen				2 Dokumen	



Kode					Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Rencana Tahun 2027 (Tahun Rencana 2027)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2028	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
					*PROSN/TEMATIK EKONOMI SYARIAH TAHUN 2027								
3	31	3			PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA	Persentase IKM yang dibina			100.000.000,00				130.000.000,00
3	31	3	2.01		Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPIU), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan			100.000.000,00				130.000.000,00
3	31	3	2.01	3	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha industri dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah yang berlokasi di satu Kab./Kota sepanjang merupakan Penanaman Modal Dalam Negeri dan selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat	Kabupaten Sanggau	1 Dokumen	50.000.000,00			1 Dokumen	65.000.000,00
3	31	3	2.01	4	Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Base Approach (OSS RBA)	Jumlah dokumen Laporan Verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko untuk bidang usaha sektor perindustrian dengan tingkat risiko usaha Menengah-Tinggi dan Tinggi, melalui SIINas yang terintegrasi dengan Sistem OSS RBA, bagi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah, selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat	Kabupaten Sanggau	2 Dokumen	50.000.000,00			2 Dokumen	65.000.000,00



Kode					Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Rencana Tahun 2027 (Tahun Rencana 2027)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2028	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	31	4			PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Ketersediaan Informasi Industri			13.571.491,77				13.842.921,60
3	31	4	2.01		Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Informasi Industri yang memiliki IUI, IPUI, IUKI dan IPKI di Kabupaten Sanggau			13.571.491,77				13.842.921,60
3	31	4	2.01	1	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Kabupaten Sanggau	Dokumen	-			Dokumen	-
3	31	4	2.01	2	Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota melalui SIINas	Jumlah Dokumen Hasil Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas	Kabupaten Sanggau	2 Dokumen	13.571.491,77			2 Dokumen	13.842.921,60
3	31	4	2.01	3	Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas	Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas	Kabupaten Sanggau	Dokumen	-			Dokumen	-
Jumlah									11.502.266.497,18				11.656.303.837,08

3.2 Arah Kebijakan

Kebijakan adalah pedoman yang wajib dipatuhi dalam melakukan tindakan untuk melaksanakan strategi yang dipilih, agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran. Sesuai dengan Visi, Misi, dan tujuan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sanggau Tahun 2025-2029 dalam rangka mewujudkan keberhasilan pembangunan diperlukan suatu rencana pembangunan di sektor Industri, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro yang berkualitas serta kebijakan pembangunan lainnya yang akan mendukung pencapaian tujuan, maka arah kebijakan jangka menengah Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sanggau Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut :

1. Mengembangkan pusat-pusat pertumbuhan baru dan sektor/ komoditas unggulan daerah.
2. Meningkatkan industri berbasis pengolahan yang terintegrasi hulu- hilir.
3. Meningkatkan kewirausahaan dan pemberdayaan koperasi, dan usaha mikro sehingga dapat menjadi usaha kecil.
4. Mengembangkan infrastruktur dan sumber daya penunjang industri kecil dan menengah Mengembangkan sentra industri kecil dan menengah.
5. Menumbuhkembangkan industri kecil menengah berbasis legalitas dan sertifikasi.
6. Membangun sistem pendataan yang komprehensif dan terpadu berbasis usaha industri kecil menengah.
7. Meningkatkan sinergitas Program kegiatan dengan pencapaian Kinerja.
8. Meningkatkan sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja pegawai.
9. Meningkatkan pelaksanaan pelayanan administrasi perkantoran, sarana dan prasarana aparatur, serta pelayanan prima Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sanggau

Perumusan arah kebijakan juga memperhatikan strategi sebagai dasar perumusannya, setiap arah kebijakan dirumuskan untuk mendukung strategi. Berdasarkan pada strategi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sanggau yang telah ditetapkan, maka penekanan arah kebijakan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sanggau dirincikan pada Tabel 3.3 sebagai berikut:

**Tabel 3.3 ARAH KEBIJAKAN RENCANA STRATEGIS
DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, DAN USAHA MIKRO
KABUPATEN SANGGAU 2025-2029**

OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RENCANA STRATEGIS	ARAH KEBIJAKAN RPJMD
1. Produktivitas dan transformasi struktural keterkaitan hulu-hilir	1.1. Mengembangkan pusat-pusat pertumbuhan baru dan sektor/ Komoditas unggulan daerah 1.2. Meningkatkan industri berbasis pengolahan yang terintegrasi hulu- Hilir 1.3. Meningkatkan kewirausahaan dan pemberdayaan koperasi, dan usaha mikro sehingga dapat menjadi usaha kecil 1.4. Mengembangkan infrastruktur dan sumber daya penunjang industri kecil dan menengah 1.5. Menumbuhkembangkan industri kecil menengah berbasis legalitas dan sertifikasi 1.6. Membangun sistem pendataan yang komprehensif dan terpadu berbasis usaha industri kecil menengah	Meningkatnya Pertumbuhan PDRB Sektor Strategis
2. Nilai SAKIP Disperindagkop dan UM	2.1. Meningkatkan sinergitas Program kegiatan dengan pencapaian Kinerja 2.2. Meningkatkan sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja pegawai 2.3. Meningkatkan pelaksanaan pelayanan administrasi perkantoran, sarana dan prasarana aparatur, serta pelayanan prima Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sanggau	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan pengawasan internal Pemerintah Daerah



Berdasarkan deskripsi strategi dan arah kebijakan yang telah ditetapkan, maka relevansi dan konsistensi antara pernyataan tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sanggau Tahun 2025-2029 dengan tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Mikro Kabupaten Sanggau dalam 5 (lima) tahun mendatang dapat dilihat pada Tabel 3.4

Kebijakan nasional dan daerah Dinas Perindagkop / Dinas Koperasi UKM Kalimantan Barat pada tahun 2026 berfokus pada peningkatan produktivitas, penguatan daya saing UMKM, kontribusi koperasi terhadap ekonomi daerah, serta stabilisasi harga dan produk lokal yang selaras dengan target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029.

Fokus Kebijakan dan Strategi 2026

- **Peningkatan Produktivitas:** Mendorong kapasitas produksi sektor industri kecil dan menengah (IKM) agar berdaya saing tinggi.
- **Penguatan Koperasi & UMKM:** Meningkatkan kontribusi koperasi serta memperluas akses pembiayaan dan digitalisasi pemasaran produk lokal.
- **Stabilisasi Pasar:** Menjaga kestabilan harga dan ketersediaan bahan kebutuhan pokok serta pemasaran produk dalam negeri.
- **Koordinasi Hukum & Perizinan:** Bersinergi dengan instansi vertikal seperti Kementerian Hukum dalam perlindungan hukum, merek kolektif, dan legalitas usaha bagi pelaku usaha di daerah.



**Tabel 3. 4 RUMUSAN TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN ARAH KEBIJAKAN
DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, DAN USAHA MIKRO KABUPATEN SANGGAU**

VISI : SANGGAU MAJU BERKELANJUTAN DAN BERKEADILAN			
MISI II : Meningkatkan Perekonomian Masyarakat.			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1. Terwujudnya Pertumbuhan PDRB Sektor Strategis.	1.1 Meningkatnya pertumbuhan PDRB sektor strategis	1.1.1 Peningkatan produktivitas dan transformasi struktural keterkaitan hulu-hilir	1.1.1.1 Mengembangkan pusat-pusat pertumbuhan baru dan sektor/komoditas unggulan daerah
			1.1.1.2 Meningkatkan industri berbasis pengolahan yang terintegrasi hulu-hilir
			1.1.1.3 Meningkatkan kewirausahaan dan pemberdayaan koperasi, dan usaha mikro sehingga dapat menjadi usaha kecil
			1.1.1.4 Mengembangkan infrastruktur dan sumber daya penunjang industri kecil dan menengah
			1.1.1.5 Menumbuhkembangkan industri kecil menengah berbasis legalitas dan sertifikasi



			1.1.1.6 Membangun sistem pendataan yang komprehensif dan terpadu berbasis usaha industri kecil menengah
--	--	--	---



VISI : SANGGAU MAJU BERKELANJUTAN DAN BERKEADILAN			
MISI V : Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Aparatur Sipil Negara yang Profesional			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
5. Terwujudnya Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	5.1 Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan pengawasan internal Pemerintah Daerah	5.1.1 Peningkatan Nilai SAKIP Disperindagkop dan UM	5.1.1.1 Meningkatkan sinergitas Program kegiatan dengan pencapaian Kinerja
			5.1.1.2 Meningkatkan sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja pegawai
			5.1.1.3 Meningkatkan pelaksanaan pelayanan administrasi perkantoran, sarana dan prasarana aparatur, serta pelayanan prima Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sanggau



BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN



BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

Dengan program dan kegiatan serta pendanaan yang telah disusun pada tahun 2027, ditujukan agar dapat mencapai target capaian kinerja yang telah ditetapkan pada Rancangan Renstra Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sanggau Tahun 2025-2029. Keterkaitan antara Indikator kinerja serta pendanaan dapat dilihat pada tabel 4.1, 4.2, dan tabel 4.3



Tabel 4. 1 INDIKATOR KINERJA DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO KABUPATEN SANGGAU YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD TAHUN 2025-2029

No.	Sasaran RPJMD	Tujuan Dinas	Sasaran Dinas	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja pada Awal Periode Renstra	Target Sasaran Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra
					2024	2025	2026	2027	2028	2029	
1)	2)	3)	4)	5)	6)	7)	8)	9)	10)	11)	12)
1.	Meningkatnya Pertumbuhan PDRB Sektor Strategis	1. Terwujudnya Pertumbuhan PDRB Sektor Strategis	1.1 Meningkatnya Pertumbuhan PDRB Sektor Strategis	1.1.1 Pertumbuhan PDRB Sektor Industri	2,23	2,23	2,23	2,23	2,23	2,23	2,23
				1.1.2 Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan	7,28	7,28	7,28	7,28	7,28	7,28	7,28
			2.1 Meningkatnya Kualitas Koperasi dan UM	2.1.1 Persentase Koperasi Aktif	27,35	27,50	28	29	30	35	35
				2.1.2 Persentase Kenaikan Kelas Usaha Mikro	0,57	1	1,75	1,78	1,81	1,84	1,84
2.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Pengawasan Internal Pemerintah Daerah	2. Terwujudnya Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Pmerintah Daerah	3.1 Meningkatnya akuntabilitas kinerja DISPERINDAGKOP	3.1.1 Nilai SAKIP	66,90	66,95	67,50	68	68,50	69	69



Tabel 4. 2 INDIKATOR KINERJA DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO KABUPATEN SANGGAU

Tujuan	Indikator Kinerja Tujuan	Target							Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Strategis	Target						
		Awal	2025	2026	2027	2028	2029	Akhir			Awal	2025	2026	2027	2028	2029	Akhir
Terwujudnya Pertumbuhan PDRB Sektor Strategis	Pertumbuhan PDRB Sektor Industri	2,23	2,23	2,23	2,23	2,23	2,23	2,23	Meningkatnya Produktivitas Perindustrian dan Perdagangan	Kontribusi PDRB Industri terhadap PDRB Kabupaten Sanggau	15,98	17,30	17,47	18,22	18,96	19,71	19,71
	Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan	7,28	7,28	7,28	7,28	7,28	7,28	7,28		Nilai perdagangan (milyar rupiah)	3.116,16	3.140,56	3.187,35	3.203,14	3.318,93	3.434,73	3.434,73
	Persentase Koperasi Aktif	27,35	27,50	28	29	30	35	35	Meningkatnya Kualitas Koperasi dan UM	persentase Koperasi yang Sehat	2,00	2,50	5,00	7,50	10,00	12,50	12,50
										Volume Usaha Koperasi (milyar rupiah)	696	696	699	703	706	710	710
	Persentase Kenaikan Kelas UM	0,57	1	1,75	1,78	1,81	1,84	1,84		Persentase UM yang meningkat Omzetnya	0,87	0,93	0,95	0,98	1,02	1,07	1,07
Terwujudnya Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	Nilai SAKIP	6,90	6,95	67,50	68	68,50	69	69	Meningkatnya akuntabilitas kinerja DISPERINDAGKOP	Nilai SAKIP DISPERINDAGKOP	66,90	66,95	67,5	68	68,5	69	69



Tabel 4. 3 RENCANA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN DAN PENDANAAN DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO KABUPATEN SANGGAU

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASE LINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF												KET
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	18
	Nilai SAKIP	66,9	66,95		67,5		68		68,5		69		69,3		
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				7.801.294.291,37		7.957.320.177,20		8.231.466.580,74		8.278.795.912,36		8.444.371.830,60		8.613.259.267,22	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH				7.801.294.291,37		7.957.320.177,20		8.231.466.580,74		8.298.795.912,35		8.444.371.830,60		8.613.259.267,22	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Ketersediaan Layanan Umum Penjunjang Pemerintahan Bidang Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian			6.025.315.740,80		6.145.822.055,62		6.268.738.496,73		6.394.113.266,66		6.521.995.532,00		6.652.435.442,64	



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASE LINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF												KET
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	18
Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penjabaran Konsistensi Program Renstra ke dalam Renja			33.233.929		33.898.607,58		34.576.579,73		35.268.111,33		35.973.473,55		36.692.943,02	
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	5.437.275	2 Dokumen	5.546.020,50	2 Dokumen	5.656.940,91	2 Dokumen	5.770.079,73	2 Dokumen	5.885.481,32	2 Dokumen	6.003.190,95	Sekretariat
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	4.812.917	1 Dokumen	4.909.175,34	1 Dokumen	5.007.358,85	1 Dokumen	5.107.506,02	1 Dokumen	5.209.656,14	1 Dokumen	5.313.849,27	Sekretariat
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	4.026.132	1 Dokumen	4.106.654,64	1 Dokumen	4.188.787,73	1 Dokumen	4.272.563,49	1 Dokumen	4.358.014,76	1 Dokumen	4.445.175,05	Sekretariat



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASE LINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF												KET
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	18
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Doku men	1 Dokum en	4.724.988	1 Dokum en	4.819.487,76	1 Dokum en	4.915.877,52	1 Dokum en	5.014.195,07	1 Dokum en	5.114.478,97	1 Dokum en	5.216.768,55	Sekretari at
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Doku men	1 Dokum en	4.807.367	1 Dokum en	4.903.514,34	1 Dokum en	5.001.584,63	1 Dokum en	5.101.616,32	1 Dokum en	5.203.648,65	1 Dokum en	5.307.721,62	Sekretari at
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Kinerja SKPD	1 Lapora n	1 Lapora n	4.891.000	1 Lapora n	4.988.820,00	1 Lapora n	5.088.596,40	1 Lapora n	5.190.368,33	1 Lapora n	5.294.175,69	1 Lapora n	5.400.059,21	Sekretari at



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASE LINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF												KET
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	18
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Lapora n	4 Lapora n	4.534.250	4 Lapora n	4.624.935,00	4 Lapora n	4.717.433,70	4 Lapora n	4.811.782,37	4 Lapora n	4.908.018,02	4 Lapora n	5.006.178,38	Sekretari at
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Laporan Keuangan SKPD sesuai Standar Akuntansi Pemerintah			5.007.575.592		5.107.727.103,84		5.209.881.645,92		5.314.079.278,84		5.420.360.864,41		5.528.768.081,70	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	37 Orang / Bulan	37 Orang / Bulan	3.133.664.148	37 Orang / Bulan	3.196.337.430,96	37 Orang / Bulan	3.260.264.179,58	37 Orang / Bulan	3.325.469.463,17	37 Orang / Bulan	3.391.978.852,43	37 Orang / Bulan	3.459.818.429,48	Sekretari at
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	14 Doku men	14 Dokum en	1.664.323.341	14 Dokum en	1.697.609.807,82	14 Dokum en	1.731.562.003,98	14 Dokum en	1.766.193.244,06	14 Dokum en	1.801.517.108,94	14 Dokum en	1.837.547.451,12	Sekretari at
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Doku men	12 Dokum en	194.760.000	12 Dokum en	198.655.200,00	12 Dokum en	202.628.304,00	12 Dokum en	206.680.870,08	12 Dokum en	210.814.487,48	12 Dokum en	215.030.777,23	Sekretari at



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASE LINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF												KET
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	18
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Lapora n	1 Lapora n	7.797.812	1 Lapora n	7.953.768, 24	1 Lapora n	8.112.843, 60	1 Lapora n	8.275.100, 48	1 Lapora n	8.440.602, 49	1 Lapora n	8.609.414, 54	Sekretari at
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwunana n/ SKPD Semesteran	3 Lapora n	3 Lapora n	7.030.291	3 Lapora n	7.170.896, 82	3 Lapora n	7.314.314, 76	3 Lapora n	7.460.601, 05	3 Lapora n	7.609.813, 07	3 Lapora n	7.762.009, 33	Sekretari at
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang dipergunakan dan yang tidak dipergunakan			44.385.457		45.273.166 ,14		46.178.629 ,46		47.102.202 ,05		48.044.246 ,09		49.005.131 ,01	



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASE LINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF												KET
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	18
Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2 Doku men	2 Dokum en	2.420.971	2 Dokum en	2.469.390,42	2 Dokum en	2.518.778,23	2 Dokum en	2.569.153,79	2 Dokum en	2.620.536,87	2 Dokum en	2.672.947,61	Sekretari at
Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	2 Doku men	2 Dokum en	19.325.000	2 Dokum en	19.711.500,00	2 Dokum en	20.105.730,00	2 Dokum en	20.507.844,60	2 Dokum en	20.918.001,49	2 Dokum en	21.336.361,52	Sekretari at
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Lapora n	2 Lapora n	2.239.486	2 Lapora n	2.284.275,72	2 Lapora n	2.329.961,23	2 Lapora n	2.376.560,46	2 Lapora n	2.424.091,67	2 Lapora n	2.472.573,50	Sekretari at
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Lapora n	2 Lapora n	20.400.000	2 Lapora n	20.808.000,00	2 Lapora n	21.224.160,00	2 Lapora n	21.648.643,20	2 Lapora n	22.081.616,06	2 Lapora n	22.523.248,39	Sekretari at
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pelayanan Administrasi Kepegawaian			215.264.584		219.569.875,68		223.961.273,19		228.440.498,66		233.009.308,63		237.669.494,80	



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASE LINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF												KET
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	18
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas bserta atribut kelengkapannya	55 Paket	55 Paket	0	60 Paket	-	60 Paket	-	60 Paket	-	60 Paket	-	60 Paket	-	Sekretari at
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Doku men	1 Dokum en	197.686.774	1 Dokum en	201.640.509,48	1 Dokum en	205.673.319,67	1 Dokum en	209.786.786,06	1 Dokum en	213.982.521,78	1 Dokum en	218.262.172,22	Sekretari at
Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah DokumenMonitoring , Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Doku men	1 Dokum en	17.577.810	1 Dokum en	17.929.366,20	1 Dokum en	18.287.953,52	1 Dokum en	18.653.712,59	1 Dokum en	19.026.786,85	1 Dokum en	19.407.322,58	Sekretari at
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti Pelatihan	15 Orang	15 Orang	0	15 Orang	-	15 Orang	-	15 Orang	-	15 Orang	-	15 Orang	-	Sekretari at
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pelayanan Kegiatan Administrasi Umum			235.368.745		240.076.119,90		244.877.642,30		249.775.195,14		254.770.699,05		259.866.113,03	



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASE LINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF												KET
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	18
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	9 Paket	9 Paket	68.195.070	9 Paket	69.558.971 ,40	9 Paket	70.950.150 ,83	9 Paket	72.369.153 ,84	9 Paket	73.816.536 ,92	9 Paket	75.292.867 ,66	Sekretari at
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	13 Paket	13 Paket	96.265.820	13 Paket	98.191.136 ,40	13 Paket	100.154.95 9,13	13 Paket	102.158.05 8,31	13 Paket	104.201.21 9,48	13 Paket	106.285.24 3,87	Sekretari at
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	4 Paket	4 Paket	26.362.855	4 Paket	26.890.112 ,10	4 Paket	27.427.914 ,34	4 Paket	27.976.472 ,63	4 Paket	28.536.002 ,08	4 Paket	29.106.722 ,12	Sekretari at
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan yang disediakan	12 Doku men	Dokum en	0	12 Dokum en	-	12 Dokum en	-	12 Dokum en	-	12 Dokum en	-	12 Dokum en	-	Sekretari at
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	120 Lapora n	120 Lapora n	44.545.000	120 Lapora n	45.435.900 ,00	120 Lapora n	46.344.618 ,00	120 Lapora n	47.271.510 ,36	120 Lapora n	48.216.940 ,57	120 Lapora n	49.181.279 ,38	Sekretari at



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASE LINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF												KET
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	18
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Kebutuhan Barang Milik Daerah yang disediakan			188.767.318,80		192.542.665,18		196.393.518,48		200.321.388,85		204.327.816,63		208.414.372,96	
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang diadakan	1 Unit	1 Unit	163.800.000	1 Unit	167.076.000,00	1 Unit	170.417.520,00	1 Unit	173.825.870,40	1 Unit	177.302.387,81	1 Unit	180.848.435,56	Sekretariat
Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Unit	1 Unit	2.741.700,00	1 Unit	2.796.534,00	1 Unit	2.852.464,68	1 Unit	2.909.513,97	1 Unit	2.967.704,25	1 Unit	3.027.058,34	Sekretariat
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	0 Unit	1 Unit	22.225.618,80	1 Unit	22.670.131,18	1 Unit	23.123.533,80	1 Unit	23.586.004,48	1 Unit	24.057.724,57	1 Unit	24.538.879,06	Sekretariat
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pelayanan Kegiatan Administrasi Umum			169.651.965		173.045.004,30		176.505.904,39		180.036.022,47		183.636.742,92		187.309.477,78	
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1 Laporan	4.860.000	1 Laporan	4.957.200,00	1 Laporan	5.056.344,00	1 Laporan	5.157.470,88	1 Laporan	5.260.620,30	1 Laporan	5.365.832,70	Sekretariat



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASE LINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF												KET
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	18
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	3 Lapora n	3 Lapora n	146.798.115	3 Lapora n	149.734.077,30	3 Lapora n	152.728.758,85	3 Lapora n	155.783.334,02	3 Lapora n	158.899.000,70	3 Lapora n	162.076.980,72	Sekretari at
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	1 Lapora n	1 Lapora n	17.993.850	1 Lapora n	18.353.727,00	1 Lapora n	18.720.801,54	1 Lapora n	19.095.217,57	1 Lapora n	19.477.121,92	1 Lapora n	19.866.664,36	Sekretari at
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Kebutuhan Barang Milik Daerah yang dipelihara			131.068.150		133.689.513,00		136.363.303,26		139.090.569,33		141.872.380,71		144.709.828,33	



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASE LINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF												KET
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	18
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihar an dan dibayar Pajaknya	1 Unit	1 Unit	30.010.000	1 Unit	30.610.200 ,00	1 Unit	31.222.404 ,00	1 Unit	31.846.852 ,08	1 Unit	32.483.789 ,12	1 Unit	33.133.464 ,90	Sekretari at
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jmlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan Perizinannya	2 Unit	2 Unit	71.976.150	2 Unit	73.415.673 ,00	2 Unit	74.883.986 ,46	2 Unit	76.381.666 ,19	2 Unit	77.909.299 ,51	2 Unit	79.467.485 ,50	Sekretari at
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	51 Unit	45 Unit	29.082.000	51 Unit	29.663.640 ,00	51 Unit	30.256.912 ,80	51 Unit	30.862.051 ,06	51 Unit	31.479.292 ,08	51 Unit	32.108.877 ,92	Sekretari at
Pemeliharaan/Reha bilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung kantor dan Bangunan lainnya yang dipelihara/Direhabili tasi	1 unit	1 unit	0	1 unit	-	1 unit	-	1 unit	-	1 unit	-	1 unit	-	Sekretari at



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASE LINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF												KET
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	18
	Pertumbuhan PDRB Sektor Industri	2,23	1,49		1,49		1,49		1,49		1,49		1,49		
	Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan	7,28	5,25		5,45		5,89		6,33		6,77		7,21		
	Persentase Koperasi Aktif	27,35	18		20		25		30		35		35		
	Persentase kenaikan Kelas Usaha Mikro	0,57	1		1,75		1,78		1,81		1,84		1,87		
PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase koperasi yang diawasi			103.320.44 4,67		105.386.85 3,56		107.494.59 0,63		109.644.48 2,45		111.837.37 2,10		114.074.11 9,54	



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASE LINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF												KET
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	18
Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Tingkat Pengawasan Koperasi			103.320.44 4,67		105.386.85 3,56		107.494.59 0,63		109.644.48 2,45		111.837.37 2,10		114.074.11 9,54	
Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	Jumlah Koperasi yang Dilakukan Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	0 Unit Usaha	0 Unit Usaha	-	90 Unit Usaha	-	90 Unit Usaha	-	90 Unit Usaha	-	90 Unit Usaha	-	90 Unit Usaha	-	Bidang Koperasi dan Usaha Mikro



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASE LINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF												KET
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	18
Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan	90 Unit Usaha	30 Unit Usaha	103.320.44 4,67	35 Unit Usaha	105.386.85 3,56	35 Unit Usaha	107.494.59 0,63	35 Unit Usaha	109.644.48 2,45	35 Unit Usaha	111.837.37 2,10	35 Unit Usaha	114.074.11 9,54	Bidang Koperasi dan Usaha Mikro
PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Persentase koperasi yang sehat			16.885.059		17.222.760 ,18		17.567.215 ,38		17.918.559 ,69		18.276.930 ,89		18.642.469 ,50	
Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi			16.885.059		17.222.760 ,18		17.567.215 ,38		17.918.559 ,69		18.276.930 ,89		18.642.469 ,50	



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASE LINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF												KET
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	18
Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan	20 Unit Usaha	40 Unit Usaha	16.885.059	20 Unit Usaha	17.222.760 ,18	20 Unit Usaha	17.567.215 ,38	20 Unit Usaha	17.918.559 ,69	20 Unit Usaha	18.276.930 ,89	20 Unit Usaha	18.642.469 ,50	Bidang Koperasi dan Usaha Mikro
Penilaian Kesehatan Koperasi Meliputi Tata Kelola, Profil Risiko, Kinerja Keuangan, dan Permodalan	Jumlah Koperasi yang Diberikan Penilaian Kesehatan	0 Unit Usaha	0 Unit Usaha	0	40 Unit Usaha	-	40 Unit Usaha	-	40 Unit Usaha	-	40 Unit Usaha	-	40 Unit Usaha	-	Bidang Koperasi dan Usaha Mikro
PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase Pengurus dan Pengawas Koperasi serta Pelaku Usaha Mikro terlatih			-		-		0		0		0		0	



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASE LINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF												KET
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	18
Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Kemampuan di bidang Akuntansi bagi Pengurus Koperasi			-		-		0		0		0		0	
Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	0 Orang	0 Orang	0	Orang	-	Orang	0	Orang	0	Orang	0	Orang	0	Bidang Koperasi dan Usaha Mikro
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Terfasilitasinya Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi			-		-		15.000.000,00		20.000.000,00		25.000.000,00		30.000.000,00	



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASE LINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF												KET
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	18
Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya jumlah pemberdayaan koperasi			-		-		15.000.000 ,00		20.000.000 ,00		25.000.000 ,00		30.000.000 ,00	
Pembinaan dan Pendampingan Bagi Keluarga dan Kelompok Masyarakat yang Akan Membentuk Koperasi Dalam Pengembangan Ekonomi	Jumlah Pembinaan dan/atau Pendampingan yang dilaksanakan		0 Kelompok pok Masya rakat	0	0 Kelom pok Masya rakat	0	5 Kelom pok Masya rakat	5.000.000, 00	5 Kelom pok Masya rakat	7.500.000, 00	5 Kelom pok Masya rakat	10.000.000 ,00	5 Kelom pok Masya rakat	12.500.000 ,00	Bidang Koperasi dan Usaha Mikro
Fasilitasi Kemitraan Koperasi yang Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang Difasilitasi Kemitraannya	0 Unit Usaha	0 Unit Usaha	0	Unit Usaha	-	Unit Usaha	-	Unit Usaha	-	Unit Usaha	-	Unit Usaha	-	Bidang Koperasi dan Usaha Mikro



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASE LINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF												KET
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	18
Pemulihan Usaha Koperasi yang Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang dipulihkan usahanya	0 Unit Usaha	0 Unit Usaha	0	Unit Usaha	-	Unit Usaha	-	Unit Usaha	-	Unit Usaha	-	Unit Usaha	-	Bidang Koperasi dan Usaha Mikro
Fasilitasi Pelaporan Koperasi yang Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang Difasilitasi Pelaporannya	0 Unit Usaha	0 Unit Usaha	0	Unit Usaha	-	Unit Usaha	-	Unit Usaha	-	Unit Usaha	-	Unit Usaha	-	Bidang Koperasi dan Usaha Mikro
Pemberdayaan Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota		0 Unit Usaha	0	Unit Usaha	-	3 Unit Usaha	10.000.000 ,00	3 Unit Usaha	12.500.000 ,00	3 Unit Usaha	15.000.000 ,00	3 Unit Usaha	17.500.000 ,00	Bidang Koperasi dan Usaha Mikro
PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Terfasilitasinya Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro			1.655.773.046,90		1.688.888.507,84		1.822.666.278,00		1.757.119.603,55		1.792.261.995,63		1.828.107.235,54	



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASE LINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF												KET
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	18
Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Jumlah Dokumen Informasi Usaha Kecil dan Menengah			1.655.773.046,90		1.688.888.507,84		1.822.666.278,00		1.867.119.603,55		1.904.761.995,63		1.943.107.235,55	
Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro yang Telah Mendapatkan Perizinan	0 Unit Usaha	Unit Usaha	0	Unit Usaha	-	Unit Usaha	-	Unit Usaha	-	Unit Usaha	-	Unit Usaha	-	Bidang Koperasi dan Usaha Mikro
Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang telah Menerima Pembinaan dan Pemdampingan Terhadap Usaha Mikro	40 Unit Usaha	30 Unit Usaha	174.824.445,10	44 Unit Usaha	178.320.934,00	44 Unit Usaha	181.887.352,68	44 Unit Usaha	185.525.099,74	44 Unit Usaha	189.235.601,73	44 Unit Usaha	193.020.313,77	Bidang Koperasi dan Usaha Mikro



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASE LINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF												KET
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	18
Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	Jumlah SDM yang Telah Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	0 Orang	0 Orang	0	Orang	-	Orang	-	Orang	-	Orang	-	Orang	-	Bidang Koperasi dan Usaha Mikro
Pemulihan Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi	0 Unit Usaha	0 Unit Usaha	0	Unit Usaha	-	Unit Usaha	-	Unit Usaha	-	Unit Usaha	-	Unit Usaha	-	Bidang Koperasi dan Usaha Mikro
Fasilitasi Sertifikasi dan Standardisasi Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi	0 Unit Usaha	10 Unit Usaha	18.510.595,05	28 Unit Usaha	18.880.806,95	28 Unit Usaha	19.258.423,09	28 Unit Usaha	19.643.591,55	28 Unit Usaha	20.036.463,38	28 Unit Usaha	20.437.192,65	Bidang Koperasi dan Usaha Mikro
Penyusunan Basis Data Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha Mikro Terdata	0 Unit Usaha	90 Unit Usaha	25.499.512,05	120 Unit Usaha	26.009.502,29	120 Unit Usaha	26.529.692,34	120 Unit Usaha	27.060.286,18	120 Unit Usaha	27.601.491,91	120 Unit Usaha	28.153.521,75	Bidang Koperasi dan Usaha Mikro



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASE LINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF												KET
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	18
Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Usaha Mikro dan Kewirausahaan	0 Orang	50 Orang	1.436.938.494,70	60 Orang	1.465.677.264,59	60 Orang	1.494.990.809,89	60 Orang	1.524.890.626,08	60 Orang	1.555.388.438,61	60 Orang	1.586.496.207,38	Bidang Koperasi dan Usaha Mikro
Peningkatan Kompetensi dan Kapasitas SDM Usaha Mikro dan Kecil (UMK)/Pelaku Usaha	Jumlah pelaku usaha yang memperoleh peningkatan kompetensi dan kapasitas SDM Usaha Mikro dan Kecil (UMK)	0 Orang	0 Orang	-	0 Orang	-	20 Orang	50.000.000,00	20 Orang	60.000.000,00	20 Orang	62.500.000,00	20 Orang	65.000.000,00	
Pembinaan dan Fasilitasi Pelaku Usaha dalam Pembentukan Badan Hukum Berusaha	Jumlah Pelaku Usaha yang terfasilitasi Pembentukan Badan Hukum Berusaha	0 Orang	0 Orang	-	0 Orang	-	10 Orang		10 Orang		10 Orang		10 Orang		Pagu Anggaran Menyediakan



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASE LINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF												KET
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	18
*PROSN/TEMATIK Pengarustamaan Gender															
Fasilitasi Integrasi Basis Data Tunggal UMKM	Jumlah Kegiatan Hasil Fasilitasi Integrasi dan Sinkronisasi Data UMKM	0 Kegiatan	0 Kegiatan	-	0 Kegiatan	-	1 Kegiatan		1 Kegiatan		1 Kegiatan		1 Kegiatan		
Pembinaan dan Fasilitasi Sertifikasi dan Standardisasi Produk	Jumlah UMKM yang dibina dan difasilitasi dalam mengakses Sertifikasi dan Standardisasi Produk	0 Unit Usaha	0 Unit Usaha	-	0 Unit Usaha	-	28 Unit Usaha	50.000.000 ,00	28 Unit Usaha	50.000.000 ,00	28 Unit Usaha	50.000.000 ,00	28 Unit Usaha	50.000.000 ,00	
*PROSN/TEMATIKI Ekonomi Syariah															
PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Terfasilitasinya Pengembangan Usaha Mikro			-		-		0		0		0		0	



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASE LINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF												KET
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	18
Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Jumlah Dokumen Informasi Usaha Mikro			-		-		0		0		0		0	
Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi	0 Unit Usaha	0 Unit Usaha	0	Unit Usaha	-	Unit Usaha	-	Unit Usaha	-	Unit Usaha	-	Unit Usaha	-	Bidang Koperasi dan Usaha Mikro
Penumbuhan dan Pengembangan Kewirausahaan	Jumlah yang Difasilitasi	0 Orang	0 Orang	0	Orang	-	Orang	-	Orang	-	Orang	-	Orang	-	Bidang Koperasi dan Usaha Mikro
URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN				3.057.227.750		3.118.372.305,29		3.286.186.053,39		3.244.354.546,42		3.309.241.637,35		3.375.426.470,10	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN				2.114.549.345		2.156.840.331,98		2.255.423.440,62		2.243.976.681,39		2.288.856.215,02		2.334.633.339,33	
PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Persentase Gudang yang Teregistrasi			21.759.035		22.194.215,70		22.638.100,01		23.090.862,01		23.552.679,25		24.023.732,84	



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASE LINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF												KET
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	18
Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan	Jumlah laporan hasil Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan yang tersedia			-		-		-		-		-		-	
Fasilitasi pembinaan dan pemantauan kepemilikan Nomor Induk Berusaha (NIB) untuk distributor, agen, grosir/perkulakan dan toko swalayan melalui sistem berusaha melalui Sistem Elektronik	Jumlah laporan hasil pembinaan dan pemantauan kepemilikan Nomor Induk Berusaha (NIB) untuk distributor, agen, grosir/perkulakan dan toko swalayan melalui Sistem Perizinan Berusaha melalui Sistem Elektronik	1Laporan	0 Laporan	0	1 Laporan	-	1 Laporan	-	1 Laporan	-	1 Laporan	-	1 Laporan	-	Bidang Perdagangan



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASE LINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF												KET
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	18
Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Jumlah Dokumen Tanda Daftar Gudang yang difasilitasi			21.759.035		22.194.215 ,70		22.638.100 ,01		23.090.862 ,01		23.552.679 ,25		24.023.732 ,84	
Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Jumlah Dokumen Tanda Daftar Gudang	1 Doku men	1 Dokum en	21.759.035	1 Dokum en	22.194.215 ,70	1 Dokum en	22.638.100 ,01	1 Dokum en	23.090.862 ,01	1 Dokum en	23.552.679 ,25	1 Dokum en	24.023.732 ,84	Bidang Perdag a ngan
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Daya Tampung Pasar terhadap Pedagang			1.465.475. 440,78		1.494.784. 949,60		1.524.680. 648,59		1.555.174. 261,56		1.586.277. 746,79		1.618.003. 301,73	
Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan yang disediakan			1.363.793. 090,78		1.391.068. 952,60		1.418.890. 331,65		1.447.268. 138,28		1.476.213. 501,05		1.505.737. 771,07	
Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan	1 Unit	1 Unit	1.363.793. 090,78	3 Unit	1.391.068. 952,60	3 Unit	1.418.890. 331,65	3 Unit	1.447.268. 138,28	3 Unit	1.476.213. 501,05	3 Unit	1.505.737. 771,07	Bidang Pasar



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASE LINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF												KET
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	18
Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	Jumlah Pedagang, Pengurus dan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan yang dibina			101.682.350		103.715.997,00		105.790.316,94		107.906.123,28		110.064.245,74		112.265.530,66	
Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	1 Dokumen	20 Dokumen	101.682.350	20 Dokumen	103.715.997,00	20 Dokumen	105.790.316,94	20 Dokumen	107.906.123,28	20 Dokumen	110.064.245,74	20 Dokumen	112.265.530,66	Bidang Pasar
PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Ketersediaan Informasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting			212.736.878		216.991.615,56		276.777.749,87		225.758.076,83		230.273.238,37		234.878.703,14	



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASE LINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF												KET
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	18
Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah laporan hasil ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting yang disusun			39.221.268		40.005.693,36		40.805.807,23		41.621.923,37		42.454.361,84		43.303.449,08	
Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Jumlah Laporan Pengendalian Stok atau Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan barang penting ditingkat agen dan pasar rakyat	0 laporan	1 laporan	39.221.268	1 laporan	40.005.693,36	1 laporan	40.805.807,23	1 laporan	41.621.923,37	1 laporan	42.454.361,84	1 laporan	43.303.449,08	Bidang Perdagangan
Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting yang disusun			173.515.610		176.985.922,20		235.971.942,64		184.136.153,46		187.818.876,53		191.575.254,06	



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASE LINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF												KET
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	18
Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	1 laporan	1 laporan	165.523.610	1 laporan	168.834.082,20	1 laporan	172.210.763,84	1 laporan	175.654.979,12	1 laporan	179.168.078,70	1 laporan	182.751.440,28	Bidang Pasar
Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	0 Laporan	0 Laporan	-	0 Laporan	-	48 Laporan	55.446.302,00	48 Laporan	58.890.510,00	48 Laporan	62.403.609,58	48 Laporan	65.446.302,00	Bidang Pasar
*PROSN/TEMATIK Pengendalian Inflasi															



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASE LINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF												KET
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	18
Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	1 lapora n	1 lapora n	7.992.000	1 lapora n	8.151.840,00	1 lapora n	8.314.876,80	1 lapora n	8.481.174,34	1 lapora n	8.650.797,82	1 lapora n	8.823.813,78	Bidang Pasar
Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi yang disusun			-		-		0		0		0		0	
Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90%	0 lapora n	0 lapora n	0	0 lapora n	-	Lapora n	0	0 lapora n	-	0 lapora n	-	0 lapora n	-	Bidang Perdagangan



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASE LINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF												KET
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	18
PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Pertumbuhan Nilai Ekspor			30.679.079		31.292.660,58		31.918.513,79		32.556.884,07		33.208.021,75		33.872.182,18	
Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Informasi Ekspor Impor dan Perdagangan lintas Batas			30.679.079		31.292.660,58		31.918.513,79		32.556.884,07		33.208.021,75		33.872.182,18	
Pameran Dagang Nasional	Jumlah Pelaku Usaha yang difasilitasi dalam Pameran Dagang	Pelaku Usaha	Pelaku Usaha	0	Pelaku Usaha	-	Pelaku Usaha	-	Pelaku Usaha	-	Pelaku Usaha	-	Pelaku Usaha	-	Bidang Perdagangan



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASE LINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF												KET
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	18
Pameran Dagang Lokal	Jumlah Pelaku Usaha yang difasilitasi dalam Pameran Dagang Lokal	Pelaku Usaha	Pelaku Usaha	0	Pelaku Usaha	-	Pelaku Usaha	-	Pelaku Usaha	-	Pelaku Usaha	-	Pelaku Usaha	-	Bidang Perdagangan
Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan	Jumlah Pelaku Usaha yang difasilitasi dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan	2 Pelaku Usaha	2 Pelaku Usaha	30.679.079	2 Pelaku Usaha	31.292.660,58	10 Pelaku Usaha	31.918.513,79	2 Pelaku Usaha	32.556.884,07	2 Pelaku Usaha	33.208.021,75	2 Pelaku Usaha	33.872.182,18	Bidang Perdagangan
PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Cakupan alat UTTP yang ditera dan diter ulang			383.898.912,30		391.576.890,55		399.408.428,36		407.396.596,92		415.544.528,86		423.855.419,44	
Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Jumlah Dokumen Informasi Alat UTTP Kemetrologian yang disusun			383.898.912,30		391.576.890,55		399.408.428,36		407.396.596,92		415.544.528,86		423.855.419,44	



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASE LINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF												KET
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	18
Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang	240 Unit	240 Unit	356.011.07 0,25	250 Unit	363.131.29 1,66	250 Unit	370.393.91 7,49	250 Unit	377.801.79 5,84	250 Unit	385.357.83 1,75	250 Unit	393.064.98 8,39	Bidang Perdag a ngan
Pengawasan/Penyu luhan Metrologi Legal	Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang dibina	40 Orang	40 Orang	27.887.842 ,05	40 Orang	28.445.598 ,89	40 Orang	29.014.510 ,87	40 Orang	29.594.801 ,09	40 Orang	30.186.697 ,11	40 Orang	30.790.431 ,05	Bidang Perdag a ngan
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN				942.678.40 5		961.531.97 3,30		1.030.762. 612,77		1.000.377. 865,03		1.020.385. 422,33		1.040.793. 130,77	
PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Ketersediaan Dokumen Perencanaan dan Pembangunan Industri			929.633.91 1		948.226.58 9,22		967.191.12 1,00		986.534.94 3,42		1.006.265. 642,29		1.026.390. 955,14	
Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Laporan dalam rangka penyusunan dan evaluasi RPIK			929.633.91 1		948.226.58 9,22		1.117.191. 121,01		986.534.94 3,42		1.006.265. 642,29		1.026.390. 955,14	



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASE LINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF												KET
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	18
Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri	0 Doku men	0 Dokum en	0	Dokum en	-	1 Dokum en	150.000.000,00	1 Dokum en	153.000.000,00	1 Dokum en	156.000.000,00	1 Dokum en	159.000.000,00	Bidang Perindus trian
Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan, Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	0 Doku men	0 Dokum en	0	Dokum en	-	Dokum en	-	Dokum en	-	Dokum en	-	Dokum en	-	Bidang Perindus trian
Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	1 Doku men	1 Dokum en	169.815.055	1 Dokum en	173.211.356,10	1 Dokum en	176.675.583,22	1 Dokum en	180.209.094,89	1 Dokum en	183.813.276,78	1 Dokum en	187.489.542,32	Bidang Perindus trian



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASE LINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF												KET
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	18
Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	1 Doku men	1 Dokum en	237.454.743	1 Dokum en	242.203.837,86	1 Dokum en	247.047.914,62	1 Dokum en	251.988.872,91	1 Dokum en	257.028.650,37	1 Dokum en	262.169.223,38	Bidang Perindus trian
Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	2 Doku men	2 Dokum en	522.364.113	2 Dokum en	532.811.395,26	2 Dokum en	543.467.623,17	2 Dokum en	554.336.975,63	2 Dokum en	565.423.715,14	2 Dokum en	576.732.189,44	Bidang Perindus trian
Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	0 Doku men	Dokum en	-	Dokum en	-	Dokum en	-	Dokum en	-	Dokum en	-	Dokum en	-	Bidang Perindus trian
Pelaksanaan pengawasan Jaminan Produk Halal (JPH) di level Kabupaten/Kota	Jumlah objek pengawasan jaminan produk halal yang dapat diawasi - Jumlah program pengawasan Jaminan produk	0 Doku men	0 Dokum en	-	0 Dokum en	-	2 Dokum en	-	2 Dokum en	-	2 Dokum en	-	2 Dokum en	-	Pagu Anggara n Menyes uaikan



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASE LINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF												KET
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	18
	halal yang dapat diimplementasikan														
*PROSN/TEMATIK EKONOMI SYARIAH TAHUN 2027															Bidang Perindustrian
PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA	Persentase IKM yang dibina			-		-		50000000		-		-		-	



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASE LINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF												KET
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	18
Penerbitan Izin Usaha Industri (UI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan			-		-		50000000		-		-		-	



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASE LINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF												KET
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	18
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha industri dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah yang berlokasi di satu Kab./Kota sepanjang merupakan Penanaman Modal Dalam Negeri dan selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat	1 Dokumen	Dokumen	-	Dokumen	-	1 Dokumen	0,00	1 Dokumen	51.000.000 ,00	1 Dokumen	52.020.000 ,00	1 Dokumen	53.060.400 ,00	Bidang Perindustrian



Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Base Approach (OSS RBA)	Jumlah dokumen Laporan Verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko untuk bidang usaha sektor perindustrian dengan tingkat risiko usaha Menengah-Tinggi dan Tinggi, melalui SIINas yang terintegrasi dengan Sistem OSS RBA, bagi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah, selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat	2 Dokumen	Dokumen	0	Dokumen	-	2 Dokumen	50.000.000,00	2 Dokumen	51.000.000,00	2 Dokumen	52.020.000,00	2 Dokumen	53.060.400,00	Bidang Perindustrian
--	--	-----------	---------	---	---------	---	-----------	---------------	-----------	---------------	-----------	---------------	-----------	---------------	----------------------



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASE LINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF												KET
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	18
PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Ketersediaan Informasi Industri			13.044.494 ,20		13.305.384 ,08		13.571.491 ,77		13.842.921 ,60		14.119.780 ,03		14.402.175 ,63	
Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Informasi Industri yang memiliki IUI, IPUI, IUKI dan IPKI di Kabupaten Sanggau			13.044.494 ,20		13.305.384 ,08		13.571.491 ,77		13.842.921 ,60		14.119.780 ,03		14.402.175 ,63	



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASE LINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF												KET
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	18
Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	1 Doku men	0 Dokum en	0	Dokum en	-	Dokum en	-	Dokum en	-	Dokum en	-	Dokum en	-	Bidang Perindus trian
Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota melalui SIINas	Jumlah Dokumen Hasil Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas	1 Doku men	1 Dokum en	13.044.494 ,20	2 Dokum en	13.305.384 ,08	2 Dokum en	13.571.491 ,77	2 Dokum en	13.842.921 ,60	2 Dokum en	14.119.780 ,03	2 Dokum en	14.402.175 ,63	Bidang Perindus trian



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASE LINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF												KET
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	18
Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas	Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas	Doku men	Dokum en	-	Dokum en	-	Dokum en	-	Dokum en	-	Dokum en	-	Dokum en	-	Bidang Perindus trian
JUMLAH				10.858.522 .041.65		11.075.692 .482.48		11.517.652 .634.13		11.523.150 .458.78		11.753.613 .467.95		11.988.685 .737.32	

BAB V
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN



BAB V

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah ukuran keberhasilan suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi. IKU Perangkat Daerah (PD) adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis PD sebagaimana tertuang dalam Renstra PD Tahun 2025-2029. Adapun target yang sudah ditetapkan dalam Indikator Kinerja Utama (IKU), seperti pada tabel 5.1, tabel



Tabel 5. 1 INDIKATOR KINERJA DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO KABUPATEN SANGGAU YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD TAHUN 2025-2029

No.	Sasaran RPJMD	Tujuan Dinas	Sasaran Dinas	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja pada Awal Periode Renstra	Target Sasaran Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra
					2024	2025	2026	2027	2028	2029	
1)	2)	3)	4)	5)	6)	7)	8)	9)	10)	11)	12)
1.	Meningkatnya Pertumbuhan PDRB Sektor Strategis	1. Terwujudnya Pertumbuhan PDRB Sektor Strategis	1.1 Meningkatnya Pertumbuhan PDRB Sektor Strategis	1.1.1 Pertumbuhan PDRB Sektor Industri	2,23	2,23	2,23	2,23	2,23	2,23	2,23
				1.1.2 Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan	7,28	7,28	7,28	7,28	7,28	7,28	7,28
			2.1 Meningkatnya Kualitas Koperasi dan UM	2.1.1 Persentase Koperasi Aktif	27,35	27,50	28	29	30	35	35
				2.1.2 Persentase Kenaikan Kelas Usaha Mikro	0,57	1	1,75	1,78	1,81	1,84	1,84
2.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Pengawasan Internal Pemerintah Daerah	2. Terwujudnya Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	3.1 Meningkatnya akuntabilitas kinerja DISPERINDAGKOP	3.1.1 Nilai SAKIP	66,90	66,95	67,50	68	68,50	69	69



Tabel 5. 2 INDIKATOR KINERJA DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO KABUPATEN SANGGAU

Tujuan	Indikator Kinerja Tujuan	Target							Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Strategis	Target						
		Awal	2025	2026	2027	2028	2029	Akhir			Awal	2025	2026	2027	2028	2029	Akhir
Terwujudnya Pertumbuhan PDRB Sektor Strategis	Pertumbuhan PDRB Sektor Industri	2,23	2,23	2,23	2,23	2,23	2,23	2,23	Meningkatnya Produktivitas Perindustrian dan Perdagangan	Kontribusi PDRB Industri terhadap PDRB Kabupaten Sanggau	15,98	17,30	17,47	18,22	18,96	19,71	19,71
	Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan	7,28	7,28	7,28	7,28	7,28	7,28	7,28		Nilai perdagangan (milyar rupiah)	3.116,16	3.140,56	3.187,35	3.203,14	3.318,93	3.434,73	3.434,73
	Persentase Koperasi Aktif	27,35	27,50	28	29	30	35	35	Meningkatnya Kualitas Koperasi dan UM	persentase Koperasi yang Sehat	2,00	2,50	5,00	7,50	10,00	12,50	12,50
										Volume Usaha Koperasi (milyar rupiah)	696	696	699	703	706	710	710
	Persentase Kenaikan Kelas UM	0,57	1	1,75	1,78	1,81	1,84	1,84		Persentase UM yang meningkat Omzetnya	0,87	0,93	0,95	0,98	1,02	1,07	1,07
Terwujudnya Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	Nilai SAKIP	6,90	6,95	67,50	68	68,50	69	69	Meningkatnya akuntabilitas kinerja DISPERINDA GKOP	Nilai SAKIP DISPERINDA GKOP	66,90	66,95	67,5	68	68,5	69	69



BAB VI

PENUTUP

BAB VI

PENUTUP

Sehubungan dengan penyusunan Rencana Kerja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sanggau Tahun 2027, perlu disampaikan beberapa catatan penting yang memerlukan perhatian serta rencana tindak lanjut sebagai Upaya mendukung pencapaian sasaran, program, dan kegiatan yang telah ditetapkan. Hal-hal dimaksud diuraikan sebagai berikut.

5.1 CATATAN PENTING YANG PERLU MENDAPAT PERHATIAN

1. Rancangan Renja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sanggau Tahun 2027 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Renstra 2025–2029 dan disusun berdasarkan isu strategis daerah, target RPJMD Kabupaten Sanggau 2025–2029, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Penyusunan program dan kegiatan diarahkan pada kegiatan yang memiliki manfaat nyata, hasil yang cepat dirasakan masyarakat, serta mendukung pencapaian target pembangunan daerah.
3. Keterbatasan pagu indikatif menjadi tantangan dalam pelaksanaan program dan kegiatan, sehingga diperlukan prioritas program yang efektif dan efisien untuk mencapai target kinerja tahun 2027.
4. Dinas memiliki peran strategis dalam mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan sektor industri, perdagangan, koperasi, UM, ekonomi kreatif, revitalisasi pasar, pemberdayaan pedagang, serta peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

5.2 RENCANA TINDAK LANJUT

1. Menjadikan Renja Tahun 2027 sebagai dasar penyusunan RKA dan DPA SKPD Tahun Anggaran 2027.
2. Melaksanakan program dan kegiatan yang telah diprioritaskan sesuai target kinerja dan kemampuan anggaran yang tersedia.
3. Meningkatkan koordinasi dan sinergi dengan para pemangku kepentingan untuk mendukung pencapaian sasaran pembangunan sektor industri, perdagangan, koperasi, dan UM.



4. Mengoptimalkan pembinaan, pemberdayaan, pengawasan, serta pengembangan pasar dan UM guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi daerah.
5. Menggunakan Renja 2027 sebagai acuan dalam pengambilan keputusan dan evaluasi kinerja untuk peningkatan pelayanan dan hasil pembangunan pada tahun-tahun berikutnya.

Sanggau, 1 September 2026



Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan,
Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sanggau

Shopiar Juliansyah, S.E., MM
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP 197207301997031002